



# Laporan Perekonomian Provinsi Aceh

AGUSTUS 2024

KPw BI Provinsi Aceh



## VISI

Menjadi Kantor Perwakilan yang kredibel dalam pelaksanaan tugas BI dan kontributif bagi pembangunan ekonomi daerah maupun nasional.

## MISI

Menjalankan kebijakan BI dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, stabilitas sistem keuangan, efektivitas pengelolaan uang dan kehandalan sistem pembayaran untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah maupun nasional jangka panjang yang inklusif dan berkesinambungan.

## FUNGSI

1. Fungsi *Advisory* Kebijakan
2. Fungsi Statistik Ekonomi dan Keuangan Daerah
3. Fungsi Sistem Pembayaran
4. Fungsi Pengembangan UMKM dan Keuangan Inklusif
5. Fungsi *Regional Financial Surveillance* (RFS)
6. Fungsi Pengelolaan Uang Rupiah (PUR)
7. Fungsi Pengawasan SP dan PUR
8. Fungsi Komunikasi Kebijakan

## TUGAS POKOK

1. Memberikan masukan kepada Dewan Gubernur kondisi ekonomi dan keuangan daerah di wilayah kerjanya.
2. Memberikan saran kepada pemerintah daerah mengenai kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, yang didukung dengan penyediaan informasi berdasarkan hasil kajian/riset serta memfasilitasi pengendalian inflasi, pemberdayaan sektor riil dan UMKM
3. Melaksanakan kegiatan perizinan dan pengawasan serta operasionalisasi sistem pembayaran tunai dan non tunai sesuai dengan kebutuhan ekonomi daerah di wilayah kerjanya.
4. Melaksanakan kebijakan stabilitas keuangan, program perluasan dan pemerataan akses dan keterjangkauan keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
5. Mengelola sumber daya internal yang dibutuhkan sebagai faktor pendukung fungsi-fungsi utama.

## Kalender Publikasi Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Aceh

Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Mei	Agustus	November	Februari

## Penerbit :

Tim Perumusan Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh

Jl. Cut Meutia No.15, Banda Aceh - Indonesia

Telp : 0651-33200 / Fax : 0651-34116

Publikasi LPP secara online dapat diperoleh di:

<https://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian-ekonomi-regional/aceh/Default.aspx>

# Kata Pengantar

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga buku "Laporan Perekonomian Provinsi Aceh Agustus 2024" ini dapat dipublikasikan. Buku ini memaparkan informasi mengenai perkembangan beberapa indikator perekonomian daerah, diantaranya pertumbuhan ekonomi, perbankan, sistem pembayaran dan keuangan daerah yang dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan informasi baik untuk internal maupun eksternal Bank Indonesia. Secara umum, ringkasan hasil kajian atas perkembangan ekonomi regional Provinsi Aceh periode triwulan laporan adalah sebagai berikut:

1. Sejalan dengan kinerja ekonomi nasional, ekonomi Aceh pada triwulan II 2024 tumbuh lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya, namun tumbuh lebih kuat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi wilayah Sumatera. Pada triwulan II 2024, ekonomi Aceh tumbuh sebesar 4,54% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 4,82% (yoy). Pertumbuhan ekonomi bersumber dari masih kuatnya Konsumsi Rumah Tangga dan Konsumsi Pemerintah serta meningkatnya kinerja Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB).
2. Pada triwulan II 2024, laju Inflasi Provinsi Aceh mengalami penurunan dibandingkan dengan periode sebelumnya, didorong oleh inflasi Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau yang lebih stabil. Pada periode laporan, Provinsi Aceh mengalami inflasi sebesar 3,09% (yoy) atau lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 3,25% (yoy).
3. Untuk keseluruhan tahun 2024, kinerja perekonomian Aceh diperkirakan tumbuh pada kisaran 4,24% - 5,04% (yoy), lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya (4,23%, yoy). Membaiknya pertumbuhan ekonomi tersebut dipengaruhi oleh peningkatan kinerja konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah di tengah penyelenggaraan Pemilu 2024 dan Pekan Olahraga Nasional (PON) Aceh-Sumatera Utara 2024.
4. Sementara itu, laju inflasi tahun 2024 diperkirakan berada pada kisaran batas atas sasaran inflasi nasional sebesar  $2,5 \pm 1\%$ , didorong oleh peningkatan inflasi *volatile food* di tengah meningkatnya permintaan masyarakat pada periode penyelenggaraan Pemilu 2024 dan PON Aceh-Sumatera Utara 2024.

Dalam kesempatan ini, kami menghaturkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Harapan kami, kerja sama yang telah terjalin dapat terus berlanjut dan ditingkatkan pada masa yang akan datang.

Kami menyadari bahwa kualitas dan informasi yang disajikan masih perlu terus disempurnakan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran membangun dari seluruh pihak yang berkepentingan dengan buku ini.

Kami berharap, semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Banda Aceh, Agustus 2024  
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh

Rony Widijarto P.  
Kepala Perwakilan

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GRAFIK.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
TABEL INDIKATOR EKONOMI TERPILIH.....	vii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	xii
<b>BAB 1. PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH.....</b>	<b>1</b>
1.1. GAMBARAN UMUM.....	2
1.2. SISI PERMINTAAN.....	3
1.3. SISI LAPANGAN USAHA.....	7
<b>BAB 2. PERKEMBANGAN KEUANGAN DAERAH.....</b>	<b>15</b>
2.1. GAMBARAN UMUM.....	16
2.2. PERKEMBANGAN KINERJA KEUANGAN DAERAH.....	16
2.3. BELANJA DAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT.....	18
<b>BAB 3. PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH.....</b>	<b>20</b>
3.1. PERKEMBANGAN UMUM INFLASI.....	21
3.2. ANALISIS PERKEMBANGAN INFLASI.....	21
3.3. <i>TRACKING</i> INFLASI TRIWULAN II 2024.....	25
3.4. INFLASI SPASIAL.....	25
3.5. AKTIVITAS TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH (TPID) ACEH.....	27
<b>BAB 4. PEMBIAYAAN DAERAH SERTA PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN &amp; UMKM.....</b>	<b>28</b>
4.1. KINERJA PERBANKAN.....	29
4.2. INTERMEDIASI PERBANKAN.....	30
4.3. STRATEGI DALAM MENDORONG PENYALURAN PEMBIAYAAN UMKM DI ACEH.....	33
<b>BAB 5. PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH.....</b>	<b>35</b>
5.1. SISTEM PEMBAYARAN TUNAI.....	36
5.2. SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI.....	36
5.3. KEGIATAN USAHA PENUKARAN VALUTA ASING BUKAN BANK (KUPVA BB).....	39
5.4. PENYALURAN PROGRAM SEMBAKO DAN PKH.....	41
<b>BAB 6. KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN.....</b>	<b>43</b>
6.1. KETENAGAKERJAAN.....	44
6.2. KEMISKINAN.....	45
<b>BAB 7. PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH.....</b>	<b>48</b>
7.1. PROSPEK MAKROEKONOMI.....	49
7.2. PROSPEK INFLASI.....	51
7.3. REKOMENDASI KEBIJAKAN.....	51
DAFTAR ISTILAH.....	56

# DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Sumatera Triwulan II 2024 .....	2
Grafik 1.2 Pertumbuhan Ekonomi.....	3
Grafik 1.3 Pertumbuhan dan Andil Pertumbuhan Sisi Permintaan Triwulan II 2024 .....	3
Grafik 1.4 Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga.....	3
Grafik 1.5 Perkembangan Penjualan Mobil .....	4
Grafik 1.6 Perkembangan Pembiayaan Konsumsi .....	4
Grafik 1.7 Pertumbuhan Konsumsi Pemerintah.....	4
Grafik 1.8 Pertumbuhan Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan .....	4
Grafik 1.9 Perkembangan DPK Pemerintah.....	5
Grafik 1.10 Pertumbuhan PMTB .....	5
Grafik 1.11 Perkembangan Pembiayaan Investasi .....	5
Grafik 1.12 Pertumbuhan Ekspor Luar Negeri .....	5
Grafik 1.13 Perkembangan Ekspor Batubara .....	6
Grafik 1.14 Perkembangan Ekspor Komoditas Utama Aceh .....	6
Grafik 1.15 Pertumbuhan Impor Luar Negeri .....	6
Grafik 1.16 Perkembangan Realisasi Impor Luar Negeri .....	6
Grafik 1.17 Pertumbuhan Defisit Net Ekspor Antar Daerah .....	7
Grafik 1.18 Pertumbuhan dan Andil Pertumbuhan Sisi LU Utama Triwulan II 2024.....	7
Grafik 1.19 Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertanian .....	8
Grafik 1.20 Perkembangan Produksi Padi .....	8
Grafik 1.21 Penyaluran Pembiayaan Sektor Pertanian .....	8
Grafik 1.22 Pertumbuhan Lapangan Usaha Perdagangan .....	9
Grafik 1.23 Penyaluran Pembiayaan Sektor Perdagangan .....	9
Grafik 1.24 Perkembangan Survei Konsumen .....	9
Grafik 1.25 Pertumbuhan Lapangan Usaha Konstruksi .....	9
Grafik 1.26 Perkembangan SKDU Sektor Konstruksi .....	10
Grafik 1.27 Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertambangan .....	10
Grafik 1.28 Penyaluran Pembiayaan Sektor Pertambangan .....	10
Grafik 1.29 Pertumbuhan Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan .....	11
Grafik 1.30 Perkembangan Penumpang Kapal di Pelabuhan Ulee Lheue .....	11
Grafik 1.31 Penyaluran Pembiayaan Sektor Transportasi dan Pergudangan .....	11
Grafik 2.1 Perkembangan Derajat Desentralisasi Fiskal Keuangan Daerah Provinsi Aceh .....	17
Grafik 3.1 Laju Inflasi Provinsi di Sumatera Triwulan II 2024 .....	21
Grafik 3.2 Perkembangan Harga Emas Dunia .....	25
Grafik 3.3 Pergerakan Inflasi Kota Pantauan di Aceh .....	26
Grafik 4.1 Perkembangan Intermediasi Perbankan Aceh (Berdasarkan Lokasi Bank).....	29
Grafik 4.2 Perkembangan Intermediasi Perbankan Aceh (Berdasarkan Lokasi Proyek) .....	29
Grafik 4.3 Perkembangan Dana Pihak Ketiga .....	29
Grafik 4.4 Perkembangan <i>Non-Performing Financing</i> (Berdasarkan Lokasi Bank).....	30

Grafik 4.5 Perkembangan Penyaluran Pembiayaan (Berdasarkan Lokasi Bank).....	30
Grafik 4.6 Perkembangan Penyaluran Pembiayaan (Berdasarkan Lokasi Proyek) .....	30
Grafik 4.7 Proporsi DPK per Jenis (Berdasarkan Lokasi Bank).....	30
Grafik 4.8 Perkembangan DPK berdasarkan Jenis.....	31
Grafik 4.9 Proporsi DPK Berdasarkan Kepemilikan.....	31
Grafik 4.10 Perkembangan DPK Perseorangan .....	31
Grafik 4.11 Perkembangan DPK Pemerintah.....	31
Grafik 4.12 Perkembangan DPK Korporasi .....	32
Grafik 4.13 Perkembangan Pembiayaan (Lokasi Proyek).....	32
Grafik 4.14 Proporsi Pembiayaan Berdasarkan Penggunaan.....	32
Grafik 4.15 Penyaluran Pembiayaan Lapangan Usaha .....	33
Grafik 4.16 Perkembangan Pembiayaan UMKM .....	33
Grafik 5.1 <i>Netflow</i> Kas (Rp Triliun) .....	36
Grafik 5.2 Pertumbuhan <i>Inflow</i> dan <i>Outflow</i> .....	36
Grafik 5.3 Temuan Uang Palsu .....	36
Grafik 5.4 Perkembangan Nominal SKNBI .....	37
Grafik 5.5 Perkembangan Volume SKNBI .....	37
Grafik 5.6 Perkembangan Nominal BI-RTGS .....	37
Grafik 5.7 Perkembangan Volume BI-RTGS .....	38
Grafik 5.8 Transaksi ATM Debit .....	38
Grafik 5.9 Transaksi Kartu Kredit .....	38
Grafik 5.10 Perkembangan Transaksi UE .....	39
Grafik 5.11 Perkembangan Merchant QRIS .....	39
Grafik 5.12 Pertumbuhan Nominal dan Transaksi QRIS .....	39
Grafik 5.13 Transaksi KUPVA BB .....	40
Grafik 5.14 Disagregasi Transaksi UKA .....	40
Grafik 5.15 Perkembangan Penyaluran PKH (KPM) .....	41
Grafik 5.16 Perkembangan Penyaluran PKH (Nominal) .....	42
Grafik 5.17 Perkembangan Program Sembako (Nominal) .....	42
Grafik 5.18 Perkembangan Program Sembako (KPM) .....	42
Grafik 6.1 Tingkat Pengangguran di Wilayah Sumatera .....	44
Grafik 6.2 Jumlah Penduduk Miskin Desa dan Kota .....	46
Grafik 6.3 Penduduk Miskin Provinsi di Wilayah Sumatera .....	46
Grafik 6.4 Perkembangan Rasio Gini di Aceh .....	47

# DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Realisasi Belanja APBD Triwulan II 2024 .....	16
Tabel 2.2 Realisasi Belanja Transfer Antar Daerah dan Dana Desa Triwulan II 2024 .....	17
Tabel 2.3 Realisasi Pendapatan APBD se-Provinsi Aceh Triwulan II 2024.....	17
Tabel 2.4 Realisasi Belanja APBN di Provinsi Aceh Pada Triwulan II 2024 .....	18
Tabel 2.5 Realisasi Pendapatan APBN di Provinsi Aceh Pada Triwulan II 2024 .....	18
Tabel 2.6 Data Realisasi APBD Provinsi Aceh Triwulan II 2024 .....	19
Tabel 2.7 Data Realisasi APBN di Provinsi Aceh Triwulan II 2024.....	19
Tabel 3.1 Inflasi Kelompok Barang dan Jasa.....	21
Tabel 3.2 Inflasi Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau .....	22
Tabel 3.3 Inflasi Kelompok Pakaian dan Alas Kaki .....	22
Tabel 3.4 Inflasi Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar .....	22
Tabel 3.5 Inflasi Kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rumah Tangga .....	22
Tabel 3.6 Inflasi Kelompok Kesehatan.....	23
Tabel 3.7 Inflasi Kelompok Transportasi.....	23
Tabel 3.8 Inflasi Kelompok Informasi, Komunikasi, dan Keuangan.....	23
Tabel 3.9 Inflasi Kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya.....	23
Tabel 3.10 Inflasi Kelompok Pendidikan .....	24
Tabel 3.11 Inflasi Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran.....	24
Tabel 3.12 Inflasi Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya .....	24
Tabel 3.13 Andil Inflasi di Kota Banda Aceh .....	26
Tabel 3.14 Andil Inflasi di Kota Lhokseumawe .....	26
Tabel 3.15 Andil Inflasi di Kota Meulaboh .....	26
Tabel 3.16 Andil Inflasi di Aceh Tamiang .....	26
Tabel 3.17 Andil Inflasi di Aceh Tengah .....	26
Tabel 6.1 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).....	44
Tabel 6.2 Perkembangan TPT.....	44
Tabel 6.3 Tenaga Kerja Berdasarkan Sektor .....	44
Tabel 6.4 Tenaga Kerja Menurut Pendidikan.....	45
Tabel 6.5 Tenaga Kerja Berdasarkan Pekerjaan .....	45
Tabel 6.6 Nilai Tukar Petani .....	45
Tabel 6.7 Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan.....	47
Tabel 6.8 Indeks Kemiskinan .....	47
Tabel 7.1 <i>Global Economic Growth Outlook</i> .....	49

# TABEL INDIKATOR EKONOMI TERPILIH

## A. PDRB

PDRB ADHK Berdasarkan Lapangan Usaha (Rp Triliun)

Sektoral (Rp Triliun)	2023				2024	
	I	II	III	IV	I	II
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9,80	10,19	10,03	11,61	10,49	9,83
Pertambangan dan Penggalian	2,47	2,57	2,72	2,57	2,58	3,01
Industri Pengolahan	1,49	1,60	1,61	1,67	1,56	1,62
Pengadaan Listrik, Gas dan Produksi Es	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01
Konstruksi	3,15	3,20	3,56	4,11	3,30	3,47
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,74	5,56	5,69	6,27	5,83	5,84
Transportasi dan Pergudangan	2,34	2,49	2,47	2,43	2,59	2,88
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,53	0,55	0,56	0,59	0,55	0,55
Informasi dan Komunikasi	1,63	1,63	1,62	1,63	1,64	1,65
Jasa Keuangan dan Asuransi	0,56	0,37	0,37	0,57	0,56	0,57
Real Estate	1,48	1,48	1,62	1,52	1,56	1,56
Jasa Perusahaan	0,23	0,22	0,23	0,24	0,24	0,24
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,78	3,25	3,13	3,25	3,03	3,48
Jasa Pendidikan	0,97	1,03	0,97	0,94	0,99	1,04
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,20	1,26	1,33	1,21	1,13	1,28
Jasa lainnya	0,57	0,61	0,62	0,55	0,57	0,63
<b>PDRB</b>	<b>35,01</b>	<b>36,09</b>	<b>36,61</b>	<b>39,23</b>	<b>36,70</b>	<b>37,72</b>

Sumber: BPS Provinsi Aceh, diolah

## Pertumbuhan PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha (% , yoy)

Sektoral (Rp Triliun)	2023				2024	
	I	II	III	IV	I	II
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,75	5,66	7,70	8,54	7,04	-3,55
Pertambangan dan Penggalian	-6,21	-5,28	-1,82	-6,10	4,67	17,24
Industri Pengolahan	4,40	-4,90	-2,89	-1,97	4,69	1,50
Pengadaan Listrik, Gas dan Produksi Es	4,92	7,46	7,94	8,85	9,22	4,86
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,78	4,84	5,31	2,00	6,44	0,31
Konstruksi	3,60	7,84	1,36	2,65	4,87	8,54
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,72	5,53	9,68	10,23	1,68	4,91
Transportasi dan Pergudangan	3,77	10,41	9,47	6,27	10,65	15,69
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	11,32	7,09	5,38	9,16	3,76	0,97
Informasi dan Komunikasi	11,08	8,01	0,18	0,90	0,45	1,13
Jasa Keuangan dan Asuransi	-6,89	-17,30	-26,95	5,14	-0,38	52,01
Real Estate	4,06	3,89	2,09	4,72	5,09	4,95
Jasa Perusahaan	4,07	-5,62	-2,31	-0,02	2,79	6,77
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,66	6,81	-5,78	-0,39	9,08	7,17
Jasa Pendidikan	2,18	7,76	6,76	-8,47	1,72	1,65
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-4,58	-2,02	8,69	-3,48	-5,74	1,39
Jasa lainnya	5,75	9,14	8,49	-0,81	0,25	3,10
<b>PDRB</b>	<b>4,64</b>	<b>4,37</b>	<b>3,78</b>	<b>4,15</b>	<b>4,82</b>	<b>4,54</b>

Sumber: BPS Provinsi Aceh, diolah

## PDRB ADHK Berdasarkan Pengeluaran (Rp Triliun)

Komponen (Rp Triliun)	2023				2024	
	I	II	III	IV	I	II
- Konsumsi Rumah Tangga	19,43	19,98	19,99	20,03	20,39	20,83
- Konsumsi Lembaga Nonprofit Rumah Tangga	0,67	0,67	0,67	0,83	0,87	0,75
- Konsumsi Pemerintah	3,39	5,91	5,83	7,17	4,09	6,32
- Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	11,49	11,73	12,01	12,32	11,57	12,55
- Perubahan Inventori	0,37	-0,34	0,42	-0,16	0,35	-0,12
- Ekspor Luar Negeri	2,06	1,60	1,24	1,34	1,42	1,60
- Impor Luar Negeri	0,33	0,13	0,30	0,69	0,59	1,08
- Net Ekspor Antarprovinsi	-2,07	-3,34	-3,25	-1,61	-1,40	-3,12
<b>PDRB</b>	<b>35,01</b>	<b>36,09</b>	<b>36,61</b>	<b>39,23</b>	<b>20,39</b>	<b>20,83</b>

Sumber: BPS Provinsi Aceh, diolah

## Pertumbuhan PDRB Berdasarkan Pengeluaran (% , yoy)

Komponen (Rp Triliun)	2023				2024	
	I	II	III	IV	I	II
- Konsumsi Rumah Tangga	3,14	3,31	4,06	5,80	4,93	4,24
- Konsumsi Lembaga Nonprofit Rumah Tangga	5,14	4,81	0,59	21,88	29,34	10,67
- Konsumsi Pemerintah	0,85	10,26	1,41	-8,74	20,83	6,94
- Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	5,46	7,78	5,50	4,88	0,73	7,02
- Perubahan Inventori	-	-	-	-	-6,04	-63,72
- Ekspor Luar Negeri	25,33	-2,37	-26,46	-35,42	-31,05	-0,21
- Impor Luar Negeri	84,88	-64,44	61,39	92,01	79,07	745,73
- Net Ekspor Antarprovinsi	15,05	12,82	1,14	-52,03	-32,43	-6,59
<b>PDRB</b>	<b>4,64</b>	<b>4,37</b>	<b>3,78</b>	<b>4,15</b>	<b>4,93</b>	<b>4,24</b>

Sumber: BPS Provinsi Aceh, diolah

## B. Inflasi

Inflasi <sup>4</sup> (% , yoy)	2023				2024	
	I	II	III	IV	I	II
Banda Aceh	5,32	2,70	1,40	1,53	2,52	2,07
Lhokseumawe	5,35	2,69	2,55	1,56	2,79	2,97
Meulaboh	6,27	2,69	2,10	1,42	4,39	3,94
Aceh Tamiang					3,38	3,14
Aceh Tengah					4,51	4,78
<b>Provinsi Aceh</b>	<b>5,46</b>	<b>2,70</b>	<b>1,83</b>	<b>1,53</b>	<b>3,25</b>	<b>3,09</b>

Sumber: BPS Provinsi Aceh, diolah

## C. Perbankan

### Indikator Umum

Indikator	2023				2024	
	I	II	III	IV	I	II
<b>Total Aset (Rp Triliun)</b>	<b>51,04</b>	<b>52,03</b>	<b>53,77</b>	<b>57,84</b>	<b>56,03</b>	<b>57,67</b>
Pertumbuhan (yoy)%	2,35	-1,66	2,26	8,68	9,78	10,85
<b>DPK (Rp Triliun)</b>	<b>38,98</b>	<b>38,86</b>	<b>39,87</b>	<b>41,93</b>	<b>41,39</b>	<b>43,35</b>
Pertumbuhan (yoy)%	1,34	-5,47	0,41	5,78	6,18	11,56
<b>Kredit/Pembiayaan (Rp Triliun)</b>	<b>35,42</b>	<b>36,10</b>	<b>37,48</b>	<b>38,57</b>	<b>39,07</b>	<b>40,81</b>
Pertumbuhan (yoy)%	10,99	10,09	12,07	12,68	10,28	13,04
<b>FDR %</b>	<b>90,87</b>	<b>92,90</b>	<b>94,02</b>	<b>92,00</b>	<b>94,38</b>	<b>94,14</b>
<b>NPF-gross %</b>	<b>1,82</b>	<b>1,96</b>	<b>1,80</b>	<b>1,57</b>	<b>1,68</b>	<b>1,61</b>
<b>NPF-Nominal (Rp Triliun)</b>	<b>0,64</b>	<b>0,71</b>	<b>0,67</b>	<b>0,61</b>	<b>0,66</b>	<b>0,66</b>

Sumber: Laporan Bulanan Bank Umum, Lokasi Bank, diolah

<sup>4</sup> SBH 2022

## Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK)/Simpanan

Simpanan	2023				2024	
	I	II	III	IV	I	II
<b>Total (Rp Triliun)</b>	<b>38,98</b>	<b>38,86</b>	<b>39,87</b>	<b>41,93</b>	<b>41,39</b>	<b>43,35</b>
Pertumbuhan (yoy)%	1,34	-5,47	0,41	5,78	6,18	11,56
<b>Giro (Rp Triliun)</b>	<b>6,90</b>	<b>6,73</b>	<b>8,19</b>	<b>5,70</b>	<b>7,92</b>	<b>8,81</b>
Pertumbuhan (yoy)%	-34,94	-27,23	12,33	-9,66	14,71	30,85
<b>Tabungan (Rp Triliun)</b>	<b>21,55</b>	<b>22,52</b>	<b>22,07</b>	<b>24,99</b>	<b>22,99</b>	<b>24,35</b>
Pertumbuhan (yoy)%	6,27	4,97	3,43	4,33	6,71	8,12
<b>Deposito (Rp Triliun)</b>	<b>10,53</b>	<b>9,61</b>	<b>9,62</b>	<b>11,24</b>	<b>10,48</b>	<b>10,19</b>
Pertumbuhan (yoy)%	38,94	-7,63	-13,23	19,87	-0,47	6,08

Sumber : Laporan Bulanan Bank Umum, Lokasi Bank, diolah

## Kredit/Pembiayaan Berdasarkan Tujuan Penggunaan

Pinjaman	2023				2024	
	I	II	III	IV	I	II
<b>Total Kredit (Rp Triliun)</b>	<b>35,42</b>	<b>36,1</b>	<b>37,48</b>	<b>38,57</b>	<b>39,07</b>	<b>40,81</b>
Pertumbuhan (yoy) %	10,99	10,09	12,07	12,68	10,28	13,04
<b>Modal Kerja (Rp Triliun)</b>	<b>6,51</b>	<b>66,14</b>	<b>6,75</b>	<b>6,82</b>	<b>6,52</b>	<b>7,19</b>
Pertumbuhan (yoy)%	-11,27	-12,79	-7,06	0,14	0,05	8,65
<b>Investasi (Rp Triliun)</b>	<b>4,18</b>	<b>4,56</b>	<b>5,25</b>	<b>5,63</b>	<b>5,88</b>	<b>6,30</b>
Pertumbuhan (yoy)%	52,56	53,45	59,27	55,26	40,41	38,20
<b>Konsumsi (Rp Triliun)</b>	<b>14,72</b>	<b>24,92</b>	<b>25,48</b>	<b>26,12</b>	<b>26,67</b>	<b>27,32</b>
Pertumbuhan (yoy)%	13,25	12,1	11,33	9,77	7,87	9,60

Sumber : Laporan Bulanan Bank Umum, Lokasi Bank, diolah

Pinjaman	2023				2024	
	I	II	III	IV	I	II
<b>Total Kredit (Rp Triliun)</b>	<b>48,38</b>	<b>48,97</b>	<b>49,88</b>	<b>49,91</b>	<b>48,66</b>	<b>49,76</b>
Pertumbuhan (yoy) %	2,49	2,65	5,91	1,25	0,57	1,61
<b>Modal Kerja (Rp Triliun)</b>	<b>12,07</b>	<b>12,62</b>	<b>12,47</b>	<b>12,15</b>	<b>11,42</b>	<b>11,77</b>
Pertumbuhan (yoy)%	-13,98	-7,61	1,84	-5,79	-5,42	-6,78
<b>Investasi (Rp Triliun)</b>	<b>9,75</b>	<b>9,62</b>	<b>10,15</b>	<b>9,82</b>	<b>8,77</b>	<b>8,91</b>
Pertumbuhan (yoy)%	8,80	2,30	5,79	-4,13	-10,16	-7,43
<b>Konsumsi (Rp Triliun)</b>	<b>26,55</b>	<b>16,72</b>	<b>27,26</b>	<b>27,94</b>	<b>28,47</b>	<b>29,08</b>
Pertumbuhan (yoy)%	9,69	8,49	7,93	6,83	7,03	8,83

Sumber : Laporan Bulanan Bank Umum, Lokasi Proyek, diolah

## Kredit/Pembiayaan Berdasarkan Sektor Ekonomi

Sektor (Rp Triliun)	2023				2024	
	I	II	III	IV	I	II
Pertanian	1,74	1,92	2,20	2,32	2,33	3,01
Perikanan	0,30	0,29	0,30	0,30	0,32	0,31
Pertambangan	0,04	0,04	0,05	0,05	0,06	0,06
Ind. Pengolahan	1,06	1,16	1,24	1,30	1,31	1,34
Listrik, Gas & Air	0,06	0,07	0,13	0,12	0,11	0,11
Konstruksi	0,51	0,58	0,62	0,62	0,54	0,57
Perdagangan	5,26	5,29	5,47	5,59	5,52	5,77
Hotel & Restoran	0,31	0,35	0,41	0,44	0,47	0,51
Transportasi, Gudang & Kom.	0,21	0,22	0,23	0,26	0,27	0,28
Perantara Keuangan	0,14	0,08	0,03	0,03	0,03	0,03
Perumahan, usaha sewa & Js. Perusahaan	0,20	0,23	0,23	0,23	0,24	0,25
Adm Pemerintahan,	-	-	-	-	-	-
Jasa Pendidikan	0,04	0,06	0,06	0,07	0,08	0,08
Jasa Kesehatan & Keg. Sosial	0,23	0,24	0,28	0,31	0,31	0,31
Jasa Kemasyarakatan	0,54	0,61	0,71	0,77	0,77	0,81
Jasa Perseorangan	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04
Badan Internasional	-	-	-	-	-	-
Keg. Yg. Blm Jelas Keg-nya	-	-	-	-	-	-
Penerima Kredit Bukan Lap. Usaha	24,72	24,93	25,48	26,12	26,67	27,32
<b>Total</b>	<b>35,42</b>	<b>36,10</b>	<b>37,48</b>	<b>38,57</b>	<b>39,07</b>	<b>40,81</b>

Sumber : Laporan Bulanan Bank Umum, Lokasi Bank, diolah

Sektor (Rp Triliun)	2023				2024	
	I	II	III	IV	I	II
Pertanian	2,97	3,79	4,05	4,12	4,15	4,58
Perikanan	0,30	0,30	0,30	0,30	0,32	0,32
Pertambangan	3,59	2,47	2,27	2,42	1,48	1,16
Ind. Pengolahan	3,43	4,13	3,97	3,86	4,30	4,43
Listrik, Gas & Air	0,33	0,27	0,33	0,33	0,32	0,31
Konstruksi	0,78	0,82	0,93	0,92	0,89	0,86
Perdagangan	6,67	6,66	6,85	6,34	6,27	6,48
Hotel & Restoran	0,46	0,49	0,52	0,55	0,58	0,61
Transportasi, Gudang & Kom.	0,30	0,30	0,36	0,38	0,38	0,38
Perantara Keuangan	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,02
Perumahan, usaha sewa & Js. Perusahaan	2,10	2,01	1,92	1,52	0,26	0,27
Adm Pemerintahan,	-	-	-	-	-	-
Jasa Pendidikan	0,05	0,06	0,06	0,07	0,08	0,08
Jasa Kesehatan & Keg. Sosial	0,25	0,26	0,29	0,32	0,32	0,33
Jasa Kemasyarakatan	0,56	0,62	0,73	0,78	0,78	0,82
Jasa Perseorangan	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	0,04
Badan Internasional	-	-	-	-	-	-
Keg. Yg. Blm Jelas Keg-nya	-	-	-	-	-	-
Penerima Kredit Bukan Lap. Usaha	26,55	26,72	27,26	27,94	28,47	29,08
<b>Total</b>	<b>48,38</b>	<b>48,97</b>	<b>49,88</b>	<b>49,91</b>	<b>48,66</b>	<b>49,76</b>

Sumber : Laporan Bulanan Bank Umum, Lokasi Proyek, diolah

# RINGKASAN EKSEKUTIF

## Perkembangan Ekonomi Daerah

Ekonomi Aceh pada triwulan II 2024 ekonomi Aceh tumbuh sebesar 4,54% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,82% (yoy).

Sejalan dengan kinerja ekonomi nasional, ekonomi Aceh pada triwulan II 2024 tumbuh lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya, namun tumbuh lebih kuat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi wilayah Sumatera. Pada triwulan II 2024, ekonomi Aceh tumbuh sebesar 4,54% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 4,82% (yoy). Pertumbuhan ekonomi bersumber dari masih kuatnya Konsumsi Rumah Tangga dan Konsumsi Pemerintah serta meningkatnya kinerja Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB).

## Perkembangan Keuangan Daerah

Realisasi agregat belanja pemerintah di Provinsi Aceh sampai dengan triwulan II 2024 tumbuh dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Realisasi agregat belanja dan pendapatan pemerintah di Provinsi Aceh sampai dengan triwulan II 2024 membaik dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini didorong oleh membaiknya realisasi Belanja dan Pendapatan Negara maupun realisasi Belanja dan Pendapatan Daerah pada periode triwulan pelaporan. Komponen realisasi Belanja yang memiliki pertumbuhan tertinggi terdapat di Belanja Transfer sebesar 43,61%. Hal tersebut sejalan dengan peningkatan realisasi Pendapatan Transfer yang meningkat paling tinggi disbanding komponen lainnya sebesar 49,42%.

## Perkembangan Inflasi Daerah

Inflasi Gabungan Kota di Provinsi Aceh pada triwulan II 2024 tercatat sebesar 3,09% (yoy) atau lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 3,25% (yoy).

Pada triwulan II 2024, laju Inflasi Provinsi Aceh tercatat sebesar 3,09% (yoy) atau lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 3,25% (yoy). Kondisi ini didorong oleh inflasi Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau yang lebih stabil pada periode laporan. Penurunan inflasi ditahan oleh beberapa risiko khusus seperti (i) momen HBKN Iduladha di Aceh yang diperingati selama empat hari (17 – 20 Juni 2024); (ii) penyaluran gaji ke-13 dan tunjangan meugang (tunjangan khusus di Aceh untuk Iduladha); (iii) periode persiapan pendaftaran sekolah semester genap untuk SD s.d. SMA. Untuk triwulan III 2024, inflasi diperkirakan akan lebih tinggi disebabkan oleh PON XXI Aceh-Sumut, Maulid, Kampanye Pilkada Serentak, serta kenaikan BBM..

## Stabilitas Keuangan Daerah dan Pengembangan Akses Keuangan UMKM

Stabilitas Sistem Keuangan Provinsi Aceh pada triwulan II 2024 mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya.

Stabilitas Sistem Keuangan Provinsi Aceh pada triwulan II 2024 tumbuh stabil. Hal ini tercermin dari peningkatan pembiayaan berdasarkan lokasi bank yang diikuti oleh penurunan *Non Performing Financing*. Peningkatan juga terjadi pada Dana Pihak Ketiga (DPK) berdasarkan lokasi bank yang tumbuh sebesar 11,56% (yoy). Sementara, rasio pembiayaan untuk UMKM mencapai sebesar 27,93%.

## Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Selama triwulan II 2024, perkembangan sistem pembayaran konsisten berjalan lancar dalam mendorong perekonomian Provinsi Aceh.

Selama triwulan II 2024, perkembangan sistem pembayaran secara konsisten berjalan lancar dalam mendorong perekonomian Provinsi Aceh. Sistem pembayaran tunai berjalan dengan baik, dimana terjadi *net inflow* pada triwulan laporan. Sistem pembayaran non tunai nilai besar mengalami pertumbuhan. Di sisi lain, penggunaan kartu debit, uang elektronik, dan QRIS terus menunjukkan tren pertumbuhan positif pada triwulan laporan.

## Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami penurunan yang diikuti oleh tingkat kemiskinan yang menunjukkan penurunan dibandingkan periode sebelumnya.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) periode berjalan mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Hal ini sejalan dengan tingkat kemiskinan yang menunjukkan penurunan persentase. Namun demikian, dibandingkan dengan seluruh provinsi di Sumatera, TPT Aceh masih berada pada urutan ketiga, sedangkan kemiskinan masih berada pada peringkat pertama.

## Prospek Perekonomian

Perekonomian Aceh pada tahun 2024 diperkirakan akan melanjutkan pertumbuhan positif dari tahun sebelumnya.

Kinerja perekonomian Provinsi Aceh pada tahun 2024 diperkirakan tumbuh pada kisaran 4,24%-5,04% (yoy) atau berpotensi lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya (4,23%, yoy). Membaiknya pertumbuhan ekonomi tersebut dipengaruhi oleh peningkatan kinerja konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah di tengah penyelenggaraan Pemilu 2024 dan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumatera Utara 2024. Sementara itu, laju inflasi tahun 2024 diperkirakan berada kisaran sasaran inflasi nasional sebesar 2,5±1%. Prospek terkendalinya inflasi Provinsi Aceh pada tahun 2024 didukung oleh berbagai kebijakan pengendalian inflasi yang dilakukan oleh TPIP dan TPID se-Aceh.



## BAB I PERKEMBANGAN EKONOMI DAERAH

Sejalan dengan kinerja ekonomi nasional, ekonomi Aceh pada triwulan II 2024 tumbuh lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya, namun tumbuh lebih kuat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi wilayah Sumatera. Pada triwulan II 2024, ekonomi Aceh tumbuh sebesar 4,54% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 4,82% (yoy). Pertumbuhan ekonomi bersumber dari masih kuatnya Konsumsi Rumah Tangga dan Konsumsi Pemerintah serta meningkatnya kinerja Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB).

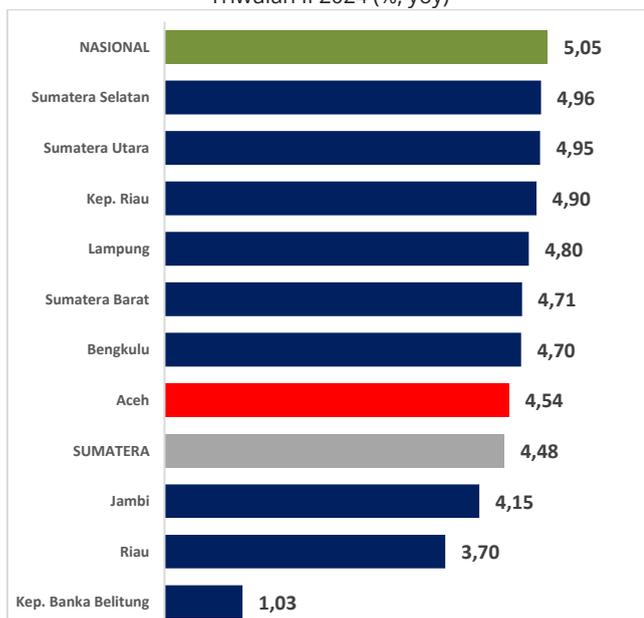
## 1.1. Gambaran umum

Sejalan dengan kinerja ekonomi nasional, ekonomi Aceh pada triwulan II 2024 tumbuh lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya, namun lebih kuat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi wilayah Sumatera. Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi Aceh bersumber dari masih kuatnya Konsumsi Rumah Tangga dan Konsumsi Pemerintah serta meningkatnya kinerja Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Dari sisi sektoral, sumber pertumbuhan ekonomi bersumber dari meningkatnya kinerja Lapangan Usaha (LU) Pertambangan dan Penggalian, LU Transportasi dan Pergudangan, LU Konstruksi, dan LU Perdagangan.

### Kinerja Perekonomian Triwulan II 2024

Secara nasional, pertumbuhan ekonomi pada triwulan II 2024 tumbuh melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,05% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 5,11% (yoy). Sementara itu, ekonomi Sumatera pada triwulan II 2024 mengalami akselerasi dengan tumbuh sebesar 4,48% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 4,24% (yoy). (Grafik 1.1).

**Grafik 1.1.** Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Sumatera Triwulan II 2024 (% ,yoy)



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

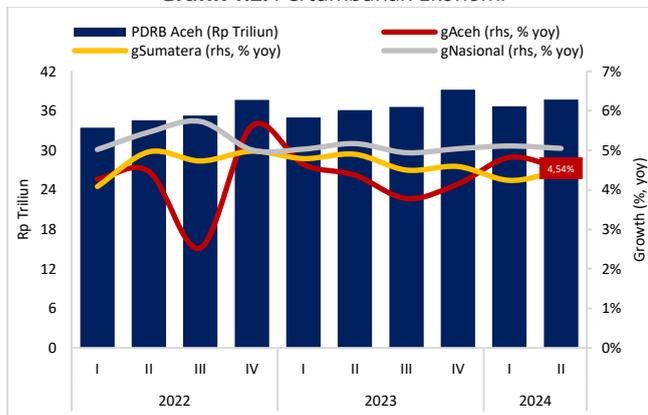
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh pada triwulan II 2024 juga lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada periode laporan, ekonomi Aceh tumbuh sebesar 4,54% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 4,82% (yoy) (Grafik 1.2). Kinerja ekonomi Aceh tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumatera, namun lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi Aceh pada triwulan II 2024 ini menempatkan Aceh menjadi provinsi dengan pertumbuhan ketujuh tertinggi di wilayah Sumatera.

Ditinjau dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi Aceh didorong oleh masih kuatnya Konsumsi Rumah Tangga dan Konsumsi Pemerintah serta meningkatnya kinerja PMTB. Tetap kuatnya Konsumsi RT ditopang oleh masih kuatnya daya beli masyarakat didukung oleh pencairan gaji ke-13 ASN dan inflasi yang lebih stabil. Sementara itu, Konsumsi Pemerintah tetap tumbuh kuat didorong oleh akselerasi realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mengalami keterlambatan persetujuan pada triwulan I 2024. Selain itu, konsumsi pemerintah juga tetap tumbuh kuat didukung oleh pembayaran gaji ke-13 ASN dan pembangunan infrastruktur PON 2024 yang masih terus berlanjut pada triwulan laporan. Sementara itu, peningkatan kinerja PMTB didorong oleh percepatan pembangunan PSN Jalan Tol Sigli-Banda Aceh, Bendungan Keureuto dan Bendungan Rukoh, serta infrastruktur PON 2024 yang ditargetkan selesai pada September 2024.

Sementara dari sisi Lapangan Usaha, akselerasi didorong oleh meningkatnya kinerja LU Pertambangan dan Penggalian, LU Transportasi dan Pergudangan, LU Konstruksi, dan LU Perdagangan. Peningkatan kinerja LU Pertambangan dan Penggalian didorong oleh peningkatan produksi Batubara di tengah membaiknya harga batubara dunia pada triwulan laporan. Sementara itu, LU Transportasi dan Pergudangan, serta LU Perdagangan meningkat didorong oleh peningkatan mobilitas masyarakat

pada dua Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri dan Idul Adha pada triwulan laporan. Selain itu, inflasi yang lebih stabil juga turut mendorong kinerja sektor tersebut. Di sisi lain, LU Kontruksi mengalami peningkatan sejalan dengan percepatan pembangunan PSN serta infrastruktur PON 2024 yang ditargetkan selesai pada September 2024.

**Grafik 1.2.** Pertumbuhan Ekonomi



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

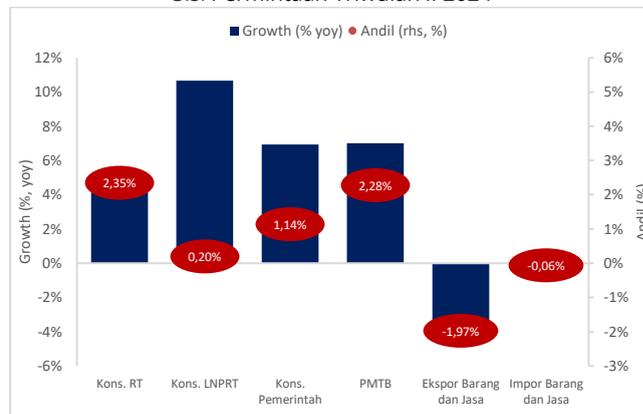
Berdasarkan pencapaian tersebut, kontribusi Aceh terhadap ekonomi Sumatera sebesar 4,89%, relatif stabil dibandingkan dengan periode sebelumnya. Dengan proporsi tersebut, Aceh masih menjadi salah satu provinsi dengan perekonomian terkecil di Sumatera setelah Bengkulu (2,18%) dan Kepulauan Bangka Belitung (2,23%). Sementara itu, Sumatera Utara (23,51%), Riau (22,59%), dan Sumatera Selatan (13,61%) masih menjadi provinsi dengan sumbangan ekonomi paling dominan di Sumatera dengan pangsa dari ketiga provinsi tersebut mencapai 60,71% dari total ekonomi Sumatera.

## 1.2. Sisi Permintaan

Dari sisi permintaan, pertumbuhan utamanya bersumber dari masih kuatnya Konsumsi Rumah Tangga dan Konsumsi Pemerintah serta meningkatnya kinerja PMTB. Konsumsi rumah tangga masih menjadi penyumbang pertumbuhan tertinggi pada sisi permintaan walaupun tumbuh melambat pada triwulan II 2024. Konsumsi rumah tangga memberikan andil pertumbuhan sebesar 2,35%. Sementara itu, konsumsi pemerintah juga memberikan andil pertumbuhan yang tinggi sebesar 1,14% di tengah percepatan realisasi APBD yang sempat mengalami keterlambatan

penandatanganan pada triwulan sebelumnya. Sementara itu, peningkatan kinerja PMTB turut memberikan andil terhadap pertumbuhan ekonomi Aceh sebesar 2,28% didorong oleh percepatan pembangunan PSN dan infrastruktur PON 2024 (Grafik 1.3).

**Grafik 1.3.** Pertumbuhan dan Andil Pertumbuhan Sisi Permintaan Triwulan II 2024

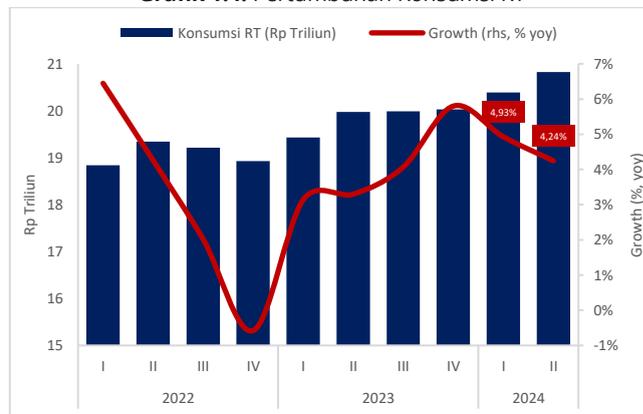


Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

## Konsumsi Rumah Tangga

Pada triwulan II 2024, konsumsi rumah tangga masih tumbuh kuat. Konsumsi rumah tangga pada periode laporan tumbuh sebesar 4,24% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 4,93% (yoy) (Grafik 1.4). Tingkat pertumbuhan ini membuat konsumsi rumah tangga memberikan andil bagi pertumbuhan ekonomi sebesar 2,35%. Walaupun demikian, pertumbuhan konsumsi RT tetap kuat didukung oleh inflasi yang terjaga di tengah momen HBKN Idul Fitri dan Idul Adha.

**Grafik 1.4.** Pertumbuhan Konsumsi RT



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Lebih rendahnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga tercermin dari menurunnya penjualan mobil di Provinsi Aceh. Pada triwulan II 2024, penjualan

mobil mencapai 1.884 unit kendaraan atau terkontraksi sebesar -3,93% (yoy), lebih dalam dari triwulan sebelumnya yang juga menunjukkan penurunan sebesar -2,78% (yoy) (Grafik 1.5).



Sumber: Badan Pengelola Keuangan Aceh, diolah

Masih kuatnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga ditopang oleh menguatnya pembiayaan konsumsi. Walaupun mengalami deselerasi, konsumsi rumah tangga masih tumbuh kuat didukung oleh peningkatan pembiayaan konsumsi yang tumbuh sebesar 8,83% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 8,12% (% yoy) (Grafik 1.6).



Sumber : Laporan Bank Umum, lokasi proyek, diolah

## Konsumsi Pemerintah

Kinerja konsumsi pemerintah melambat pasca penyelenggaraan Pemilu 2024. Kinerja konsumsi pemerintah pada triwulan II 2024 tumbuh sebesar 6,94% (yoy), atau mengalami perlambatan dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 20,83% (yoy) (Grafik 1.7). Konsumsi pemerintah mengalami normalisasi pertumbuhan pasca penyelenggaraan Pemilu 2024. Walaupun demikian, konsumsi

pemerintah masih tumbuh positif didukung oleh akselerasi realisasi APBA setelah sebelumnya mengalami keterlambatan persetujuan pada triwulan I 2024. Selain itu, terdapat realisasi pembayaran gaji ke-13 ASN dan pembangunan infrastruktur PON 2024 yang masih terus berlanjut pada triwulan laporan.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Konsumsi Pemerintah yang melambat tercermin dari melambatnya LU Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Pada triwulan II 2024, LU tersebut tumbuh sebesar 7,17% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 9,08% (yoy) (Grafik 1.8).



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Melambatnya konsumsi pemerintah juga sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) Pemerintah. Pada triwulan II 2024, DPK Pemerintah tercatat tumbuh sebesar 17,51% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,96% (yoy) (Grafik 1.9). DPK Pemerintah menunjukkan seberapa besar dana pemerintah

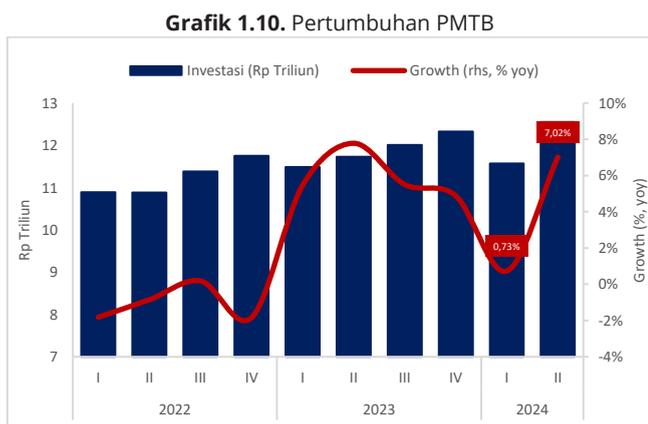
yang ada di perbankan. Meningkatnya pertumbuhan DPK menunjukkan bahwa pada triwulan laporan terjadi pelambatan realisasi anggaran.



Sumber: Laporan Bank Umum, lokasi proyek, diolah

## Investasi

Pada triwulan II 2024, investasi di Aceh meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya seiring dengan akselerasi penyelesaian berbagai proyek infrastruktur. PMTB Aceh pada triwulan II 2024 tumbuh sebesar 7,02% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya 0,73% (yoy) (Grafik 1.10). Meningkatnya kinerja investasi sejalan percepatan pembangunan pembangunan PSN serta infrastruktur PON 2024 yang ditargetkan selesai pada September 2024.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Peningkatan investasi tercermin dari meningkatnya kinerja pembiayaan investasi pada triwulan laporan. Pembiayaan investasi tumbuh sebesar -7,43% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar -10,16% (yoy) (Grafik 1.11). Dari sisi nilai, pembiayaan konsumsi juga mengalami peningkatan dari Rp8,77

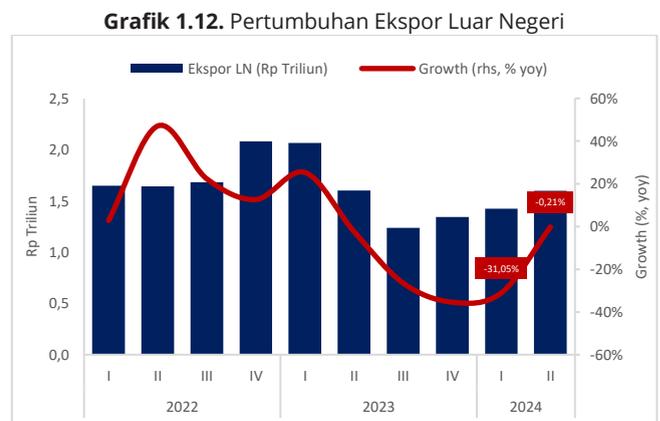
triliun pada triwulan I 2024 menjadi Rp8,91 triliun pada triwulan II 2024.



Sumber: Laporan Bank Umum, lokasi proyek, diolah

## Ekspor Luar Negeri

Membayaknya harga komoditas mendorong kinerja ekspor luar negeri Aceh tumbuh meningkat pada triwulan II 2024. Ekspor luar negeri Provinsi Aceh pada triwulan II 2024 tumbuh sebesar -0,21% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar -31,05% (yoy) (Grafik 1.12). Perbaikan kinerja ekspor luar negeri didukung oleh peningkatan harga batubara sebagai komoditas ekspor utama Aceh.

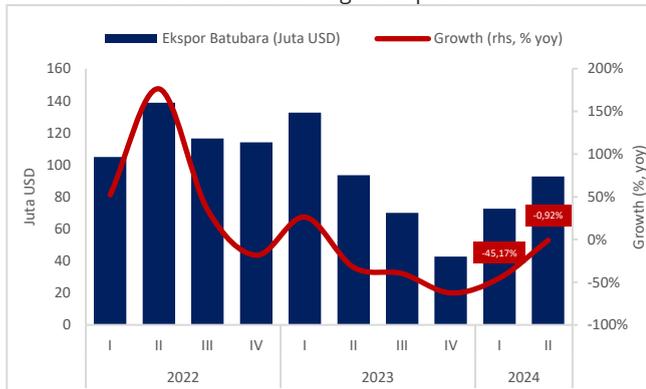


Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Kinerja ekspor luar negeri yang membaik bersumber dari pemulihan pertumbuhan ekspor salah satunya ekspor batubara. Pada triwulan II 2024, ekspor luar negeri Aceh utamanya ditopang oleh ekspor batubara dengan pangsa sebesar 63,48%. Ekspor batubara pada triwulan II 2024 tumbuh sebesar -0,92% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar -45,17% (yoy) (Grafik 1.13). Pemulihan ekspor batubara sejalan dengan kenaikan harga batubara yang

mengalami kenaikan dari USD 75,55/metric ton pada triwulan I 2024 menjadi USD 76,76/metric ton pada triwulan II 2024.

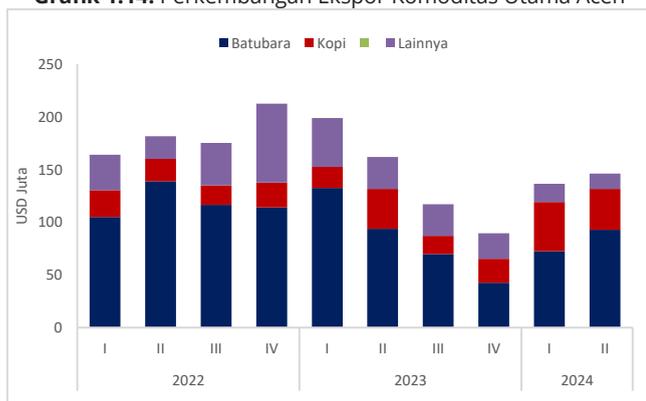
**Grafik 1.13.** Perkembangan Ekspor Batubara



Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), diolah

**Ekspor komoditas utama lainnya yaitu kopi masih menunjukkan peningkatan.** Komoditas ekspor luar negeri Aceh terbesar kedua setelah Batubara adalah kopi dengan pangsa 26,65% (Grafik 1.14). Pada triwulan II 2024, ekspor kopi Aceh mencapai USD 38,93 juta, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar USD 44,56 juta. Sementara itu, ekspor lainnya (pangsa 9,87%) umumnya terdiri komoditas rempah-rempah, minyak nabati, pupuk, produk kimia, dan ikan olahan. Pada periode laporan, ekspor lainnya memberikan nilai ekspor sebesar USD 14,42 juta, lebih rendah dari triwulan sebelumnya sebesar USD 17,22 juta.

**Grafik 1.14.** Perkembangan Ekspor Komoditas Utama Aceh



Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), diolah

## Impor Luar Negeri

**Impor luar negeri mengalami akselerasi sejalan dengan kenaikan impor gas pada triwulan laporan.** Pada triwulan II 2024, impor luar negeri tumbuh sebesar 745,73% (yoy), lebih tinggi triwulan

sebelumnya sebesar 79,07% (yoy) (Grafik 1.15). Secara umum, kinerja impor luar negeri didominasi oleh impor komoditas migas terutama gas dan aspal dengan pangsa mencapai 82,58% dari total impor sepanjang tahun 2024. Sementara itu, pada triwulan berjalan impor beras masih terus dilakukan guna menjaga pasokan beras di Provinsi Aceh.

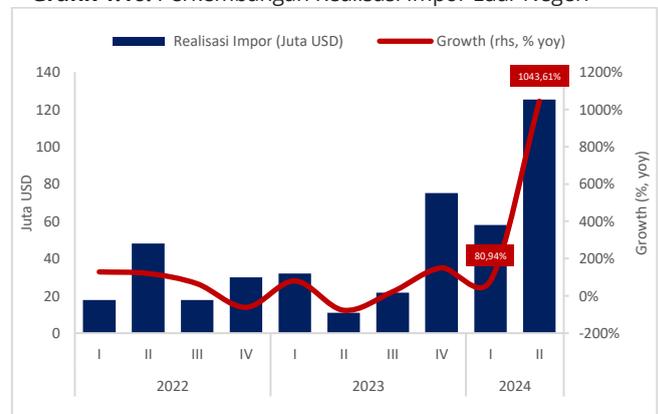
**Grafik 1.15.** Pertumbuhan Impor Luar Negeri



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

**Impor Aceh pada triwulan II 2024 lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya.** Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Bea Cukai Aceh, nilai impor barang Provinsi Aceh pada triwulan II 2024 sebesar USD 125,34 juta, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar USD 10,96 juta. Sementara itu, dari sisi pertumbuhan impor luar negeri juga mengalami akselerasi dengan tumbuh sebesar 1.043,61% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 80,94% (yoy) (Grafik 1.16).

**Grafik 1.16.** Perkembangan Realisasi Impor Luar Negeri

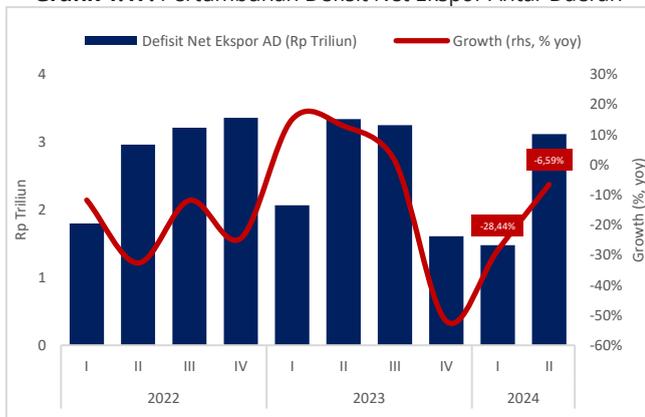


Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), diolah

## Net Ekspor Antar Daerah

**Defisit neraca ekspor antar daerah<sup>1</sup> Provinsi Aceh mengalami peningkatan pada Triwulan II 2024.** Pada triwulan II 2024, defisit neraca ekspor antar daerah tercatat Rp3,12 triliun, lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2024 sebesar Rp1,48 triliun, namun lebih rendah dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp3,34 triliun. Pada triwulan laporan, defisit net ekspor antar daerah tumbuh sebesar -6,59% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar -28,44% (yoy) (Grafik 1.17).

**Grafik 1.17.** Pertumbuhan Defisit Net Ekspor Antar Daerah



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

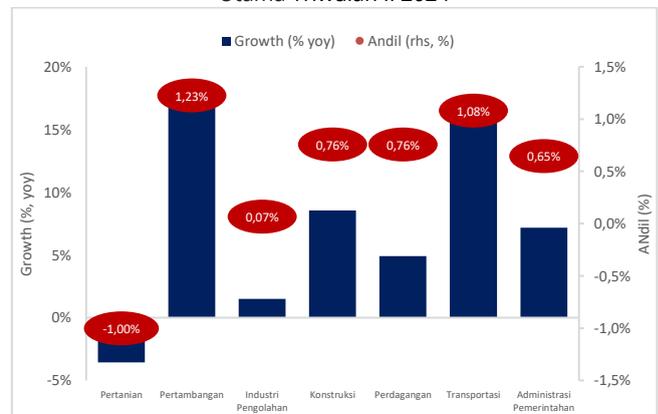
**Komoditas minyak kelapa sawit menjadi sumber utama penjualan provinsi Aceh ke daerah lain.** Berdasarkan data Perdagangan Antar Wilayah (PAW) 2023 dari Badan Pusat Statistik, penjualan antar wilayah paling besar di Provinsi Aceh utamanya berasal dari komoditas minyak kelapa sawit dengan nilai penjualan sebesar Rp4,4 triliun dari total penjualan sebesar Rp9,84 triliun. Komoditas penjualan Provinsi Aceh terbesar selanjutnya adalah buah dan kernel kelapa sawit, kopi (sangrai), kopi (hijau), serta asam fosfat. Kelima komoditas penjualan Provinsi Aceh terbesar tersebut memiliki pangsa sebesar 92,70%. Provinsi Aceh melakukan penjualan terbesar ke Provinsi Sumatera Utara (Rp9,23 triliun), Provinsi Jawa Timur (Rp0,53 triliun), dan Provinsi DKI Jakarta (Rp0,05 triliun).

Di sisi lain, komoditas pembelian Provinsi Aceh dari daerah lain didominasi oleh komoditas buah dan kernel kelapa sawit, alat transportasi umum, sepeda motor, dan mobil. Lima kelompok komoditas ini mencakup 55,21% dari total pembelian antar wilayah di Provinsi Aceh sebesar Rp14,52 triliun. Provinsi Aceh melakukan pembelian terbesar ke Provinsi Sumatera Utara (Rp10,36 triliun), Provinsi DKI Jakarta (Rp2,52 triliun), dan Provinsi Riau (Rp0,70 triliun).

## 1.3. Sisi Lapangan Usaha

Dari sisi penawaran, pertumbuhan utamanya didorong oleh meningkatnya kinerja LU Pertambangan dan Penggalian, LU Transportasi dan Pergudangan, LU Kontraksi, dan LU Perdagangan. LU Pertambangan dan Penggalian memberikan kontribusi pertumbuhan terbesar pada triwulan laporan sebesar 1,23%, LU Transportasi dan Pergudangan sebesar 1,08%, serta disusul oleh LU Kontraksi dan LU Perdagangan yang sebesar 0,76% (Grafik 1.18). Sementara itu, LU Pertanian memberikan kontribusi pertumbuhan sebesar -1,00% pada triwulan laporan. Walaupun demikian LU Pertanian masih memiliki pangsa terbesar bagi PDRB Aceh sebesar 29,25%, disusul LU Perdagangan sebesar 14,94%, LU Administrasi Pemerintahan sebesar 9,77%, LU Kontraksi sebesar 8,53%, serta LU Pertambangan dan Penggalian sebesar 7,73%.

**Grafik 1.18.** Pertumbuhan dan Andil Pertumbuhan Sisi LU Utama Triwulan II 2024



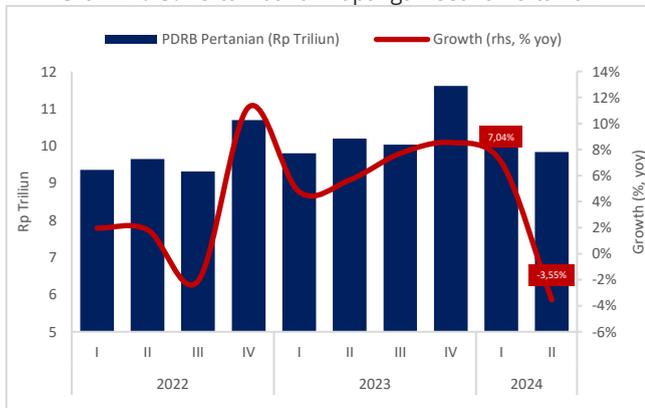
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

<sup>1</sup> Defisit antar daerah mengindikasikan arus barang masuk (pembelian) lebih besar dari barang yang keluar (penjualan).

## Lapangan Usaha Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

**Kinerja LU Pertanian mengalami penurunan pertumbuhan karena adanya pergeseran musim panen padi.** Pada triwulan II 2024, LU Pertanian mengalami penurunan pertumbuhan sebesar -3,55% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 7,04% (yoy) (Grafik 1.19). Menurunnya pertumbuhan LU Pertanian diakibatkan oleh adanya pergeseran musim panen padi dan tren penurunan luas lahan pertanian. Pada tahun 2024 puncak panen padi terjadi pada triwulan I, sementara pada tahun 2023 terjadi di triwulan II.

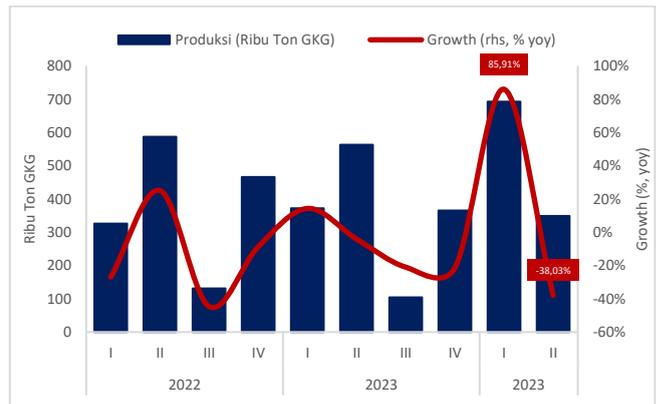
**Grafik 1.19.** Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertanian



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

**Produksi padi mengalami penurunan pada triwulan II 2024 dibandingkan triwulan sebelumnya maupun periode yang sama tahun sebelumnya.** Pada triwulan laporan, produksi padi di Provinsi Aceh mencapai 348,52 ribu ton GKG, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 692, 10 ribu ton GKG. Produksi padi turun sebesar -38,03% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 85,91% (yoy) (Grafik 1.20). Tiap tahunnya terjadi penurunan luas padi di Provinsi Aceh yang menyebabkan produksi padi menurun tiap tahunnya. Pada tahun 2023, luas panen padi mencapai 254,29 ribu hektar, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 271,75 ribu hektar atau turun sebesar -6,43% (yoy). Sementara itu, pada tahun 2024, diperkirakan luas panen padi juga mengalami penurunan menjadi 244,00 ribu hektar atau turun sebesar -4,05% (yoy).

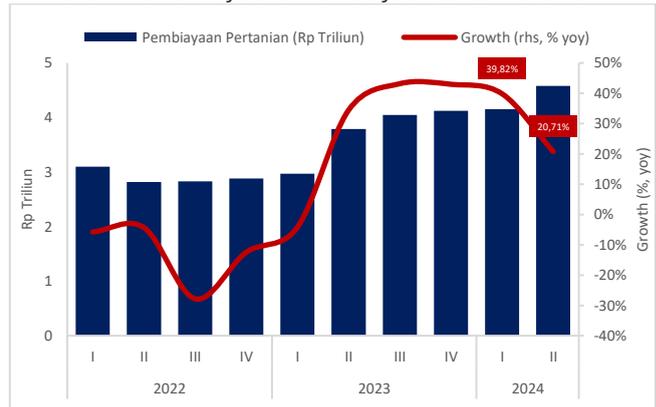
**Grafik 1.20.** Perkembangan Produksi Padi



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

**Pada sisi penyaluran pembiayaan sektoral, LU Pertanian juga mengalami pelambatan dibandingkan triwulan sebelumnya.** Pada triwulan laporan, posisi pembiayaan mencapai Rp4,58 triliun atau tumbuh sebesar 20,71% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 39,82% (yoy) (Grafik 1.21).

**Grafik 1.21.** Penyaluran Pembiayaan Sektor Pertanian



Sumber: Laporan Bank Umum, lokasi proyek, diolah

## Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

**Kinerja LU Perdagangan pada triwulan II 2024 meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya.** Pada triwulan II 2024, LU Perdagangan mengalami akselerasi dengan tumbuh sebesar 4,91% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 1,68% (yoy) (Grafik 1.22). Meningkatnya kinerja LU Perdagangan didorong oleh adanya momen HBKN Idul Fitri dan Idul Adha pada triwulan laporan.

**Grafik 1.22.** Pertumbuhan Lapangan Usaha Perdagangan



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

**Membaiknya pertumbuhan LU Perdagangan ditopang oleh meningkatnya pembiayaan pada sektor tersebut.** Pada triwulan laporan, posisi pembiayaan mencapai Rp6,48 triliun atau tumbuh sebesar -2,80% (yoy). Nilai ini lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar -6,03% (yoy) dengan pembiayaan mencapai Rp6,27 triliun (Grafik 1.23).

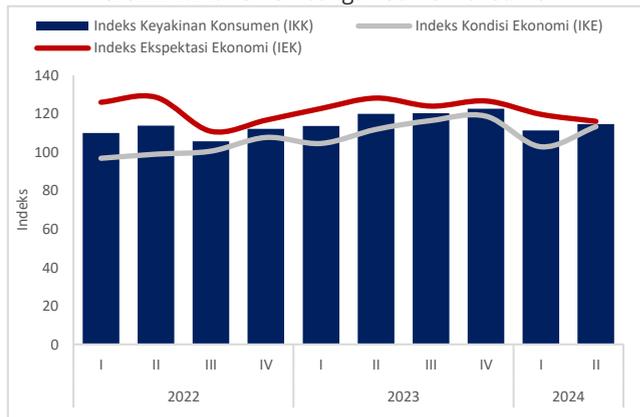
**Grafik 1.23.** Penyaluran Pembiayaan Sektor Perdagangan



Sumber: Laporan Bank Umum, lokasi proyek, diolah

**Membaiknya kinerja LU Perdagangan juga tercermin dari hasil survei konsumen yang dilakukan oleh Bank Indonesia.** Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada triwulan II 2024 sebesar 114,71, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 111,29. Sementara itu, Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) juga menunjukkan peningkatan. Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) pada triwulan laporan memiliki nilai sebesar 113,33, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 102,86. Sementara itu, Indeks Ekspektasi Ekonomi (IEK) pada triwulan laporan memiliki nilai sebesar 116,10, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 119,71 (Grafik 1.24).

**Grafik 1.24.** Perkembangan Survei Konsumen



Sumber: Survei Bank Indonesia, diolah

## Lapangan Usaha Konstruksi

**Kinerja LU Konstruksi pada triwulan II 2024 meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya seiring akselerasi penyelesaian berbagai proyek infrastruktur.** Pada triwulan II 2024, LU Konstruksi mengalami akselerasi dengan tumbuh sebesar 8,54% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 4,87% (yoy) (Grafik 1.25). Meningkatnya kinerja LU Konstruksi sejalan dengan percepatan pembangunan PSN serta infrastruktur PON 2024 yang ditargetkan selesai sebelum September 2024.

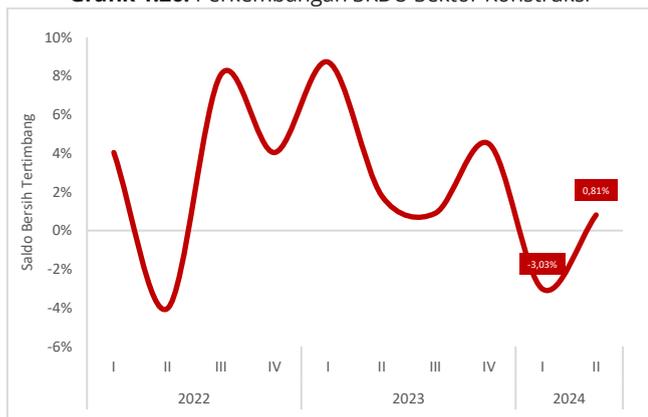
**Grafik 1.25.** Pertumbuhan Lapangan Usaha Konstruksi



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

**Peningkatan kinerja LU Konstruksi tercermin dari meningkatnya hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) untuk Sektor Konstruksi.** Pada triwulan laporan, nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) Sektor Konstruksi di Aceh mencapai sebesar 0,81%, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar -3,03% (Grafik 1.26).

**Grafik 1.26.** Perkembangan SKDU Sektor Konstruksi



Sumber: Survei Bank Indonesia, diolah

## Lapangan Usaha Pertambangan

**Kinerja LU Pertambangan pada triwulan II 2024 meningkat sejalan dengan perbaikan harga komoditas batubara.** Pada triwulan II 2024, LU Pertambangan mengalami akselerasi dengan tumbuh sebesar 17,24% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 4,67% (yoy) (Grafik 1.27). Pada triwulan II 2024, nilai PDRB LU Pertambangan sebesar Rp3,01 triliun, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar Rp2,58 triliun. Meningkatnya kinerja LU Pertambangan sejalan dengan pemulihan harga batubara dunia yang naik menjadi 76,76 USD/metric ton, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 75,55 USD/metric ton.

**Grafik 1.27.** Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertambangan



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

**Akselerasi pertumbuhan LU Pertambangan juga tercermin dari membaiknya pertumbuhan ekspor Batubara.** Meskipun masih mengalami kontraksi, nilai ekspor batubara pada triwulan laporan tercatat tumbuh sebesar -0,92% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar -

45,17% (yoy) (Grafik 1.13). Selain itu, hasil SKDU yang dilakukan Bank Indonesia untuk sektor pertambangan di Aceh menunjukkan adanya peningkatan dari 2,45% SBT (Saldo Bersih Tertimbang) pada triwulan I 2024 menjadi 3,18% SBT pada triwulan II 2024.

**Namun demikian, peningkatan permintaan ekspor belum mendorong perusahaan pertambangan untuk melakukan investasi.** Hal ini tercermin dari perkembangan sisi pembiayaan sektor ini yang masih berada dalam tren penurunan. Pada triwulan laporan, posisi pembiayaan mencapai Rp1,16 triliun masih mengalami penurunan sebesar -52,97% (yoy) (Grafik 1.28).

**Grafik 1.28.** Penyaluran Pembiayaan Sektor Pertambangan



Sumber: Survei Bank Indonesia, diolah

## Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan

**Kinerja LU Transportasi dan Pergudangan pada triwulan II 2024 meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya, didorong oleh momen HBKN.** Pada triwulan II 2024, LU Transportasi dan Pergudangan mengalami akselerasi dengan tumbuh sebesar 15,69% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 10,65% (yoy) (Grafik 1.29). Meningkatnya kinerja LU Transportasi dan Pergudangan sejalan dengan peningkatan mobilitas di tengah momen HBKN Idul Fitri dan Idul Adha pada triwulan laporan.

**Grafik 1.29.** Pertumbuhan Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

**Grafik 1.31.** Penyaluran Pembiayaan Sektor Transportasi dan Pergudangan



Sumber: Laporan Bank Umum, lokasi proyek, diolah

**Momen HBKN mendorong peningkatan jumlah penumpang kapal selama triwulan laporan.** Pada triwulan II 2024, jumlah penumpang kapal (berangkat dan datang) di Pelabuhan Ulee Lheue mencapai 256,56 ribu orang atau tumbuh sebesar 22,22% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,45% (yoy) (Grafik 1.30).

**Grafik 1.30.** Perkembangan Penumpang Kapal di Pelabuhan Ulee Lheue



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

**Membaiknya penyaluran pembiayaan perbankan menjadi penopang pertumbuhan LU Transportasi dan Pergudangan.** Pada triwulan laporan, posisi pembiayaan perbankan kepada sektor transportasi dan pergudangan mencapai Rp383,94 miliar atau tumbuh sebesar 28,99% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang sebesar 26,89% (yoy) (Grafik 1.31).

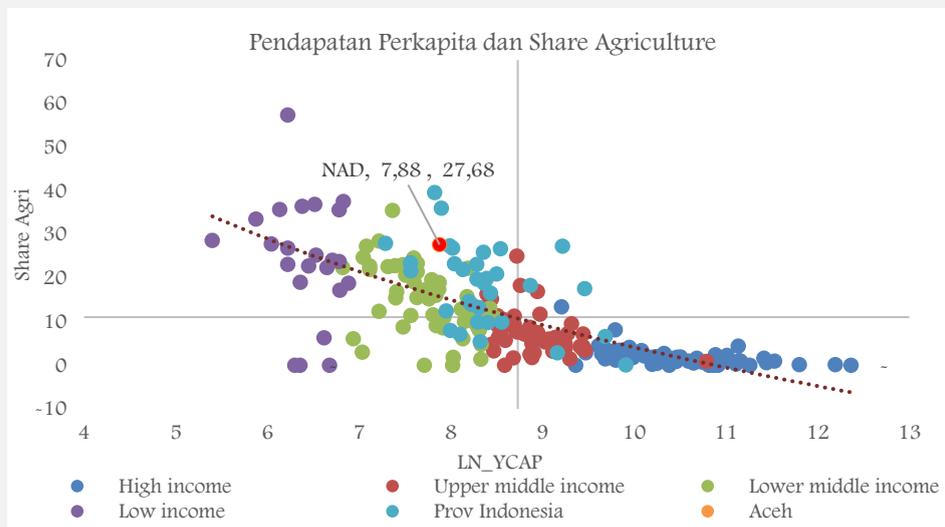
## MEMANTAU POTENSI PERTUMBUHAN EKONOMI ACEH MENGGUNAKAN MODEL INDOTERM ACEH

Aspirasi Indonesia untuk keluar dari *Middle Income Trap* (MIT) dan menjadi negara berpenghasilan tinggi sebelum 100 tahun kemerdekaan terhambat karena defisit pertumbuhan ekonomi. Indonesia memerlukan pertumbuhan ekonomi 6-7% per tahun tetapi tumbuh hanya sekitar 5% per tahun, bahkan karena krisis COVID pertumbuhan ekonomi Indonesia selama periode 2010-2022 berada di angka 4,4 persen.

Saat ini Aceh, dari angka PDRB per kapitanya masih masuk ke kategori *lower middle income*, ketika Indonesia secara nasional sudah mencapai posisi *upper middle income*. Selain itu, prospek Aceh untuk keluar dari MIT lebih menghadapi kendala karena pertumbuhan ekonominya hampir selalu lebih kecil daripada pertumbuhan ekonomi nasional dengan kisaran sekitar 4%-an per tahun.

Dalam literatur ekonomi pembangunan jalan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi umumnya dilakukan melalui transformasi struktural yaitu perubahan struktur ekonomi dari sektor yang produktivitasnya rendah seperti pertanian menjadi non-pertanian misalnya industri. Proses ini mendorong pertumbuhan ekonomi. Ini yang dilakukan di berbagai negara berkembang dan juga Indonesia, dimana prosesnya mencapai klimaks di era 1980-an dan 1990-an. Ada banyak kisah sukses dari jalan yang diambil ini baik oleh Indonesia maupun negara-negara lain seperti Taiwan, Malaysia, Korea Selatan (yang dikenal dengan Asian Tiger).

Menariknya, struktur ekonomi Aceh saat ini hampir mirip dengan Indonesia di era 1980-an dengan dominasi sektor agraris yang cukup dominan. Pertanyaan kunci yang muncul adalah apakah Aceh mempunyai prospek untuk melakukan akselerasi pertumbuhan ekonomi dengan cara yang sama dengan Indonesia di 1980-an melalui industrialisasi berbasis ekspor agar dapat mengenyam manfaat dari transformasi struktural? Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sama yang ditanyakan oleh banyak negara-negara berpendapatan rendah lainnya di dunia ini, dan jawabannya saat ini sangat tidak pasti.



Sumber : WDI dan BPS, diolah

**Gambar 1** Hubungan antara PDB per capita dan Share Sektor Pertanian

Era industrialisasi negara-negara *Asian Tiger* terjadi pada posisi historis yang sangat mungkin unik. Salah satunya adalah terjadi ketika raksasa ekonomi China belum melakukan liberalisasi ekonomi. Ketika China melakukan liberalisasi ekonomi di tahun 1990an dan menjadi anggota WTO di tahun 2001, praktis produk-produk *manufaktur* China membanjiri pasar global dan mengurangi potensi negara-negara berpendapatan rendah lain untuk melakukan industrialisasi berbasis ekspor. Selain itu fenomena automasi, *re-shoring* (kembaliannya manufaktur ke negara maju karena sifat manufaktur yang *consumer-oriented*) membuat era 2000-an menjadi era stagnasi industrialisasi untuk banyak negara berkembang. Banyak negara-negara berkembang bahkan

mengalami deindustrialisasi prematur. Prospek industrialisasi sebagai akselerator growth menjadi tidak pasti. Indonesia sendiri mengalami stagnasi industrialisasi terutama di sektor manufakturnya di tahun 2000-an. Aceh bahkan mengalami penurunan *share* sektor manufaktur cukup signifikan dalam periode yang sama.

Latar belakang seperti membuat kita harus memikirkan strategi akselerasi pertumbuhan ekonomi Aceh yang konsisten dengan tantangan baru ini. Identifikasi strategi alternatif akselerasi pertumbuhan ekonomi Aceh ini mengambil kerangka konseptual yang diperkenalkan oleh Joseph Stiglitz (Pakar ekonomi peraih Nobel dari Columbia University, Amerika), yang ditulisnya pada tahun 2018. Strategi ini disebut dengan *Multi-Pronged*. Strategi ini menyarankan negara-negara yang mempunyai aspirasi mengakselerasi pertumbuhan ekonomi untuk tidak terlalu mengandalkan sektor manufaktur saja, bahkan berharap bahwa mereka akan mendapat *the Asian Miracle* tahun 1990-an karena zaman sudah berubah. Strategi multi-pronged mendorong akselerasi dilakukan untuk semua sektor yang relevan dan dengan tetap mengandalkan keunggulan komparatif yang dimiliki oleh negara-negara tersebut. Sektor manufaktur tetap memainkan perannya tetapi juga memanfaatkan keunggulan komparatif dari sektor lain misalnya pertanian atau kalau perlu SDA. Melakukan modernisasi sektor pertanian dan melakukan transformasi pertanian yang baik yaitu optimalisasi *on-farm* (hulu) juga *off-farm* (hilir). Lalu terakhir melakukan *skill-upgrading* untuk mendukung sektor jasa menjadi lebih produktif dan lebih memberikan keadilan ekonomi.

Mengadopsi kerangka konseptual itu dibuatlah analisis identifikasi apa yang harus dilakukan sebagai strategi akselerator pertumbuhan ekonomi Aceh. Beberapa pertimbangan berikut menjadi basis untuk identifikasi. Pertama, ekonomi Aceh masih sangat agraris dibandingkan dengan propinsi lain di Indonesia. Dalam konteks transformasi ekonomi yang *industry-driven* ini merupakan *disadvantage*, tetapi dalam konteks global sekarang dan dalam strategi *multi-pronged* ini malah merupakan *advantage* karena bersifat keunggulan komparatif. Dengan pendapatan perkapita saat ini seharusnya *share* dari pertanian dalam PDRB Aceh sudah jauh lebih kecil, sehingga Aceh dapat dikatakan mengalami kelambatan dalam transformasi struktural. Besarnya ukuran dari sektor pertanian Aceh malah bisa digunakan sebagai faktor kunci dari akselerasi pertumbuhan jika ditopang dengan strategi yang tepat. Kedua, Aceh masih mempunyai ruang yang banyak untuk meningkatkan kualitas SDM nya melalui pendidikan dan *skill-upgrading*. Jika ini dapat dilakukan dengan progresif dan diarahkan untuk mengembangkan sektor-sektor jasa modern maka Aceh bisa mengalami tersierisasi yang produktif.

Dari analisis itu diidentifikasi tiga strategi utama yaitu (a) Strategi transformasi pertanian strategis; (b) strategi revitalisasi sumber daya alam; dan (c) strategi peningkatan SDM penopang tersierisasi.

Dalam strategi transformasi sektor pertanian strategis akselerasi pertumbuhan ekonomi ini, dilakukan melalui upaya-upaya ekstra peningkatan produktivitas sektor pertanian pada berbagai produk pertanian. Peningkatan produktivitas ini dilakukan melalui mekanisasi, penguatan teknologi juga peningkatan kualitas SDM di sektor pertanian. Secara natural penguatan produktivitas berbagai sektor-sektor pertanian ini juga akan mendorong industrialisasi di sektor manufaktur pengolah produk pertanian, sehingga sesuai dengan karakteristik strategi *Multi-Pronged* ala Stiglitz.

Strategi revitalisasi sumber daya alam juga dirumuskan karena bagaimanapun juga Aceh adalah daerah yang kaya dengan SDA terutama minyak dan gas bumi, dan baru-baru ini ditemukan cadangan Migas baru yang cukup berlimpah. Potensi akselerasi pertumbuhan ekonomi Aceh ke depan sebagai dampak dari potensi-potensi cadangan SDA baru ini juga perlu untuk diidentifikasi.

Sementara itu strategi peningkatan kualitas SDM penopang tersierisasi dilakukan melalui upaya tambahan untuk meningkatkan akses ke sekolah menengah atas serta pendidikan tinggi agar Aceh sangat berpotensi untuk bisa mengejar pencapaian pendidikan di propinsi-propinsi yang lebih maju seperti Jakarta yang sudah mencapai 11,45 tahun misalnya. Penting juga untuk diutamakan peningkatan akses ke pendidikan tinggi karena tenaga kerja lulusan perguruan tinggi ternyata hampir semuanya bekerja di sektor jasa. Dengan strategi peningkatan kualitas pendidikan yang tepat ini akan berdampak pada peningkatan produktivitas tenaga kerja di sektor jasa yang saat ini relatif kurang produktif sehingga bisa tersierisasi yang terjadi bisa menjadi pengganti industrialisasi

sebagai mesin pertumbuhan ekonomi Aceh ke depan.

	2022-2027	Δ	2022-2032	Δ	2022-2037	Δ	2022-2040	Δ
Baseline	3.96	0.00	3.97	0.00	3.98		3.99	0.00
<b>A - Transformasi Pertanian dan Hilirisasi Strategis</b>								
A1-Padi Kenaikan produktivitas 1% pa)	3.99	0.03	4.01	0.04	4.02	0.04	4.02	0.03
A2-Tanaman pangan non-padi	3.96	0.01	3.98	0.01	3.99	0.01	3.99	0.01
A3-Kelapa sawit	3.99	0.03	4.01	0.04	4.03	0.04	4.03	0.05
A4-Kopi	3.98	0.02	4.00	0.02	4.01	0.02	4.01	0.02
A5-Semua produk pertanian	4.16	0.20	4.24	0.27	4.24	0.26	4.25	0.26
A6-Peningkatan kapasitas manufaktur pertanian	3.98	0.02	4.03	0.05	4.07	0.09	4.10	0.11
A7-Kombinasi A5 dan A6	4.18	0.22	4.30	0.33	4.36	0.38	4.55	0.56
<b>B - Cadangan baru gas alam</b>								
B-Kenaikan kapasitas produksi 2 kali lipat	3.96	0.00	4.15	0.18	4.11	0.12	4.09	0.11
<b>C - Peningkatan SDM untuk tersierisasi (3% pa)</b>								
C1-Peningkatan produktivitas SDM sektor jasa	4.16	0.20	4.20	0.22	4.15	0.17	4.14	0.15
C2-C1 dan preferensi konsumen ke sektor jasa	4.23	0.27	4.43	0.45	4.50	0.52	4.52	0.54
<b>Gabungan Skenario</b>								
A7+B1	4.18	0.22	4.48	0.51	4.49	0.50	4.65	0.67
A7+C2	4.45	0.49	4.76	0.78	4.88	0.90	5.09	1.10
A7+B1+C2	4.45	0.49	4.94	0.96	5.00	1.02	5.19	1.20

Sumber : Bank Indonesia

**Gambar 2** Simulasi dan Dampak Model IndoTERM

Simulasi dengan model IndoTERM Aceh dilakukan dalam tiga simulasi utama yaitu Simulasi A dimana dalam skenario ini beberapa sektor pertanian utama mengalami tambahan peningkatan produktivitas, dalam hal ini *all-factors-productivity*, sebesar 1% pertahun yang bisa diupayakan melalui mekanisasi alat-alat pertanian, adopsi perkembangan teknologi baru, riset terutama yang didukung oleh negara untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian, pelatihan-pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja di sektor pertanian. Diharapkan skenario ini mendorong adanya hilirisasi di sektor manufaktur. Simulasi tambahan dilakukan melalui investasi ekstra (tambahan 10% per tahun) untuk meningkatkan kapasitas produksi sektor pengolahan produk pertanian. Simulasi B dilakukan melalui peningkatan kapasitas produksi hulu gas alam sebesar dua kali lipat pada tahun 2028.

Dalam konteks mengeksplorasi potensi penguatan tersierisasi di Aceh dilakukan dua simulasi yaitu (a) Simulasi penguatan produktivitas tenaga kerja di sektor-sektor jasa utama modern. Penguatan produktivitas ini dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti meningkatkan akses dan kualitas pendidikan terutama pendidikan tinggi dimana potensial Aceh masih banyak ruang untuk diupayakan. Tambahan produktivitas tenaga kerja di sektor jasa disimulasikan 2 kali lebih cepat (tambahan 3% per tahun) daripada skenario baseline standar model IndoTERM nasional. Sebagai tambahan karena sifat sektor jasa yang non-tradable juga disimulasikan pergeseran pola konsumsi masyarakat Aceh agar semakin berorientasi ke sektor jasa modern sebesar juga 3% per tahun.

Hasil dari simulasi menunjukkan bahwa skenario-skenario yang diformulasikan, jika dilakukan secara bersama-sama cukup mampu untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Aceh secara signifikan. Pertumbuhan ekonomi Aceh ke depan, dalam skenario BAU, diperkirakan hanya akan berada di seputaran 4%, 1% dibawah pertumbuhan ekonomi nasional (5%). Skenario transformasi pertanian dan hilirisasi strategis yang dikombinasikan dengan peningkatan produktivitas tenaga kerja sektor jasa modern (melalui skill upgrading) dan juga dengan pergeseran pola konsumsi masyarakat ke arah sektor jasa (tersierisasi) mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi Aceh dalam jangka panjang (2022-2040) dari 3,99% menjadi 5,19%, melampaui proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional.

--000--



## **BAB II**

### **PERKEMBANGAN KEUANGAN DAERAH**

Realisasi agregat belanja dan pendapatan pemerintah di Provinsi Aceh sampai dengan triwulan II 2024 membaik dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini didorong oleh membaiknya realisasi Belanja dan Pendapatan Negara maupun realisasi Belanja dan Pendapatan Daerah pada periode triwulan pelaporan. Komponen realisasi Belanja yang memiliki pertumbuhan tertinggi terdapat di Belanja Transfer sebesar 43,61%. Hal tersebut sejalan dengan peningkatan realisasi Pendapatan Transfer yang meningkat paling tinggi dibanding komponen lainnya sebesar 49,42%.

## 2.1. Gambaran umum

**Realisasi agregat belanja pemerintah di Provinsi Aceh sampai dengan triwulan II 2024 membaik dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya.** Secara nominal, agregat Belanja Pemerintah (APBN + APBD) mencapai Rp37,39 triliun atau 41,40% dari pagu agregat belanja tahun 2024, meningkat dari triwulan II 2023 yang hanya 35,56%. Peningkatan tersebut disebabkan oleh realisasi APBN yang semakin baik dari 43,11% di triwulan II 2023, menjadi 47,22% di triwulan II 2024 atau meningkat sebesar Rp3,13 triliun. Peningkatan juga didukung oleh realisasi APBD yang semakin baik dari 26,52% di triwulan II 2023, menjadi 34,29% di triwulan II 2024 atau meningkat sebesar Rp3,50 triliun.

**Di sisi lain, realisasi agregat Pendapatan Pemerintahan juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya.** Secara nominal, realisasi pendapatan APBN dan APBD pada triwulan II 2024 mencapai Rp19,20 triliun, meningkat dibandingkan realisasi triwulan II 2023 yang sebesar Rp14,21 triliun. Secara persentase, pendapatan APBN dan APBD mencapai 41,23% lebih tinggi dari periode di tahun sebelumnya yang sebesar 32,16%. Dari sisi porsi, Pendapatan Transfer ke Daerah memiliki kontribusi terbesar (71,71%) dari total realisasi pendapatan APBA dengan realisasi 41,73% dari pagu triwulan II tahun 2024.

## 2.2. Perkembangan Kinerja Keuangan Daerah

**Nilai pagu Belanja Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) di Aceh mengalami peningkatan.** Pada tahun 2024, nilai agregat pagu Belanja Pemerintah Daerah mencapai Rp40,65 triliun, meningkat sebesar 3,28% (yoy). Secara umum, pagu APBD di Provinsi dan juga kabupaten/kota mengalami peningkatan utamanya pada belanja operasi sebesar Rp2,2 triliun.

Tabel 2. 1. Realisasi Belanja APBD Triwulan II 2024

REALISASI BELANJA PEMERINTAH DAERAH	
TRIWULAN II 2024	
 Belanja Operasi	36,24%
Belanja Modal	12,89%
Belanja Tidak terduga	15,50%
Belanja Transfer	38,13%

Sumber: DJPb Provinsi Aceh, diolah

**Realisasi Belanja Pemerintah Daerah hingga triwulan II 2024 mencapai Rp13,94 triliun atau 34,29% dari total pagu belanja.** Persentase realisasi Belanja Pemerintah Daerah ini lebih tinggi dibandingkan realisasi belanja di triwulan II 2023 yang tercatat sebesar 26,52% dari pagu belanja 2023. Hal ini juga lebih tinggi secara nominal dibandingkan triwulan II 2023 yang sebesar Rp10,44 triliun.

**Realisasi belanja Pemerintah Daerah di triwulan II 2024 ditopang oleh belanja operasi.** Pada periode laporan, realisasi belanja operasi mencapai Rp10,29 triliun atau sebesar 36,24% terhadap pagu. Realisasi tersebut meningkat dibandingkan triwulan II 2023 yang sebesar Rp7,78 triliun atau 29,71% dari total pagu. Selain Belanja Operasi, realisasi Belanja Modal juga turut mengalami peningkatan realisasi dengan capaian sebesar Rp510,13 miliar pada triwulan II 2024 atau lebih tinggi dibanding periode sebelumnya yang dapat terealisasi sebesar Rp468,53 miliar.

Selanjutnya, Belanja Tidak Terduga terealisasi sebesar Rp18,23 miliar dengan persentase 15,50% dari total pagu anggaran yang sebesar Rp117,60 miliar. Angka tersebut menurun jika dibandingkan periode yang sama di tahun lalu yang dapat terealisasi sebesar Rp19,54 miliar atau terealisasi sebesar 3,07% dari total pagu anggaran sebesar Rp636,91 miliar.

**Tabel 2. 2. Realisasi Belanja Transfer Antar Daerah dan Dana Desa Triwulan II 2024**

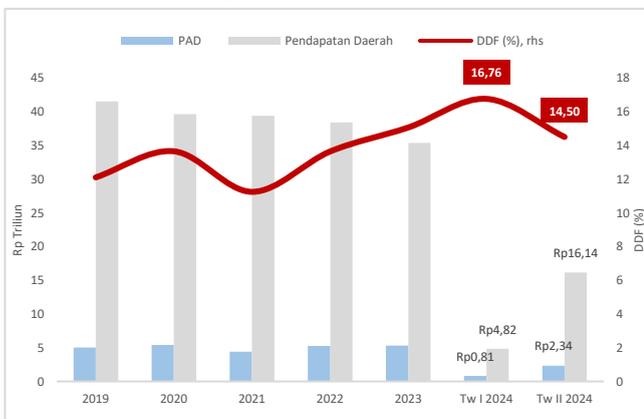
REALISASI BELANJA TRANSFER TRIWULAN II 2024		
	Belanja Bantuan Keuangan	37,10%
	Belanja Bagi Hasil	45,50%

Sumber: DJPb Provinsi Aceh, diolah

**Realisasi belanja transfer mengalami peningkatan di triwulan II 2024 jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu.**

Belanja Transfer pada periode laporan mencapai Rp3,12 triliun atau 38,13% dari pagu anggaran. Realisasi tersebut membuat pertumbuhan belanja transfer sebesar 43,61% (yoy). Komponen Belanja Transfer, yakni Belanja Bantuan Keuangan mengalami peningkatan. Realisasi Belanja Bantuan Keuangan mencapai Rp2,66 triliun atau meningkat sebesar 56,87% (yoy) dibandingkan triwulan II 2023 yang mencapai Rp1,70 triliun. Sementara itu, Belanja Bagi Hasil mengalami penurunan menjadi sebesar Rp456,39 milyar atau turun -3,79% (yoy) dari triwulan II 2023 yang mencapai Rp474,37 miliar.

**Grafik 2. 1.** Perkembangan Derajat Desentralisasi Fiskal Keuangan Daerah Provinsi Aceh



Sumber: DJPb Provinsi Aceh, diolah

**Realisasi Pendapatan Daerah secara nominal dan persentase pada triwulan II 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan triwulan II 2023.** Realisasi pendapatan APBA dan APBK/D pada triwulan II 2024 sebesar Rp16,14 triliun atau 40,90% dari pagu Pendapatan Daerah 2024, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan II 2023 yang hanya terealisasi sebesar Rp11,11 triliun atau 29,72% dari pagu pendapatan 2023. Realisasi tersebut meningkat 11,18 basis poin dari periode

yang sama tahun sebelumnya. Berdasarkan porsi komponen Pendapatan Daerah, mayoritas berasal dari Pendapatan Transfer yang menyumbang 85,30% dari total realisasi pendapatan. Angka ini meningkat dibanding periode sebelumnya yang hanya sebesar 82,74%. Sementara komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi sebesar Rp2,34 triliun pada triwulan II 2024 dengan kontribusi sebesar 14,52% dari total realisasi pendapatan APBA. Hal ini menandakan bahwa ketergantungan Pemerintah Daerah di Aceh terhadap Transfer Pemerintah Pusat masih tinggi. Selain itu, Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) menunjukkan perbaikan pada periode 2019 s.d 2024 (Grafik 2.1.) meski di triwulan II 2024 mengalami penurunan.

**Tabel 2. 3. Realisasi Pendapatan APBD se-Provinsi Aceh Triwulan II 2024**

REALISASI PENDAPATAN APBD TRIWULAN II 2024	
	Pendapatan Asli Daerah <b>38,72%</b>
	Pendapatan Transfer <b>41,73%</b>
	Lain-Lain <b>7,29%</b>

Sumber: DJPb Provinsi Aceh, diolah

**Pada triwulan II 2024, hanya pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah yang mengalami penurunan.** Realisasi komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer tumbuh positif pada periode berjalan. PAD tumbuh sebesar 27,34% (yoy) atau meningkat dari Rp1,84 triliun miliar di triwulan II 2023 menjadi Rp2,34 triliun miliar di triwulan II 2024, sedangkan Pendapatan lain-lain yang Sah turun (-46,64%) dari Rp56,99 miliar menjadi Rp30,41 miliar. Di sisi lain, pendapatan transfer pada triwulan II 2024 tumbuh sebesar 49,42% (yoy), yaitu dari Rp9,21 triliun meningkat menjadi hanya Rp13,77 triliun.

## 2.3. Belanja dan Pendapatan Pemerintah Pusat

**Secara nominal, realisasi belanja menurun dan pendapatan APBN meningkat di Aceh.** Belanja APBN di Provinsi Aceh pada periode laporan secara persentase mencatatkan realisasi sebesar Rp23,4 triliun (47,22% dari pagu anggaran) meningkat dibanding triwulan II 2023 yang sebesar Rp20,32 triliun (15,38% dari pagu anggaran). Di sisi lain, realisasi pendapatan APBN mencapai Rp3,06 triliun, menurun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp3,09 triliun.

**Tabel 2. 4. Realisasi Belanja APBN di Provinsi Aceh Pada Triwulan II 2024**

REALISASI BELANJA APBN TRIWULAN II 2024		
	Belanja Pusat	46,10%
	Transfer	47,86%

Sumber: DJPb Provinsi Aceh, diolah

**Belanja Pusat mengalami peningkatan sebesar 14,47% dari Rp7,32 triliun menjadi Rp8,38 triliun.** Komponen Belanja Pusat masih paling besar terdapat di Belanja Pegawai dengan proporsi sebesar 50,84%. Nilai Belanja Pegawai di tahun triwulan II 2024 sebesar Rp4,25 triliun lebih tinggi dibanding tahun 2023 di periode yang sama tahun lalu yang hanya sebesar Rp3,65 triliun atau naik 16,44%. Peningkatan juga diikuti oleh Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bantuan Sosial masing-masing tumbuh sebesar 12,03%; 12,34%; dan 24,52%.

**Belanja Transfer mengalami peningkatan secara persentase realisasi terhadap pagu maupun secara nominal realisasi.** Secara persentase, pada periode laporan realisasi tercatat sebesar 47,86% dari pagu Transfer ke Daerah 2024 (secara nominal Rp15,06 triliun) dan tumbuh sebesar 15,90% (yoy) dibandingkan periode yang sama di tahun lalu yang terealisasi 43,70% dari pagu Transfer ke Daerah 2023 (secara nominal Rp13,00 triliun). Apabila dilihat per komponen, hanya Dana Transfer Khusus yang mengalami penurunan realisasi di triwulan II 2024, sedangkan komponen lainnya, yaitu Dana Transfer Umum, Dana Otsus, DIY, dan DID serta Dana Desa

mengalami peningkatan realisasi. Dana Transfer Umum merupakan komponen yang memiliki pertumbuhan paling besar dari Rp7,26 triliun menjadi Rp8,80 triliun atau tumbuh sebesar 21,17%. Selanjutnya, Dana Desa meningkat sebesar 19,25% dari Rp2,50 triliun menjadi Rp2,97 triliun. Dana Otsus, DIY, dan DID meningkat dari Rp1,22 triliun menjadi Rp1,30 triliun sehingga mampu tumbuh sebesar 6,38%. Kemudian, penurunan realisasi Dana Transfer Khusus terhitung sebesar 1,4%,.

**Tabel 2. 5. Realisasi Pendapatan APBN di Provinsi Aceh Pada Triwulan II 2024**

REALISASI PENDAPATAN APBN TRIWULAN II 2024		
	Pajak	38,09%
	PNBP	87,20%

Sumber: DJPb Provinsi Aceh, diolah

**Penerimaan Pajak secara nominal mengalami penurunan.** Secara nominal, Penerimaan Pajak pada triwulan II 2024 mengalami penurunan sebesar -3,52% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan terjadi utamanya pada komponen Pajak Dalam Negeri yang turun 6,88% (secara nominal turun dari Rp2,47 miliar menjadi Rp2,30 miliar, meskipun Pajak Perdagangan Internasional meningkat sebesar 251% (secara nominal naik dari Rp52,63 miliar dari triwulan II 2023 menjadi Rp132,62 miliar triwulan II 2024).

**Tabel 2. 6.** Data Realisasi APBD Provinsi Aceh Triwulan II 2024

APBD PROVINSI ACEH	Pagu Anggaran Tahunan (Rp Miliar)		Realisasi Triwulan II (Rp Miliar)		Persentase Realisasi Triwulan II (%)		Pertumbuhan Realisasi Triwulan II 2023-2024
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	
<b>PENDAPATAN</b>	37.393,70	39.467,73	11.112,52	16.143,01	29,72	40,90	45,27%
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	5.481,66	6.051,31	1.840,11	2.343,24	33,57	38,72	27,34%
Pendapatan Transfer	31.461,03	32.999,30	9.215,42	13.769,37	29,29	41,73	49,42%
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	451,01	417,12	56,99	30,41	12,64	7,29	-46,64%
<b>BELANJA DAERAH</b>	39.360,92	40.652,77	10.436,69	13.939,21	26,52	34,29	33,56%
Belanja Operasi	26.181,19	28.404,58	7.778,67	10.294,59	29,71	36,24	32,34%
Belanja Modal	4.507,43	3.958,59	468,53	510,13	10,39	12,89	8,88%
Belanja Tidak Terduga	636,91	117,60	19,54	18,23	3,07	15,50	-6,70%
Transfer	8.035,39	8.172,00	2.169,95	3.116,26	27,00	38,13	43,61%
<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	- 1.967,22	- 1.185,04	675,83	2.203,81	34,35	185,97	226,09%

Sumber: DJPB, Kajian Fiskal Regional Agustus 2024

**Tabel 2. 7.** Data Realisasi APBN di Provinsi Aceh Triwulan II 2024

BELANJA NEGARA (APBN) DI PROVINSI ACEH	Pagu Anggaran Tahunan (Rp Miliar)		Realisasi Triwulan II (Rp Miliar)		Persentase Realisasi Triwulan II (%)		Pertumbuhan Realisasi Triwulan II 2023-2024
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	
<b>PENDAPATAN</b>	6.780,25	7.112,47	3.092,53	3.059,72	45,61	43,02	-1,06%
Pajak	6.031,53	6.390,79	2.523,23	2.434,41	41,83	38,09	-3,52%
PNBP	748,72	721,68	569,30	625,31	76,04	86,65	9,84%
<b>BELANJA</b>	47.131,98	49.656,96	20.320,34	23.446,48	43,11	47,22	15,38%
Belanja Pusat	17.386,42	18.176,46	7.320,06	8.379,44	42,10	46,10	14,47%
Transfer ke Daerah	29.745,56	31.480,50	13.000,28	15.067,04	43,70	47,86	15,90%
<b>SURPLUS/DEFISIT APBN</b>	-40.351,73	-42.544,49	-17.227,81	-20.386,76	42,69	47,92	18,34%

Sumber: DJPB, Kajian Fiskal Regional Agustus 2024



### BAB III

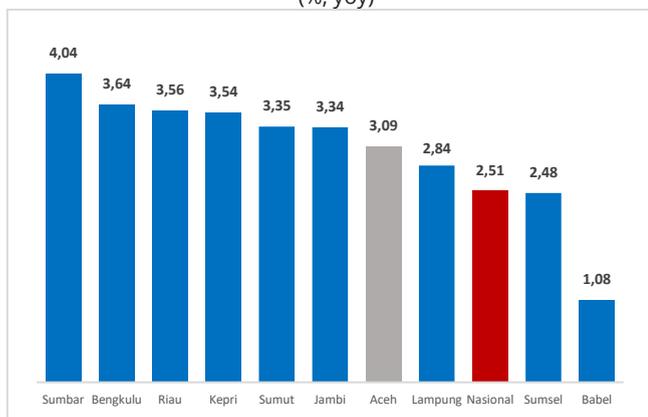
## PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH

Inflasi Provinsi Aceh pada triwulan II 2024 tercatat meningkat 3,09% (yoy), namun lebih rendah dibandingkan capaian inflasi pada triwulan sebelumnya 3,25% (yoy). Lebih rendahnya capaian inflasi Provinsi Aceh pada triwulan II 2024, dipengaruhi oleh penurunan inflasi pada kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau. Namun demikian, penurunan tekanan inflasi lebih dalam tertahan oleh peningkatan permintaan sejalan dengan berlangsungnya momen HBKN Iduladha (diperingati selama empat hari 17 – 20 Juni 2024), penyaluran gaji ke-13 dan tunjangan *meugang* (tunjangan khusus di Provinsi Aceh untuk Iduladha), dan periode tahun ajaran baru (SD s.d. SMA).

### 3.1. Perkembangan Umum Inflasi

**Inflasi Provinsi Aceh pada triwulan II 2024 tercatat lebih rendah dari triwulan sebelumnya.** Inflasi Provinsi Aceh pada triwulan II 2024 tercatat sebesar 3,09% (yoy) lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 3,25% (yoy). Hal ini terutama dipengaruhi oleh penurunan tekanan inflasi pada Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau yang tercatat sebesar 6,19% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya 7,07% (yoy). Namun demikian, penurunan tekanan inflasi lebih dalam tertahan oleh peningkatan permintaan sejalan dengan berlangsungnya momen HBKN Iduladha (diperingati selama empat hari 17 – 20 Juni 2024), penyaluran gaji ke-13 dan tunjangan *meugang* (tunjangan khusus di Provinsi Aceh untuk Iduladha), dan periode tahun ajaran baru (SD s.d. SMA). Lebih lanjut, capaian tersebut masih lebih tinggi dibandingkan capaian inflasi Nasional (2,51%; yoy). Namun demikian, inflasi Provinsi Aceh pada triwulan II 2024 merupakan inflasi terendah keempat di Sumatera setelah Provinsi Bangka Belitung (1,08%; yoy), Provinsi Sumatera Selatan (2,48%; yoy), dan Provinsi Lampung (2,84%; yoy). Masih terkendalanya inflasi pada rentang sasaran target inflasi tahun 2024 (2,5%±1%), tidak terlepas dari upaya yang dilakukan TPID se-Provinsi Aceh. Sinergi dan kolaborasi intens dalam rangka pengendalian inflasi melalui strategi 4K (ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, dan komunikasi efektif).

**Grafik 3.1.** Laju Inflasi Provinsi di Sumatera Triwulan II 2024 (% yoy)



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

### 3.2. Analisis Perkembangan Inflasi

**Inflasi Provinsi Aceh pada triwulan II 2024 masih terjaga pada kisaran sasaran inflasi nasional.** Realisasi inflasi Provinsi Aceh pada triwulan II 2024 tercatat sebesar 3,09% (yoy) lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya 3,25% (yoy). Penurunan tekanan inflasi tersebut dipengaruhi oleh penurunan tekanan inflasi pada kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau seiring penurunan tekanan inflasi pada komoditas pangan strategis seperti beras dengan andil 0,74% lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya (andil 0,84%). Di samping itu, penurunan tekanan inflasi pada periode laporan turut dipengaruhi oleh terjadinya deflasi pada beberapa komoditas pangan diantaranya aneka ikan (tongkol, dencis, dan bandeng), udang basah, dan daging ayam ras. Namun demikian, penurunan tekanan inflasi lebih dalam tertahan oleh peningkatan tekanan inflasi pada kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran yang tercatat sebesar 2,90% (yoy) lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya 2,41% (yoy). Di samping itu, tekanan inflasi pada kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya juga meningkat. Kelompok tersebut tercatat mengalami inflasi sebesar 4,41% (yoy) lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya 2,61% (yoy).

**Tabel 3.1.** Inflasi Kelompok Barang dan Jasa

Kelompok Barang dan Jasa	Tw I 2024		Tw II 2024	
	Inflasi (% yoy)	Andil (% yoy)	Inflasi (% yoy)	Andil (% yoy)
Makanan, Minuman, dan Tembakau	7,07	2,57	6,19	2,25
Pakaian dan Alas Kaki	2,73	0,16	1,62	0,10
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	-0,53	-0,09	-0,52	-0,09
Perlengkapan, Peralatan, & Pemeliharaan Rutin RT	1,14	0,04	1,71	0,07
Kesehatan	2,26	0,04	2,59	0,05
Transportasi	0,60	0,06	1,11	0,12
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	-0,20	-0,01	-0,44	-0,03
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	4,21	0,05	3,14	0,04
Pendidikan	0,68	0,03	0,66	0,03
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	2,41	0,26	2,90	0,31
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	2,61	0,14	4,41	0,24
<b>Inflasi Umum</b>	<b>3,25</b>		<b>3,09</b>	

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

## Kel. Makanan, Minuman, dan Tembakau

**Tabel 3.2.** Inflasi Kel, Makanan, Minuman, dan Tembakau

INFLASI 6,19% (yoy)		ANDIL 2,25%	
PENYUMBANG INFLASI		PENYUMBANG DEFLASI	
KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)
Beras	0,74	Ikan Tongkol	0,36
Cabai Merah	0,70	Ikan Dencis	0,19
Bawang Merah	0,45	Udang Basah	0,12
Sigaret Kretek Mesin	0,33	Daging Ayam Ras	0,10
Tomat	0,16	Ikan Bandeng	0,07

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

**Tekanan inflasi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami penurunan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.** Secara tahunan, kelompok makanan, minuman, dan tembakau pada periode laporan mengalami inflasi sebesar 6,19% (yoy) dengan andil 2,25%, lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya 7,07% (yoy) dengan andil 2,57%. Penurunan inflasi pada kelompok tersebut dipengaruhi oleh penurunan tekanan inflasi pada komoditas pangan utama yakni, beras dengan andil 0,74% lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya andil 0,84%. Lebih lanjut, penurunan tekanan inflasi pada kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau turut dipengaruhi oleh terjadinya deflasi pada beberapa komoditas pangan diantaranya aneka ikan (tongkol, dencis, dan bandeng), udang basah, dan daging ayam ras. Deflasi pada komoditas aneka ikan dipengaruhi oleh melimpahnya pasokan di pasaran, hal ini tercermin dari pada triwulan II 2024 data PPI Pusong mencatatkan produksi selama triwulan II 2024 (April – Juni) meningkat sebesar 7,88% (yoy) dari 1.434.600 kg menjadi 1.547.700 kg.

## Kel. Pakaian dan Alas Kaki

**Tabel 3.3.** Inflasi Kel, Pakaian dan Alas Kaki

INFLASI 1,62% (yoy)		ANDIL 0,10%	
PENYUMBANG INFLASI		PENYUMBANG DEFLASI	
KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)
Baju Anak Stelan	0,03	-	-
Baju Kaos Tanpa Kerah/t-shirt Anak	0,02	-	-
Sepatu Anak	0,02	-	-

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

**Kelompok Pakaian dan Alas Kaki mengalami**

**inflasi namun tidak sebesar periode sebelumnya.** Pada triwulan II 2024, inflasi kelompok pakaian dan alas kaki tercatat sebesar 1,62% (yoy) dengan andil 0,10% lebih rendah dibanding periode sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 2,73% dengan andil 0,16%. Tekanan inflasi pada kelompok Pakaian dan Alas Kaki yang lebih rendah turut dipengaruhi oleh penurunan permintaan masyarakat pasca berlalunya momen HBKN Idul Fitri. Namun demikian, penurunan tekanan inflasi lebih dalam tertahan oleh peningkatan inflasi pada subkelompok pakaian yang mengalami inflasi sebesar 1,15% (yoy) dan subkelompok alas kaki yang mengalami inflasi sebesar 3,88% (yoy).

## Kel. Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga

**Tabel 3.4.** Inflasi Kel. Perum., Air, Listrik, Gas, & Bahan Bakar

INFLASI -0,52% (yoy)		ANDIL -0,09%	
PENYUMBANG INFLASI		PENYUMBANG DEFLASI	
KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)
-	-	Bahan Bakar RT	0,08

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

**Kelompok ini kembali mengalami deflasi sebagaimana periode sebelumnya akibat penurunan harga Bahan Bakar RT.** Pada triwulan II 2024, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga mengalami deflasi sebesar -0,52% (yoy) dengan andil -0,09%. Deflasi terutama berasal dari subkelompok listrik dan bahan bakar rumah tangga yaitu sebesar -1,38% (yoy) dan pemeliharaan, perbaikan, dan keamanan tempat tinggal/perumahan sebesar -1,17% (yoy). Di sisi lain, subkelompok yang mengalami inflasi adalah sewa dan kontrak rumah sebesar 0,70%.

## Kel. Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga

**Tabel 3.5.** Inflasi Kel. Perlengkapan & Peralatan RT

INFLASI 1,71% (yoy)		ANDIL 0,07%	
PENYUMBANG INFLASI		PENYUMBANG DEFLASI	
KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)
Kasur	0,02	-	-
Detergen Cair	0,01	-	-
Upah Asisten Rumah Tangga	0,01	-	-

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Pada triwulan II 2024, inflasi kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rumah tangga mengalami peningkatan. Inflasi pada kelompok ini tercatat sebesar 1,71% (yoy) dengan andil 0,07%, andil inflasi lebih tinggi dibanding periode sebelumnya (0,04%). Inflasi tertinggi terjadi pada subkelompok barang pecah belah dan peralatan makan minum dengan inflasi sebesar 6,65% (yoy), sedangkan inflasi terendah pada subkelompok barang dan layanan untuk pemeliharaan rumah tangga rutin sebesar 0,88%.

## Kel. Kesehatan

Tabel 3.6. Inflasi Kel. Kesehatan

INFLASI 2,59% (yoy)		ANDIL 0,05%	
PENYUMBANG INFLASI		PENYUMBANG DEFLASI	
KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)
Vitamin	0,01	-	-
Obat Dengan Resep	0,01	-	-
Tarif Dokter Spesialis	0,01	-	-

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Inflasi kelompok kesehatan mengalami peningkatan dibanding periode sebelumnya, namun dengan andil yang terbatas. Secara tahunan, kelompok kesehatan mengalami inflasi sebesar 2,59% (yoy) dengan andil 0,05%, lebih tinggi dibanding periode sebelumnya (0,04%). Tekanan inflasi pada triwulan II disebabkan oleh subkelompok jasa kesehatan lainnya yang mengalami inflasi sebesar 8,41% (yoy). Sedangkan, inflasi terendah terjadi pada subkelompok jasa rawat inap sebesar 0,06 persen. Komoditas penyumbang inflasi terbesar kelompok ini adalah vitamin; obat dengan resep; dan tarif dokter spesialis dengan andil masing-masing sebesar 0,01%.

## Kel. Transportasi

Tabel 3.7. Inflasi Kel. Transportasi

INFLASI 1,11 % (yoy)		ANDIL 0,12%	
PENYUMBANG INFLASI		PENYUMBANG DEFLASI	
KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)
Angkutan Udara	0,05	-	-
Bensin	0,03	-	-
Cuci kendaraan	0,01	-	-
Pelumas/oli mesin	0,01	-	-

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

**Inflasi pada kelompok transportasi disebabkan oleh subkelompok jasa angkutan penumpang.**

Pada triwulan II 2024, inflasi kelompok transportasi sebesar 1,11% (yoy) dengan andil 0,12%, lebih tinggi dibanding periode sebelumnya (0,06%). Pada triwulan II subkelompok jasa angkutan penumpang dominan memberikan pengaruh terhadap kenaikan harga di kelompok transportasi. Inflasi di subkelompok tersebut sebesar 6,67% dengan kenaikan yang dominan berasal dari komoditas angkutan udara seiring dengan permintaan yang tinggi akibat libur cuti bersama yang diperpanjang di Provinsi Aceh.

## Kel. Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan

Tabel 3.8. Inflasi Kel. Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan

INFLASI -0,44% (yoy)		ANDIL -0,03%	
PENYUMBANG INFLASI		PENYUMBANG DEFLASI	
KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)
-	-	Televisi berwarna	0,01

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Pada kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, kembali terjadi deflasi pada periode triwulan II 2024. Kelompok ini mengalami deflasi sebesar 0,44% (yoy) dengan andil deflasi 0,03%, atau lebih rendah dibandingkan andil deflasi di periode sebelumnya (0,01%). Deflasi bersumber dari subkelompok peralatan informasi dan komunikasi dengan deflasi sebesar 2,15% (yoy). Komoditas yang mengalami deflasi berasal dari televisi berwarna dan telepon seluler dengan andil deflasi 0,01%.

## Kel. Rekreasi, Olahraga, dan Budaya

Tabel 3.9. Inflasi Kel. Rekreasi, Olahraga, dan Budaya

INFLASI 3,14% (yoy)		ANDIL 0,04%	
PENYUMBANG INFLASI		PENYUMBANG DEFLASI	
KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)
Mainan Anak	0,02	-	-
Tas Sekolah	0,01	-	-

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Pada triwulan II 2024, inflasi kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya mengalami penurunan dibanding periode sebelumnya (4,21%). Inflasi kelompok ini tercatat sebesar 3,14% (yoy) dengan

andil 0,04%. Inflasi yang terjadi pada kelompok ini disebabkan oleh subkelompok barang rekreasi lainnya dan olahraga dengan inflasi sebesar 5,19% (yoy). Sedangkan, inflasi terendah terjadi pada subkelompok koran, buku, dan perlengkapan sekolah sebesar 1,99%. Komoditas yang mengalami kenaikan harga, yaitu mainan anak; tas sekolah; dan makanan hewan peliharaan masing-masing sebesar 0,01 persen.

## Kel. Pendidikan

**Tabel 3.10.** Inflasi Kel. Pendidikan

INFLASI 0,66% (yoy)		ANDIL 0,03%	
PENYUMBANG INFLASI		PENYUMBANG DEFLASI	
KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)
Uang Sekolah Dasar	0,01	-	-
Taman Kanak-Kanak	0,01	-	-

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

**Inflasi kelompok pendidikan mengalami peningkatan didorong oleh meningkatnya biaya pendidikan dasar dan anak usia dini.** Secara tahunan, kelompok pendidikan mengalami inflasi sebesar 0,66% (yoy) dengan andil 0,03%. Inflasi yang terjadi pada kelompok ini disebabkan oleh subkelompok pendidikan dasar dan anak usia dini dengan inflasi sebesar 2,35% (yoy). Sedangkan, inflasi terendah terjadi pada subkelompok pendidikan menengah sebesar 1,55%. Komoditas yang mengalami kenaikan harga, yaitu uang sekolah dasar dan taman kanak-kanak masing-masing sebesar 0,01%. Inflasi dipicu oleh periode tahun ajaran baru.

## Kel. Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran

**Tabel 3.11.** Inflasi Kel. Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran

INFLASI 2,90% (yoy)		ANDIL 0,31%	
PENYUMBANG INFLASI		PENYUMBANG DEFLASI	
KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)
Nasi Dengan Lauk	0,11	-	-

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

**Inflasi kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran mengalami peningkatan pada triwulan II 2024.** Inflasi kelompok ini tercatat sebesar 2,90% (yoy) dengan andil 0,31%, lebih tinggi

dibanding andil periode sebelumnya (0,21%). Inflasi tertinggi sama dengan periode sebelumnya, yaitu terjadi pada subkelompok jasa pelayanan makanan dan minuman yang mengalami inflasi sebesar 2,90% (yoy) lebih tinggi dari periode sebelumnya 2,36%. Kenaikan terjadi pada komoditas nasi dengan lauk, sejalan dengan peningkatan inflasi pada kelompok bahan makanan.

## Kel. Perawatan Pribadi & Jasa Lainnya

**Tabel 3.12.** Inflasi Kel. Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya

INFLASI 4,41% (yoy)		ANDIL 0,24%	
PENYUMBANG INFLASI		PENYUMBANG DEFLASI	
KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)
Emas Perhiasan	0,11	-	-

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

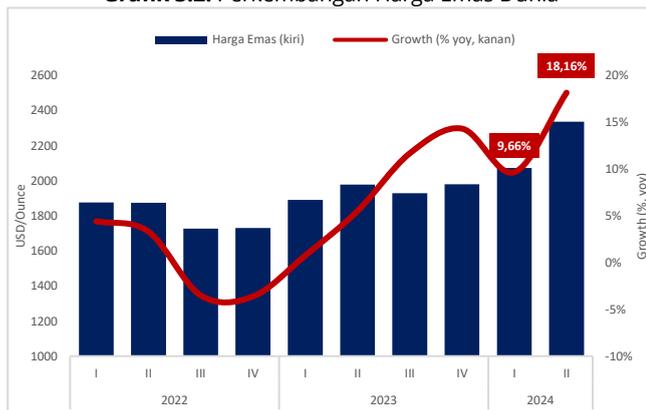
**Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami inflasi dengan andil yang lebih tinggi dibanding periode sebelumnya.** Inflasi kelompok ini pada triwulan II 2024 mencapai 4,41% (yoy) dengan andil sebesar 0,24% lebih tinggi dibanding triwulan I 2024 yang hanya mengalami inflasi sebesar 2,61% (yoy) dengan andil 0,14%. Inflasi utamanya terjadi pada subkelompok perawatan pribadi lainnya dengan inflasi sebesar 13,39% (yoy) dan terendah pada subkelompok perlindungan sosial sebesar 1,06%.

**Komoditas yang menyebabkan inflasi pada kelompok ini adalah harga emas perhiasan yang semakin tinggi dengan andil 0,25%.** Lebih tinggi dibanding periode sebelumnya yang sebesar 0,11%. Kenaikan harga emas perhiasan disebabkan oleh kenaikan harga emas dunia karena meningkatnya tensi geopolitik di Timur Tengah serta permintaan emas yang cenderung meningkat tiap tahunnya. Hal ini juga didorong oleh ekspektasi investor emas terhadap kebijakan moneter Amerika Serikat yang diperkirakan akan menurunkan suku bunga.

Harga emas dunia pada triwulan II 2024 menunjukkan peningkatan dibanding triwulan I 2023. Harga emas dunia di triwulan II 2024 mengalami peningkatan sebesar 18,16% (yoy) (Grafik 3.2). Harga emas pada triwulan II 2024 berada pada level USD2.337/ounce. Harga tersebut lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya

sebesar USD2.073/ounce.

**Grafik 3.2.** Perkembangan Harga Emas Dunia



Sumber: Bloomberg, diolah

### 3.3. Tracking Inflasi Triwulan III 2024

**Pada bulan Juli 2024, inflasi di Aceh tetap terjaga dengan menurunnya harga beberapa komoditas pangan utama seperti cabai merah dan bawang merah.** Namun demikian, secara bulanan kenaikan harga (mtm) di Aceh terutama disebabkan oleh meningkatnya *administered price*, khususnya komoditas Tarif PDAM di Banda Aceh yang meningkat hingga 30% sehingga memberikan andil sebesar 0,61 (yoy) dan 0,60 (mtm).

Melalui sinergi yang baik dalam TPID, inflasi di Provinsi Aceh tetap terjaga sesuai rentang sasaran inflasi nasional. Pada bulan Juli 2024, Aceh mengalami deflasi sebesar 0,11% (mtm) dengan inflasi secara tahunan terjaga sebesar 2,51% (yoy). Secara bulanan, inflasi tersebut lebih rendah dibanding bulan sebelumnya yang tercatat 0,03% (mtm). Inflasi secara tahunan juga lebih rendah jika dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 3,09% (yoy).

Jika dibandingkan dengan Nasional, inflasi Aceh (yoy) lebih tinggi sebesar 0,38% basis poin. Deviasi tersebut lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata deviasi inflasi Aceh dengan Nasional dari 2020-2023, yang sebesar 0,68. Sementara di wilayah Sumatera, inflasi Aceh menempati posisi inflasi tertinggi ketiga setelah Kepri (2,81%) dan Lampung (2,55% yoy).

Kenaikan harga di Aceh terutama disebabkan oleh

meningkatnya *administered price* dari komoditas Tarif Air Minum PAM di Banda Aceh yang meningkat sebesar 30% sehingga memberikan andil inflasi yang relatif tinggi terhadap realisasi inflasi Provinsi Aceh. Secara tahunan sumbangan Tarif Air Minum PAM terhadap inflasi Kota Banda Aceh sebesar 1,63% (yoy). Sedangkan, andil inflasi Tarif Air Minum PAM terhadap Provinsi Aceh sebesar 0,61% (yoy). Di sisi lain, perkembangan harga komoditas *volatile food* relatif terjaga, kelompok tersebut mengalami deflasi. Namun demikian, komoditas beras masih menjadi penyebab inflasi di bulan Juli 2024 dengan andil inflasi sebesar 0,77% (yoy) dan 0,09% (mtm).

**Pada triwulan III 2024, laju inflasi tahunan Provinsi Aceh diperkirakan akan meningkat dibandingkan periode sebelumnya.** Hal ini dipicu oleh momen PON XXI Aceh-Sumut, Maulid, Kampanye Pilkada Serentak, serta kenaikan BBM pada 10 Agustus 2024.

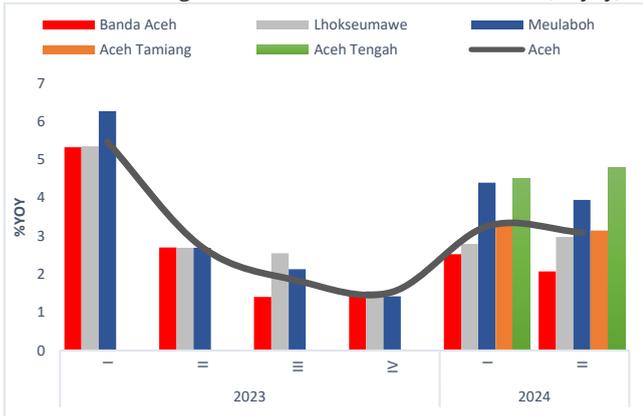
PON Aceh-Sumut XXI yang berlangsung tanggal 8-20 September 2024 menjadi momentum bagi Aceh dalam mengakselerasi perekonomian di tahun ini. Namun demikian, berisiko memicu inflasi dari permintaan tambahan yang berasal dari pengunjung. Penyelenggaraan PON di Aceh akan mempertandingkan 33 cabang olahraga, 42 cabang olahraga, dengan 510 nomor pertandingan. Kegiatan diperkirakan akan diikuti oleh 5.636 Atlet dan 2.752 Official serta ribuan pendukung dari berbagai daerah.

Untuk itu, kolaborasi dan sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Aceh perlu ditingkatkan guna menjaga capaian inflasi tetap berada pada sasaran inflasi nasional 2,5±1% (yoy).

### 3.4. Inflasi Spasial

**Secara spasial, inflasi pada Triwulan II 2024 terjadi di seluruh kabupaten/kota pantauan di Provinsi Aceh.** Secara tahunan, Aceh Tengah kembali mengalami inflasi paling tinggi, yakni 4,78% (yoy) dan paling rendah, yaitu Lhokseumawe sebesar 2,07%. Sementara secara bulanan, Meulaboh menjadi kota dengan inflasi tertinggi sebesar 0,32% dan terendah, yaitu Banda Aceh sebesar -0,19% (Grafik 3.3).

**Grafik 3.3.** Pergerakan Inflasi Kab/Kota IHK di Aceh (% , yoy)



Inflasi Tahunan di Provinsi Aceh Bulan Juni					
2,07	2,97	3,94	3,14	4,78	3,09

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Jika dilihat berdasarkan daerah, komoditas utama penyumbang inflasi (mtm) terbesar Kota Banda Aceh berasal dari Cabai Merah sebesar 0,05%, sedangkan penyumbang deflasi (mtm) terbesar adalah tomat, yaitu 0,13%.

**Tabel 3.13** Andil Inflasi di Kota Banda Aceh (% , mtm)

Banda Aceh			
Andil Inflasi		Andil Deflasi	
Cabai Merah	0,05	Tomat	0,13
Angkutan Udara	0,04	Bawang Merah	0,11
Ikan Tuna	0,04	Udang Basah	0,06
Beras	0,03	Daging Ayam Ras	0,05
Ikan Dencis	0,02	Popok Bayi	0,04

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Selanjutnya, komoditas utama penyumbang inflasi (mtm) terbesar di Kota Lhokseumawe adalah ikan tongkol dengan andil sebesar 0,15%, sedangkan andil deflasi terbesar terdapat pada komoditas bawang merah sebesar 0,15%.

**Tabel 3.14** Andil Inflasi di Kota Lhokseumawe (% , mtm)

Lhokseumawe			
Andil Inflasi		Andil Deflasi	
Ikan Tongkol	0,15	Bawang Merah	0,15
Kontrak Rumah	0,09	Tomat	0,07
Ikan Dencis	0,07	Daging Ayam Ras	0,06
Cabai Merah	0,06	Deodorant	0,04
Udang Basah	0,03	Telepon Seluler	0,03

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Kemudian, Kota Meulaboh memiliki andil inflasi

terbesar dari ikan tongkol 0,19% dan andil deflasi terbesar terdapat di komoditas Tomat, yaitu 0,12%.

Komoditas perikanan memiliki andil yang besar mengingat konsumsi perikanan di Meulaboh mencapai 82,66 kg per kapita jauh lebih tinggi dibandingkan dua kota lainnya, yaitu Banda Aceh (58,24 kg) dan Lhokseumawe (63,62 kg).

**Tabel 3.15** Andil Inflasi di Meulaboh (% , mtm)

Meulaboh			
Andil Inflasi		Andil Deflasi	
Ikan Tongkol	0,19	Tomat	0,12
Ikan Dencis	0,14	Bawang Merah	0,10
Ikan Cakalang	0,09	Cabai Merah	0,05
Baju Anak Stelan	0,05	Daging Ayam Ras	0,04
Ikan Kembung	0,05	Telur Ayam Ras	0,02

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Sementara, inflasi (mtm) di Aceh Tamiang didorong oleh komoditas ikan dencis dengan andil sebesar 0,15%, kemudian inflasi dapat tertahan oleh komoditas bawang merah dengan andil deflasi terbesar, yaitu pada komoditas 0,24%.

**Tabel 3.16** Andil Inflasi di Aceh Tamiang (% , mtm)

Aceh Tamiang			
Andil Inflasi		Andil Deflasi	
Ikan Dencis	0,15	Bawang Merah	0,24
Ikan Tongkol	0,14	Tomat	0,15
Beras	0,10	Daging Ayam Ras	0,15
Udang Basah	0,10	Cabai Merah	0,08
Cabai Rawit	0,09	Kacang Panjang	0,05

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Terakhir, inflasi di Aceh Tengah utamanya didorong oleh komoditas ikan bandeng dengan andil sebesar 0,10%. Di sisi lain, komoditas yang memberikan deflasi terbesar adalah komoditas kentang dengan andil deflasi sebesar 0,04%.

**Tabel 3.17** Andil Inflasi di Aceh Tengah (% , mtm)

Aceh Tengah			
Andil Inflasi		Andil Deflasi	
Ikan Bandeng	0,10	Kentang	0,04
Cabai Merah	0,06	Bayam	0,03
Jeruk	0,05	Bawang Merah	0,03
Cabai Rawit	0,03	Beras	0,02
Telur Ayam Ras	0,03	Semangka	0,02

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

### 3.5. Aktivitas Tim

## Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Aceh

Pada bulan triwulan II 2024, inflasi di Provinsi Aceh tetap terjaga meskipun menghadapi berbagai tantangan. Dalam menjaga terkendalinya inflasi agar tetap berada pada sasaran  $2,5\% \pm 1\%$ , TPID Aceh menghadapi berbagai tantangan antara lain bersumber dari berlangsungnya momen HBKN Iduladha (diperingati selama empat hari 17 – 20 Juni 2024), penyaluran gaji ke-13 dan tunjangan *meugang* (tunjangan khusus di Provinsi Aceh untuk Iduladha), dan periode tahun ajaran baru (SD s.d. SMA). Di samping itu, dari sisi produksi, cabai merah dan bawang merah belum memasuki masa panen dengan kecenderungan produksi yang menurun. Kedua komoditas tersebut merupakan andil inflasi terbesar pada periode sebelumnya.

Oleh karena itu, KPw BI Aceh bersama dengan TPID Aceh mengambil langkah strategis untuk pengendalian inflasi yang efektif dan efisien. Strategi tersebut mulai dari pasar murah di 57 kecamatan di kab/kota IHK serta fasilitasi distribusi komoditas bawang merah dan cabai merah ke pedagang besar di pasar induk bekerjasama dengan Bapanas. Dalam rangka menjalankan strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif), berbagai kegiatan telah dilaksanakan oleh TPID Provinsi Aceh. Pada triwulan II 2024 kegiatan yang telah dilakukan yaitu:

#### 1. Keterjangkauan Harga

- a. Pelaksanaan program sinergi operasi pasar murah melalui SPHP dan GPM utamanya di 5 (lima) kab/kota IHK di Provinsi Aceh yang dilaksanakan secara terjadwal dan serentak.
- b. Pelaksanaan program Subsidi Ongkos Angkut (SOA) untuk komoditas pangan yang bergejolak (*volatile food*).

#### 2. Ketersediaan Pasokan

- a. Mendorong program peningkatan produksi di daerah sentra a.l. melalui optimalisasi *Good*

*Agriculture Practices*, replikasi *best practice*, dan hilirisasi pangan.

- b. Mendorong *urban farming* dan pemanfaatan inovasi teknologi budidaya pertanian untuk peningkatan produktivitas komoditas pangan strategis.
- c. Mendorong pemberian bantuan sarana prasarana di sisi hulu untuk mendukung peningkatan produksi dan menjaga pasokan.
- d. Mengakselerasi program Kerja Sama antar Daerah (KAD) untuk komoditas pangan strategis, utamanya di 5 (lima) kabupaten/kota IHK di Provinsi Aceh dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan pangan.
- e. Memperkuat KAD daerah sentra dan non sentra serta memperkuat koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi fasilitasi distribusi pangan antar daerah.

#### 3. Kelancaran Distribusi

- a. Pelaksanaan fasilitasi distribusi pangan dalam rangka mendukung kelancaran distribusi komoditas pangan strategis dari daerah sentra ke non sentra dengan mempertimbangkan kebutuhan pasokan antar daerah.
- b. Mendorong pemanfaatan agen/warung/toko TPID/*mini distribution center*.

#### 4. Komunikasi Efektif

- a. Pelaksanaan *Capacity Building* kepada TPID se-Provinsi Aceh dengan tujuan *refreshment*, peningkatan pemahaman, serta penguatan sinergi antar TPID se-Provinsi Aceh dalam pengendalian inflasi.
- b. Pelaksanaan *High Level Meeting* TPID Provinsi Aceh dan TPID Kabupaten/Kota IHK se-Provinsi Aceh dalam rangka koordinasi pengendalian inflasi serta antisipasi risiko inflasi tahun 2024.
- c. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Mingguan yang dihadiri TPID Provinsi Aceh dan seluruh TPID Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.
- d. Optimalisasi Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) sebagai *early warning system* inflasi.



## BAB V

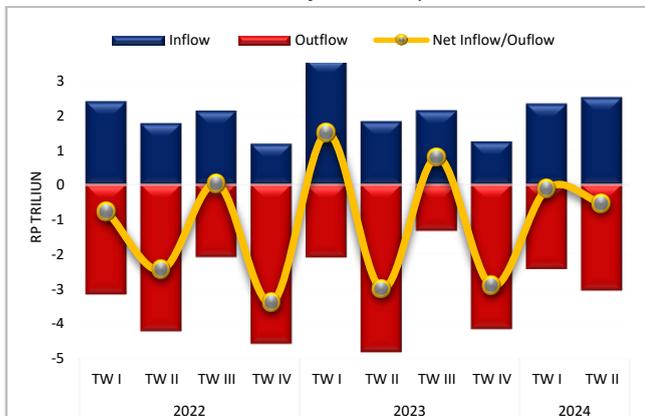
# PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH

Pada triwulan II 2024, perkembangan sistem pembayaran secara konsisten berjalan lancar dalam mendorong perekonomian Provinsi Aceh. Sistem pembayaran tunai berjalan dengan baik, dimana terjadi *net outflow* pada triwulan laporan. Sistem pembayaran non tunai nilai besar mengalami pertumbuhan. Di sisi lain, penggunaan kartu debit, uang elektronik, dan QRIS terus menunjukkan tren pertumbuhan positif pada triwulan laporan.

## 5.1. Sistem Pembayaran Tunai

Pada triwulan II 2024, posisi pengedaran uang kartal di Bank Indonesia mengalami *net outflow*<sup>1</sup>. Aliran uang kartal melalui Bank Indonesia di Provinsi Aceh mengalami *net outflow* sebesar Rp0,54 triliun, dengan total uang kartal masuk (*inflow*) sebesar Rp2,52 triliun dan total uang kartal keluar (*outflow*) sebesar Rp3,05 triliun (Grafik 5.1). *Net outflow* pada triwulan laporan mengindikasikan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap uang kartal lebih tinggi dibandingkan masuknya uang kartal dari masyarakat dan perbankan ke Bank Indonesia.

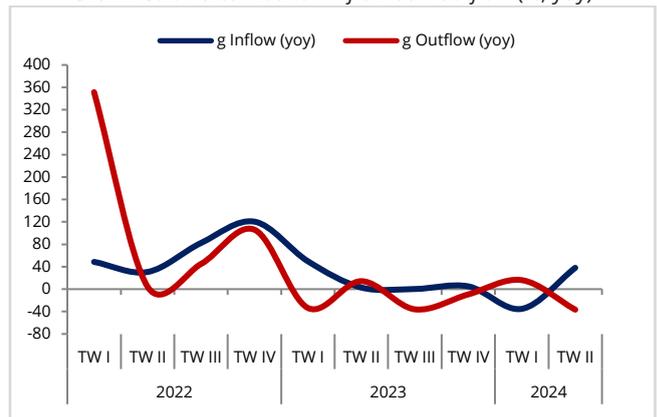
Grafik 5.1. *Netflow* Kas (Rp Triliun)



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Secara tahunan, tingkat *outflow* pada triwulan II 2024 mengalami penurunan sebesar -36,67% (*yoy*). Sementara itu, *inflow* tercatat meningkat sebesar 38,07% (*yoy*) (Grafik 5.2). Nilai *outflow* yang mengalami peningkatan pada triwulan laporan sebesar 25,17% (*qtq*) sejalan dengan pola historisnya dimana *outflow* pada triwulan kedua lebih tinggi dari triwulan sebelumnya. Hal ini sejalan dengan nilai *inflow* yang juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 8,08% (*qtq*).

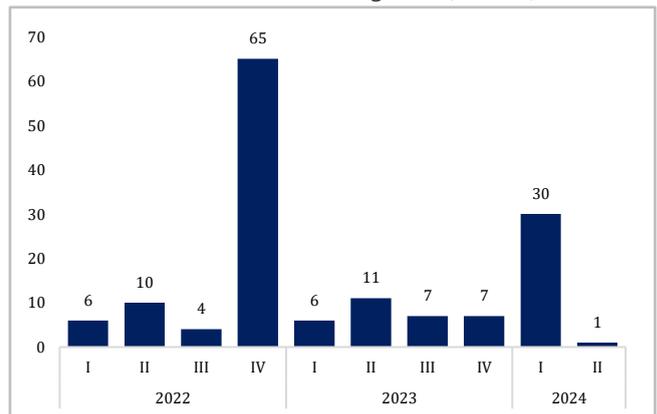
Grafik 5.2. Pertumbuhan *Inflow* dan *Outflow* (% *yoy*)



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Kualitas peredaran uang kartal tetap terjaga. Temuan uang yang diragukan keasliannya (*palsu*) pada triwulan laporan tercatat meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya, yakni sebanyak 1 lembar yang ditemukan dengan pecahan Rp50.000,00 (Grafik 5.3).

Grafik 5.3. Temuan Uang Palsu (Lembar)



Sumber: Bank Indonesia, diolah

## 5.2. Sistem Pembayaran Non Tunai

Sistem pembayaran non tunai, baik yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia maupun industri, menunjukkan tren pertumbuhan positif pada triwulan laporan. Sistem pembayaran nilai besar dan nilai ritel yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia menunjukkan penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya. Sementara itu, sistem pembayaran yang diselenggarakan oleh industri menggunakan instrumen Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) seperti kartu debit/ATM tercatat mengalami

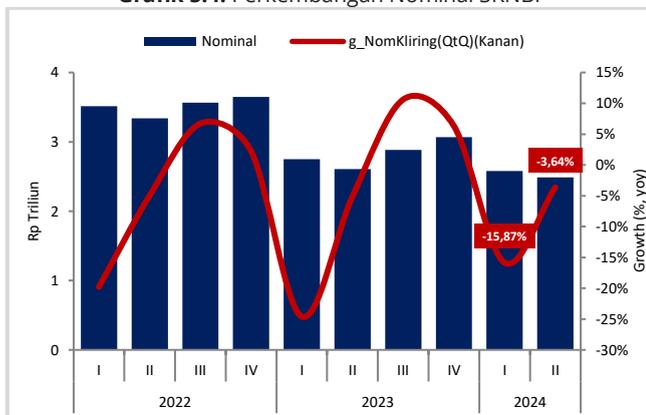
<sup>1</sup> Aliran uang kartal dari perbankan dan masyarakat ke Bank Indonesia (*inflow*) lebih

kecil dari aliran uang kartal dari Bank Indonesia ke sistem perbankan dan masyarakat (*outflow*)

pertumbuhan secara agregat dalam transaksi. Begitu juga dengan penggunaan instrumen Uang Elektronik, baik *server based* ataupun *chip based* di Provinsi Aceh tercatat mengalami peningkatan pada triwulan laporan. Secara umum, sistem pembayaran non tunai di Provinsi Aceh tetap terselenggara dengan baik dalam mendukung berbagai aktivitas transaksi masyarakat.

**Transaksi sistem pembayaran non tunai yang diselenggarakan Bank Indonesia melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) pada triwulan II 2024 menurun dibandingkan triwulan sebelumnya.** Hal ini disinyalir terjadi karena adanya transisi pengguna sistem pembayaran ritel yang beralih (*user shifting*) menggunakan BI-FAST. Nominal transaksi turun sebesar -4,64% (yoy) atau menjadi sebesar Rp2,49 Triliun (Grafik 5.4). Sejalan dengan hal tersebut, nominal penyelesaian transaksi ritel melalui SKNBI pada triwulan laporan juga menurun sebesar 0,04% (qtq) dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar Rp2,58 Triliun.

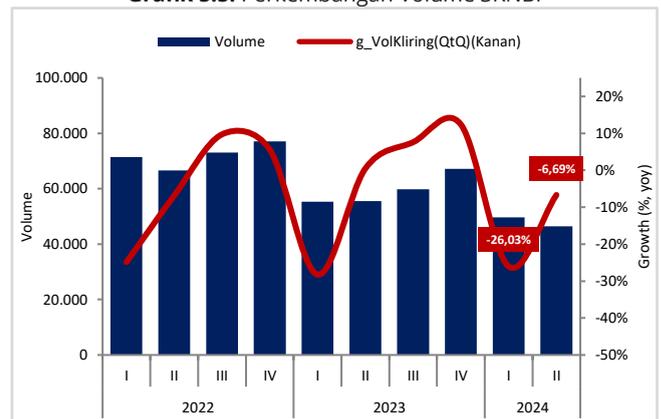
**Grafik 5.4.** Perkembangan Nominal SKNBI



Sumber: Bank Indonesia, diolah

**Volume/frekuensi transaksi ritel melalui SKNBI pada triwulan laporan menurun dibandingkan triwulan sebelumnya.** Volume transaksi SKNBI pada triwulan laporan tercatat sebanyak 46.395 Data Keuangan Elektronik (DKE) atau turun sebesar 16,54% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan I 2024 yang tercatat sebanyak 46.395 atau turun sebesar -16,54% (qtq) (Grafik 5.5).

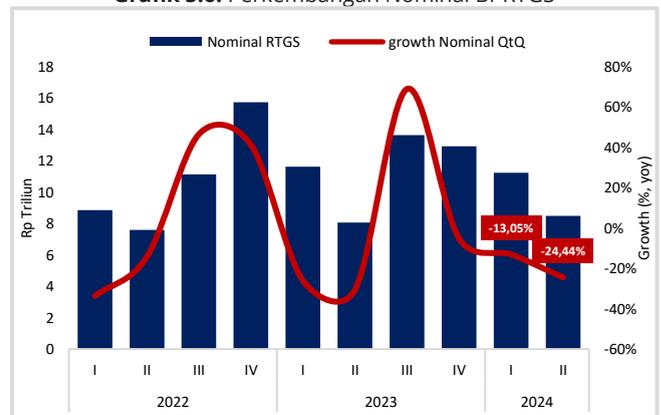
**Grafik 5.5.** Perkembangan Volume SKNBI



Sumber: Bank Indonesia, diolah

**Perkembangan sistem pembayaran nilai besar dalam Bank Indonesia Real-Time Gross Settlement (BI-RTGS) secara nominal tercatat meningkat pada periode laporan.** Transaksi BI-RTGS secara nominal tercatat sebesar Rp8,50 triliun atau tumbuh sebesar 5,30% (yoy) (Grafik 5.6). Sementara jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, nominal transaksi BI-RTGS pada triwulan laporan menurun sebesar 24,44% (qtq) dibandingkan triwulan I 2024 yang tercatat sebesar Rp11,25 triliun.

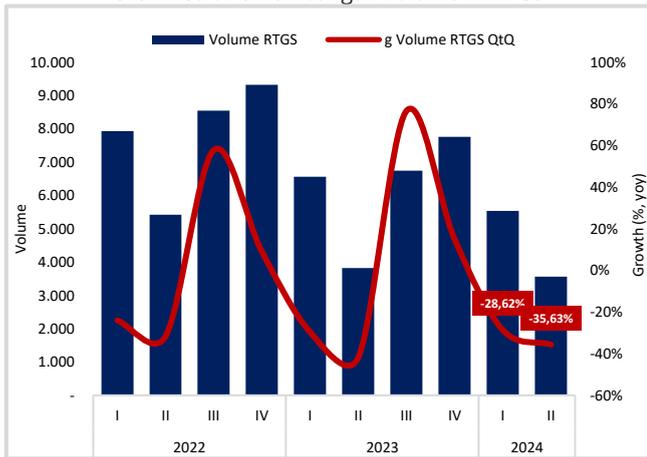
**Grafik 5.6.** Perkembangan Nominal BI-RTGS



Sumber: Bank Indonesia, diolah

**Volume/frekuensi transaksi BI-RTGS juga mengalami penurunan pada triwulan laporan.** Pada triwulan laporan volume/frekuensi transaksi turun sebesar 35,63% (yoy). Sebanyak 3.565 transaksi dilakukan pada triwulan laporan. Sementara pada triwulan sebelumnya sebanyak 5.538 transaksi dilakukan (Grafik 5.7).

**Grafik 5.7.** Perkembangan Volume BI-RTGS

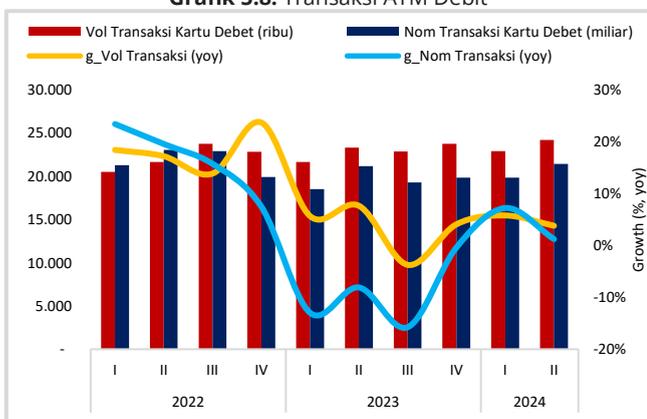


Sumber: Bank Indonesia, diolah

Selanjutnya, transaksi non tunai menggunakan APMK yaitu kartu ATM/debit, dan Uang Elektronik (UE) juga mengalami perkembangan, sementara penggunaan kartu kredit mengalami penurunan. Perkembangan transaksi kartu ATM/debit dan Uang Elektronik menunjukkan peningkatan jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Dari sisi kartu ATM/debit, volume transaksi pada triwulan II 2024 tercatat meningkat sebesar 3,78% (yoy) menjadi 24,17 juta transaksi, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 5,75% (yoy) (Grafik 5.8). Sementara nominal transaksi ATM/debit tercatat sebesar Rp21,41 Triliun atau tumbuh sebesar 1,21% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 7,18% (yoy). Kartu ATM/debit mayoritas digunakan oleh masyarakat untuk aktivitas tarik/setor tunai dengan nominal transaksi sebanyak Rp19,07 triliun (78,91%).

**Grafik 5.8.** Transaksi ATM Debit



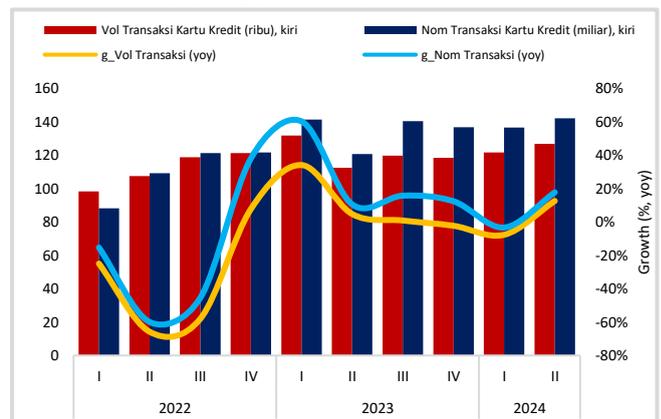
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Sementara itu dari sisi kartu kredit, volume

transaksi meningkat sebesar 12,61% (yoy) atau sebesar 126.76 transaksi (Grafik 5.9). Secara nominal, pada triwulan laporan transaksi kartu kredit tercatat sebesar Rp142,18 miliar atau tumbuh sebesar 12,61% (yoy).

Selama triwulan II 2024, transaksi kartu kredit mayoritas didominasi untuk keperluan belanja dengan nominal mencapai Rp137,59 miliar atau 96,78% dari total nominal transaksi dan volume sebanyak 122.661 transaksi atau 96,77% dari total volume transaksi.

**Grafik 5.9.** Transaksi Kartu Kredit



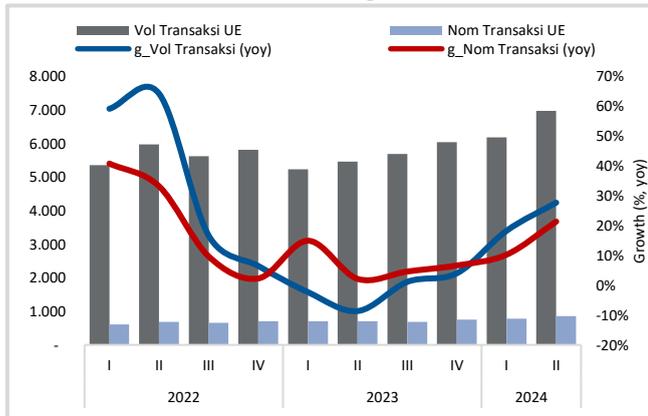
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Seiring dengan meningkatnya *awareness* masyarakat dalam menggunakan instrumen pembayaran non tunai, perkembangan transaksi menggunakan UE terus mengalami peningkatan. Transaksi UE secara nominal pada triwulan II 2024 mencapai Rp853,85 miliar, atau meningkat sebesar 21,33% (yoy). Sementara volume transaksi UE meningkat sebesar 27,67% (yoy) atau sebanyak 6,97 juta transaksi selama triwulan II 2024 (Grafik 5.10). Tren transaksi UE yang relatif terus meningkat mengindikasikan semakin tingginya minat masyarakat dalam menggunakan UE baik dari sisi konsumen maupun *merchant*. Implementasi berbagai program elektronifikasi oleh Pemda juga berpengaruh terhadap peningkatan jumlah transaksi UE. Hal ini menunjukkan bahwa minat masyarakat yang tinggi dalam menggunakan instrumen UE juga diiringi dengan peningkatan infrastruktur penerima pembayaran UE baik *chip based* ataupun *server based*. Peningkatan ini juga selaras dengan semakin tingginya intensitas penggunaan UE dalam aktivitas belanja masyarakat

melalui *platform e-commerce* selama masa pandemi. Selama triwulan II 2024, transaksi UE mayoritas didominasi untuk keperluan belanja dengan jumlah nominal mencapai Rp572,36 miliar atau 67,03% dari total nominal transaksi dan volume sebanyak 5,26 juta transaksi atau 75,59% dari total volume transaksi.

Transaksi UE berbasis server (*server based*) juga mengalami kenaikan di Provinsi Aceh. Pemanfaatan salah satu metode pembayaran digital berbasis server yaitu melalui *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) mengalami peningkatan yang terlihat dari perkembangan jumlah *merchant* yang telah mengimplementasikan QRIS. Peningkatan ini didorong oleh *awareness* masyarakat yang semakin tinggi dalam memanfaatkan fitur pembayaran yang bersifat *contactless* untuk meminimalisir risiko penularan Covid-19. Hal ini juga mengindikasikan bahwa *demand* masyarakat untuk melakukan *contactless payment* semakin tinggi.

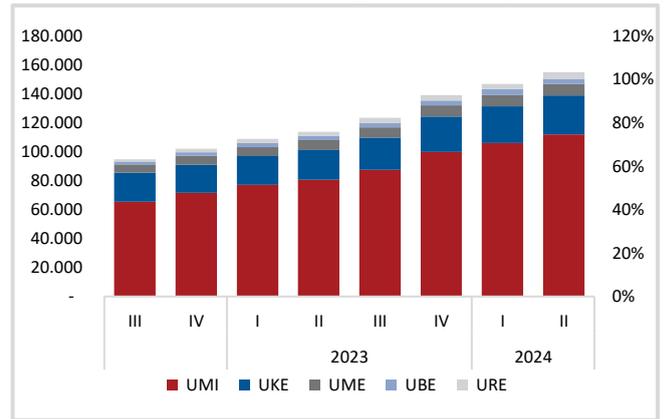
**Grafik 5.10.** Perkembangan Transaksi UE



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Hingga triwulan II 2024, terdapat 155.211 *merchant* yang telah mengimplementasikan QRIS sebagai salah satu alternatif kanal pembayaran non tunai (Grafik 5.11). Jumlah tersebut menunjukkan pertumbuhan sebesar 36,3% (yoy) jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 113.893 *merchant*. Secara triwulanan, jumlah *merchant* meningkat sebesar 7,27% (qtq) dari posisi triwulan sebelumnya sebanyak 146.931 *merchant*. Berdasarkan klasifikasi usaha yang telah mengimplementasikan QRIS, *share* terbesar dimiliki oleh usaha mikro (UMI) sebanyak 111.992 *merchant* (72,15%).

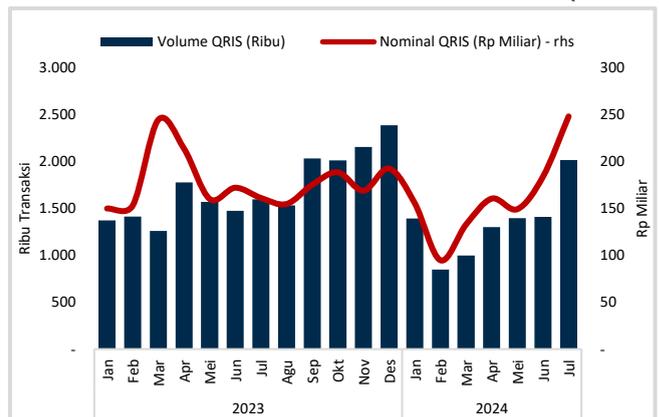
**Grafik 5.11.** Perkembangan *Merchant* QRIS



Sumber: PT PTEN, diolah

Sementara dari sisi jumlah pengguna, hingga triwulan II 2024 telah terdapat 586.508 pengguna atau bertambah sebanyak 37.407 selama triwulan laporan. Dari sisi volume transaksi, pada triwulan II 2024 terdapat 4,09 Juta transaksi dengan nominal transaksi mencapai Rp492,70 miliar.

**Grafik 5.12.** Pertumbuhan Nominal dan Transaksi QRIS



Sumber: PT PTEN, diolah

### 5.3. Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB)

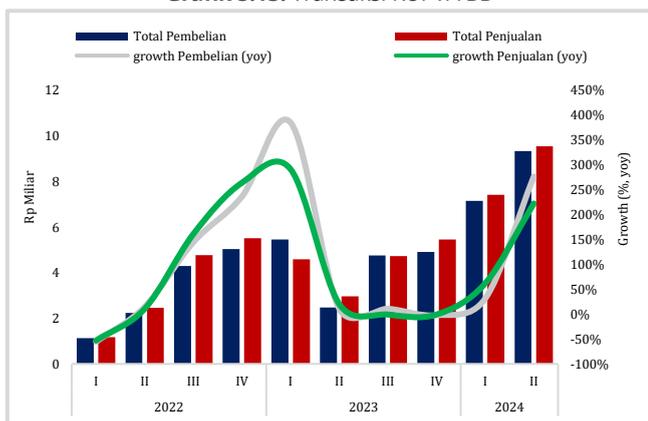
Dalam rangka mewujudkan nilai tukar yang stabil guna mendukung terciptanya iklim stabilitas moneter, Bank Indonesia memandang perlunya regulasi yang mengatur pasar keuangan termasuk pasar keuangan valuta asing (*valas*). Di bidang sistem pembayaran, Bank Indonesia berperan sebagai regulator yang menjamin terciptanya pasar keuangan *valas* yang sehat, profesional, dan menerapkan prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT).

Hingga triwulan II 2024, terdapat 13 (tiga belas) KUPVA BB berizin di Provinsi Aceh yang melayani pembelian maupun penjualan Uang Kertas Asing (UKA). Sebanyak 5 (lima) KUPVA BB beroperasi di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, sementara 8 (delapan) lainnya beroperasi di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Lhokseumawe.

Pada triwulan laporan, transaksi KUPVA BB berizin di Provinsi Aceh meningkat jika dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya. Transaksi KUPVA BB pada triwulan laporan meningkat sebesar 246,73% (yoy) menjadi Rp18,85 miliar dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp5,44 miliar.

Berdasarkan jenis transaksi, pembelian UKA pada triwulan laporan mengalami pertumbuhan sebesar 276,15% (yoy) menjadi Rp9,32 miliar dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp2,48 miliar. Sejalan dengan hal tersebut penjualan UKA pada triwulan laporan juga mengalami peningkatan sebesar 222,11% (yoy) menjadi Rp9,53 miliar dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp2,96 miliar (Grafik 5.13).

**Grafik 5.13.** Transaksi KUPVA BB



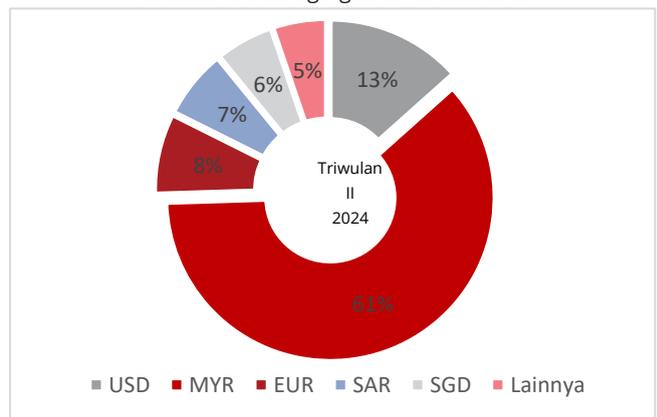
Sumber: LKPBU, diolah

Pada tanggal 29 September 2022 telah ditandatangani Perjanjian Kerja Sama antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum & HAM Aceh dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) terkait Visa Kunjungan Saat Kedatangan atau *Visa on Arrival* (VoA) yang menjadi tanda kembali dibukanya rute penerbangan Internasional. Sebelumnya dalam menyelenggarakan VoA di seluruh wilayah

Indonesia, Kementerian Hukum & HAM hanya bekerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI), akan tetapi pasca qanun LKS yang diterapkan di provinsi Aceh mengakibatkan BRI tidak lagi dapat memberikan layanan di Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM) Provinsi Aceh. Kesiapan mekanisme VoA di Bandara SIM tentu akan memperlancar proses perizinan dari wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Provinsi Aceh.

Sejalan dengan telah dibukanya VoA di Bandara SIM, saat ini telah terdapat 3 maskapai penerbangan yang membuka rute internasionalnya di Aceh. Air Asia menjadi maskapai pertama yang membuka rute internasional pasca pandemi Covid-19. Pada 3 Oktober 2022 Air Asia resmi membuka kembali rute Aceh – Kuala Lumpur, dan disusul oleh Batik Air dan Fire Fly yang membuka rute Aceh – Penang. Dan saat ini rute Air Asia dari/ke Kuala Lumpur telah terbang secara reguler setiap harinya. Terakhir Super Air Jet juga telah membuka rute dari/ke Kuala Lumpur.

**Grafik 5.14.** Disagregasi Transaksi UKA



Sumber: LKPBU, diolah

Kedepannya transaksi penukaran UKA diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan kembali dibukanya rute penerbangan Internasional oleh beberapa maskapai penerbangan internasional.

Berdasarkan jenis UKA yang diperdagangkan, transaksi KUPVA BB pada triwulan laporan didominasi oleh UKA Ringgit Malaysia (MYR) sebesar 62,27% dan Dollar Amerika Serikat (USD) sebesar 10,82% (Grafik 5.14). Dominasi UKA tersebut tidak terlepas dari faktor ekspor impor, pariwisata, pendidikan, dan remitansi TKA yang mendorong terjadinya permintaan dan penawaran terhadap UKA di Provinsi Aceh.

Bank Indonesia bekerjasama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga telah menyelenggarakan *capacity building* kepada seluruh pedagang valuta asing berizin di Provinsi Aceh. Tujuan dari *capacity building* ini adalah agar seluruh pedagang valuta asing dapat lebih memahami potensi penyalahgunaan valuta asing baik sebagai sarana pencucian uang ataupun pendanaan terorisme sekaligus menjalankan langkah mitigasi risiko tersebut. Selain itu juga dijelaskan bagaimana mekanisme pelaporan apabila terdapat transaksi yang mencurigakan melalui Sistem Informasi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. Dengan memahami secara lebih dalam terkait risiko yang ada dan bagaimana mekanisme pelaporannya, diharapkan kewaspadaan setiap pedagang valuta asing akan lebih meningkat utamanya mengenai profil *customer*.

## 5.4. Penyaluran Program Sembako dan PKH

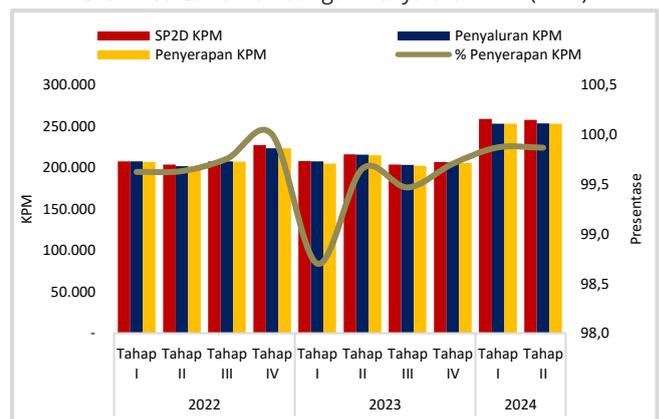
Sebagai bentuk komitmen Pemerintah untuk meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia, Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Salah satu langkah yang ditempuh adalah melakukan transformasi penyaluran bantuan sosial, dari tunai menjadi non tunai dengan menggunakan sistem perbankan. Jenis bantuan sosial yang disalurkan secara non tunai antara lain Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako. Pemerintah menyalurkan bantuan kepada masyarakat penerima bantuan atau disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). KKS yang juga dikenal dengan Kartu Kombo merupakan instrumen pembayaran yang memiliki fitur uang elektronik dan tabungan yang digunakan oleh KPM dalam menerima bantuan sosial. Dengan demikian, KPM yang selama ini tidak memiliki akses terhadap lembaga keuangan formal telah berubah statusnya menjadi *bankable*.

Dalam rangka mendukung kesuksesan perluasan implementasi penyaluran BSNT, Bank Indonesia

juga senantiasa melakukan sosialisasi dan monitoring perluasan penyaluran bantuan sosial non tunai di Aceh. Adapun kegiatan monitoring dilaksanakan melalui pemantauan data secara *off site* maupun *on site* terhadap efektivitas/keandalan infrastruktur sistem pembayaran yang digunakan dalam penyaluran BSNT.

PKH disalurkan sebagai bagian dari jaring pengaman sosial yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk menjamin kebutuhan dasar masyarakat miskin di masa pandemi. Pada triwulan laporan, bantuan PKH Tahap II tahun 2024 di Provinsi Aceh telah disalurkan sebesar 98,17% kepada KPM (Grafik 5.15). Jumlah KPM yang telah melakukan penyerapan untuk Tahap II tercatat sebanyak 253.424 atau telah mencapai 98,30% dari target jumlah penerima sebanyak 257.802 KPM.

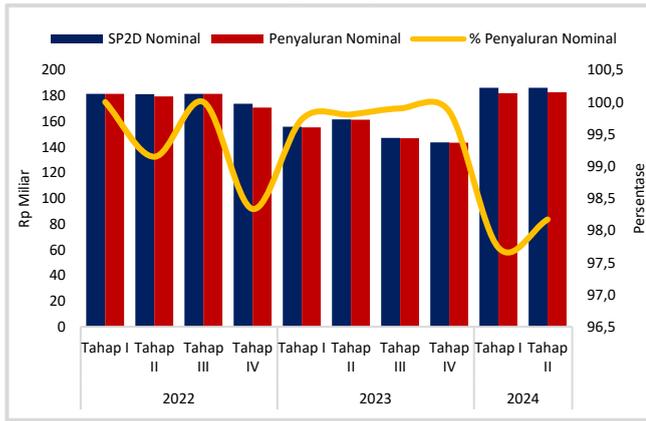
Grafik 5.15. Perkembangan Penyaluran PKH (KPM)



Sumber: Himbara, diolah

Di sisi nominal, jumlah bantuan per tahap yang disalurkan selalu berfluktuasi menyesuaikan dengan data KPM yang dimutakhirkan secara berkala oleh Kemensos RI. Pada triwulan II 2024, nominal bantuan yang disalurkan sebesar Rp182,64 miliar dengan persentase nominal penyaluran PKH telah mencapai 98,17% (Grafik 5.16). Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2024 yaitu Rp181,86 miliar.

**Grafik 5.16.** Perkembangan Penyaluran PKH (Nominal)



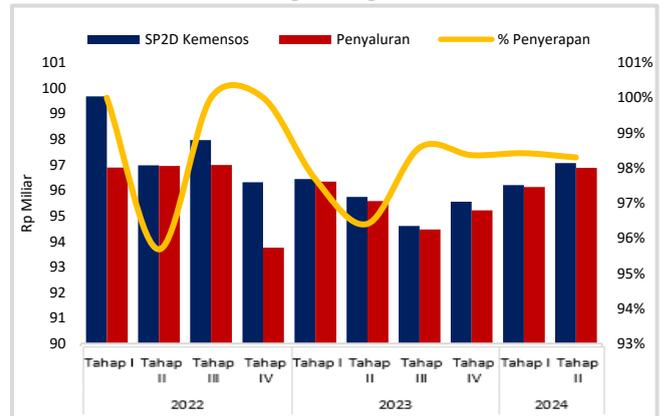
Sumber: Himbara, diolah

Sementara itu, penyaluran bantuan Program Sembako telah diperluas ke seluruh Kab/Kota di Provinsi Aceh. Nilai bantuan program sembako yang diterima masyarakat pada awalnya ditetapkan sebesar Rp150.000/bulan/KPM. Namun berdasarkan keputusan Presiden dalam rapat terbatas penanggulangan pandemi Covid-19, nilai bantuan dinaikkan menjadi Rp200.000/bulan/KPM hingga triwulan laporan. Dalam rangka membantu meringankan dampak pandemi Covid-19, pada bulan Desember 2021 Pemerintah memberikan tambahan 2 (dua) bulan bantuan Program Sembako. Harapannya keluarga penerima manfaat mampu meningkatkan konsumsi ditengah pandemi Covid-19 yang masih melanda.

Pada triwulan II 2024, nominal bantuan yang disalurkan Program Sembako sebesar Rp96,87 miliar dengan persentase nominal penyaluran Program Sembako telah mencapai 98,30% (Grafik

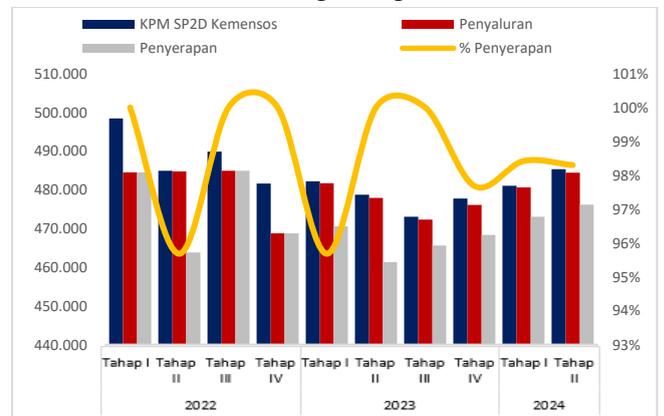
5.17). Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2024 yaitu Rp96,12 miliar.

**Grafik 5.17.** Perkembangan Program Sembako (Nominal)



Sumber: Himbara, diolah

**Grafik 5.18.** Perkembangan Program Sembako (KPM)



Sumber: Himbara, diolah

Sementara itu, jumlah KPM program sembako pada triwulan laporan mengalami peningkatan menjadi 485 ribu KPM dari jumlah KPM posisi Maret 2024 sebanyak 481 ribu KPM (Grafik 5.18).



## BAB IV

# PEMBIAYAAN DAERAH SERTA PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN & UMKM

Stabilitas Sistem Keuangan Provinsi Aceh pada triwulan II 2024 tumbuh stabil. Hal ini tercermin dari peningkatan pembiayaan berdasarkan lokasi bank yang diikuti oleh penurunan *Non Performing Financing*. Peningkatan juga terjadi pada Dana Pihak Ketiga (DPK) berdasarkan lokasi bank yang tumbuh sebesar 11,56% (yoy). Sementara, rasio pembiayaan untuk UMKM mencapai sebesar 27,93%.

## 4.1. Kinerja Perbankan

**Stabilitas Sistem Keuangan pada triwulan II 2024 menunjukkan kondisi yang terjaga.** Aktivitas perbankan di Aceh pada triwulan II 2024 terpantau tumbuh meningkat dari triwulan sebelumnya. Berdasarkan lokasi bank, penyaluran pembiayaan mengalami pertumbuhan sebesar 13,04% (yoy). Begitu pula penyaluran pembiayaan berdasarkan lokasi proyek mengalami peningkatan sebesar 1,61% (yoy). Meningkatnya pertumbuhan pembiayaan didorong oleh membaiknya pembiayaan konsumsi di tengah HBKN Idul Fitri dan Idul Adha yang berlangsung pada triwulan II. Selain itu, meningkatnya pembiayaan didorong oleh percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN), seperti Bendungan Keureuto, Bendungan Rukoh, dan Jalan Tol Sigli-Banda Aceh yang ditargetkan selesai pada akhir triwulan III. Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) juga ikut meningkat sebesar 11,56% (yoy).

**Berdasarkan lokasi bank, penyaluran pembiayaan secara nominal masih menunjukan perbaikan.** Penyaluran pembiayaan di Aceh pada triwulan II 2024 tercatat sebesar Rp40,81 triliun, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar Rp39,07 triliun. Sementara itu, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) di triwulan laporan tercatat sebesar 94,14%, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 94,38% (Grafik 4.1).

**Grafik 4.1** Perkembangan Intermediasi Perbankan Aceh (Berdasarkan Lokasi Bank)



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

**Penyaluran pembiayaan berdasarkan lokasi proyek secara nominal juga mengalami peningkatan.** Penyaluran pembiayaan di Aceh berdasarkan lokasi proyek pada triwulan II 2024

tercatat sebesar Rp49,76 triliun, meningkat dari triwulan sebelumnya sebesar Rp48,66 triliun, dengan FDR sebesar 114,77% lebih rendah dari triwulan sebelumnya 117,53% (Grafik 4.2).

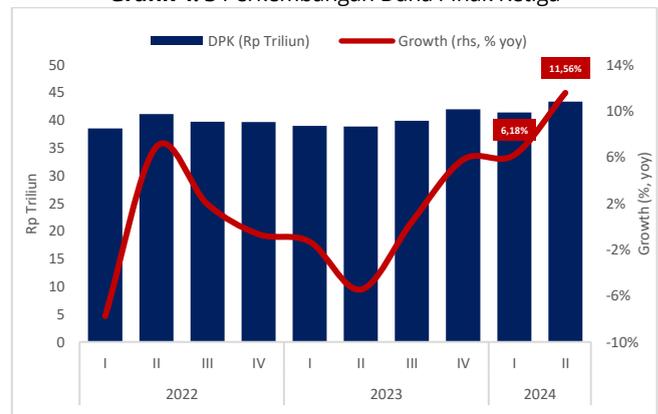
**Grafik 4.2** Perkembangan Intermediasi Perbankan Aceh (Berdasarkan Lokasi Proyek)



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

**Kinerja penghimpunan DPK terpantau mengalami peningkatan.** Pada triwulan II 2024, DPK di Aceh tercatat sebesar Rp43,35 triliun, meningkat dari triwulan sebelumnya sebesar Rp41,39 triliun. Peningkatan secara nominal tersebut juga diiringi dengan meningkatnya pertumbuhan menjadi 11,56% (yoy). Secara umum, DPK di Aceh mengalami tren peningkatan sejak triwulan III tahun 2023 hingga triwulan laporan. Pada triwulan II 2024 DPK pemerintah turut memberikan kontribusi dalam peningkatan DPK di Aceh, seiring peningkatan anggaran pemerintah untuk mendukung penyelenggaraan PON 2024.

**Grafik 4.3** Perkembangan Dana Pihak Ketiga

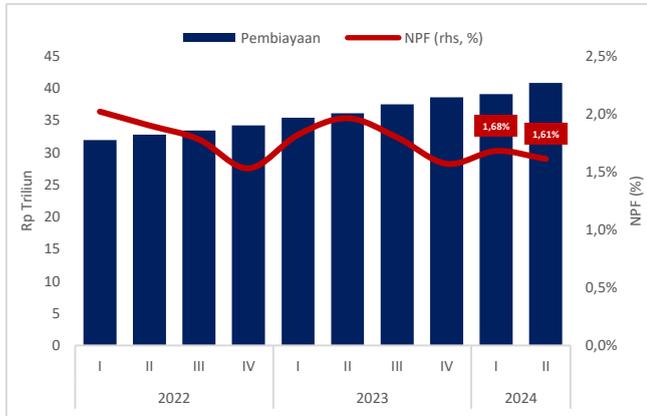


Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

**Pada triwulan laporan, Non Performing Financing (NPF) berdasarkan lokasi bank tercatat mengalami perbaikan dari triwulan sebelumnya.** NPF pada triwulan II 2024 mencapai

1,61%, lebih rendah dibanding triwulan I 2024 yang sebesar 1,68% (Grafik 4.4.), masih berada di bawah *threshold* 5%.

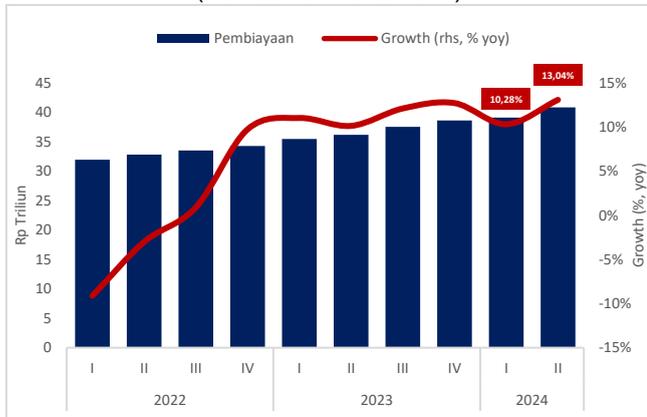
**Grafik 4.4** Perkembangan *Non-Performing Financing* (Berdasarkan Lokasi Bank)



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

**Penyaluran pembiayaan tumbuh positif dari triwulan sebelumnya.** Pertumbuhan pembiayaan kembali menunjukkan tren yang positif yaitu tumbuh sebesar 13,04% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya sebesar 10,28% (yoy).

**Grafik 4.5** Perkembangan Penyaluran Pembiayaan (Berdasarkan Lokasi Bank)



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

**Di sisi lain, pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan dari luar Aceh ke Aceh juga mengalami peningkatan.** Penyaluran pembiayaan berdasarkan lokasi proyek pada triwulan II 2024 tercatat sebesar Rp49,76 triliun, atau tumbuh pada tingkat 1,61% (yoy). Penyaluran pembiayaan tersebut meningkat dari triwulan sebelumnya sebesar Rp48,66 triliun. Namun demikian, secara nominal penyaluran pembiayaan berdasarkan lokasi proyek lebih besar dibandingkan dengan berdasarkan lokasi bank. Hal mengindikasikan bahwa pembiayaan di Aceh masih mengandalkan

sumber dana dari perbankan di luar Aceh.

**Grafik 4.6** Perkembangan Penyaluran Pembiayaan (Berdasarkan Lokasi Proyek)



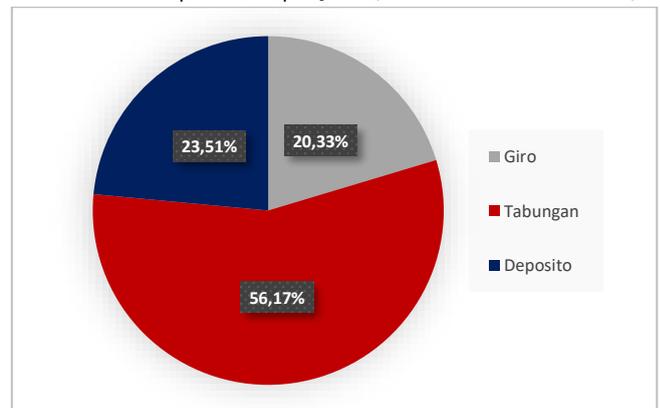
Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

## 4.2. Intermediasi Perbankan

### 4.2.1. DPK Menurut Jenisnya

**Tabungan masih mendominasi komposisi DPK di Aceh.** Pada periode laporan, DPK di Aceh didominasi tabungan dengan proporsi sebesar 56,17%, diikuti deposito sebesar 23,51%, dan giro sebesar 20,33%. Secara nominal, total DPK pada triwulan II 2024 adalah sebesar Rp43,35 triliun, yang terdiri dari tabungan Rp24,35 triliun, deposito Rp10,19 triliun, dan giro sebesar Rp8,81 triliun.

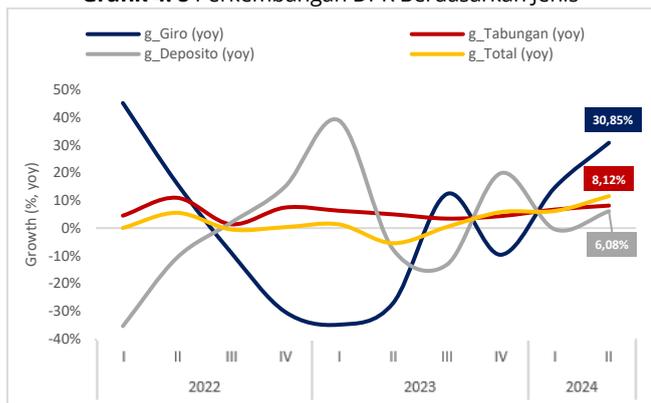
**Grafik 4.7** Proporsi DPK per Jenis (Berdasarkan Lokasi Bank)



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

**Pada triwulan laporan, seluruh jenis DPK mengalami pertumbuhan yang meningkat.** Pada triwulan II 2024, giro menjadi jenis DPK dengan peningkatan tertinggi sebesar 30,85% (yoy), kemudian diikuti oleh tabungan sebesar 8,12% (yoy) dan deposito sebesar 6,08% (yoy).

**Grafik 4. 8** Perkembangan DPK Berdasarkan Jenis

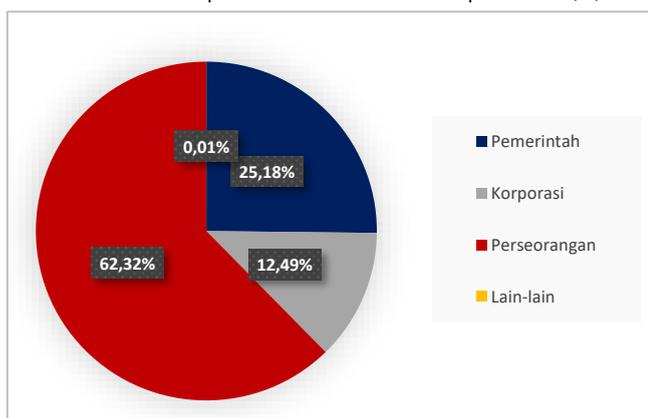


Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

#### 4.2.2. DPK Menurut Kepemilikan

Berdasarkan kepemilikannya, DPK di Aceh masih didominasi oleh kepemilikan perseorangan. DPK milik perseorangan memiliki porsi terbesar yaitu 62,32%. Sementara, DPK milik pemerintah dan korporasi berturut-turut memiliki porsi sebesar 25,18% dan 12,49%.

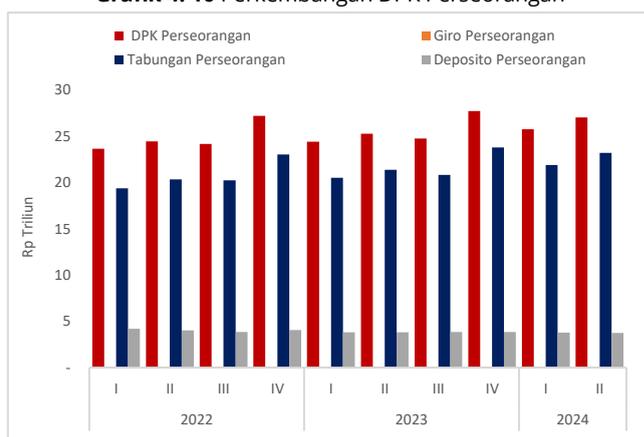
**Grafik 4. 9** Proporsi DPK Berdasarkan Kepemilikan (%)



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

DPK perseorangan pada triwulan laporan terdiri dari giro dengan porsi sebesar 0,26%, deposito sebesar 13,90%, dan tabungan sebesar 85,84%. Secara pertumbuhan, DPK perseorangan dalam bentuk tabungan mengalami peningkatan sebesar 8,53% (yoy). Sementara itu giro dan deposito mengalami penurunan masing-masing sebesar 12,15% (yoy) dan 1,50% (yoy). Peningkatan tabungan mengindikasikan masyarakat cenderung membutuhkan dana dengan likuiditas yang tinggi seiring dengan meningkatnya konsumsi masyarakat.

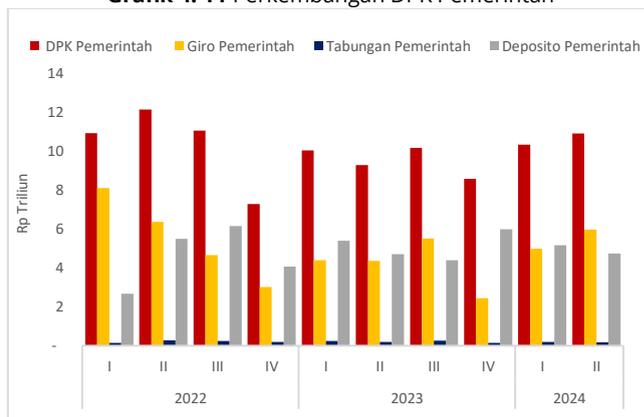
**Grafik 4. 10** Perkembangan DPK Perseorangan



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

**Perkembangan DPK pemerintah pada triwulan laporan masih terjaga.** Pada triwulan laporan, DPK pemerintah tercatat meningkat sebesar 17,51% (yoy). Peningkatan DPK pemerintah didorong oleh peningkatan ketiga jenis DPK. Peningkatan tertinggi terjadi pada giro sebesar 36,73% (yoy), diikuti deposito sebesar 0,81% (yoy). Sementara tabungan mengalami perbaikan pertumbuhan dari triwulan sebelumnya walaupun masih dalam kondisi penurunan, yaitu sebesar 8,94% (yoy). Seiring dengan meningkatnya giro pemerintah dan menurunnya deposito pemerintah menunjukkan bahwa pemerintah melakukan realisasi belanja daerah, hal ini sejalan dengan persiapan penyelenggaraan PON 2024 yang akan berlangsung pada bulan September 2024.

**Grafik 4. 11** Perkembangan DPK Pemerintah

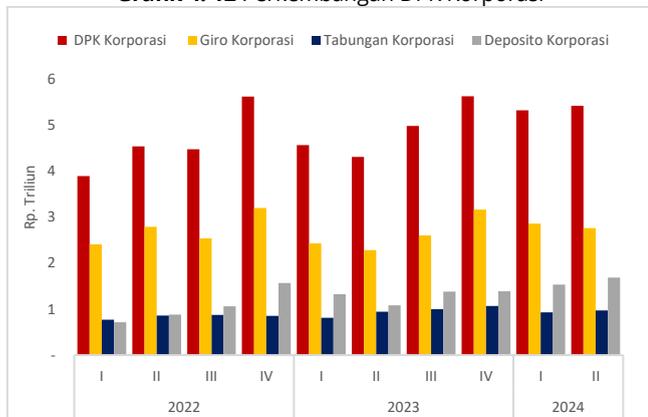


Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

**DPK korporasi masih didominasi oleh giro.** Proporsi DPK korporasi pada triwulan laporan terdiri dari giro sebesar 50,99%, deposito sebesar 31,11%, dan tabungan sebesar 17,90%. DPK korporasi jenis deposito mengalami peningkatan

tertinggi sebesar 55,70% (yoy), diikuti dengan jenis giro sebesar 21,09% (yoy). Sementara DPK korporasi jenis tabungan tumbuh melambat sebesar 2.60% (yoy).

**Grafik 4. 12** Perkembangan DPK Korporasi

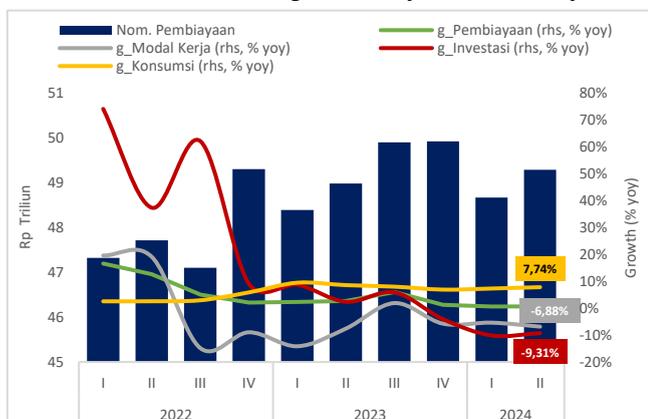


Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

#### 4.2.2. Pembiayaan Berdasarkan Jenis Penggunaan

**Penyaluran pembiayaan di Aceh pada triwulan II 2024 meningkat sebesar 1,61% (yoy). Adapun pembiayaan konsumsi masih mendominasi pembiayaan di Aceh.** Hal ini menunjukkan bahwa penyaluran pembiayaan sektor produktif perlu didorong, utamanya untuk lapangan usaha atau sektor prioritas agar dapat memberikan efek *multiplier* terhadap pertumbuhan ekonomi Aceh. Pertumbuhan pembiayaan di triwulan laporan didorong oleh jenis pembiayaan konsumsi sebesar 7,74% (yoy). Sementara pembiayaan modal kerja dan investasi masih mengalami penurunan secara berturut-turut sebesar -6,88% (yoy) dan -9,31% (yoy).

**Grafik 4. 13** Perkembangan Pembiayaan (Lokasi Proyek)

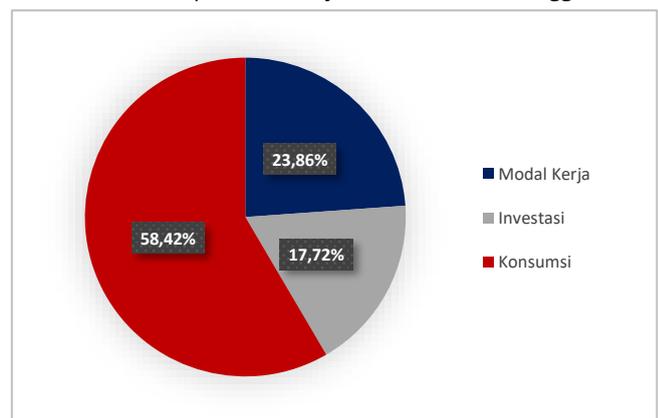


Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Nilai pembiayaan yang bersifat konsumtif memiliki

proporsi sebesar 58,42%, sementara penyaluran pembiayaan di sektor produktif memiliki proporsi sebesar 41,58%. Adapun pembiayaan dari sektor produktif dibagi menjadi dua yaitu pembiayaan investasi dan modal kerja, masing-masing memiliki porsi sebesar 17,72% dan 23,86% dari total pembiayaan pada triwulan laporan. Penyaluran pembiayaan di Provinsi Aceh yang masih didominasi oleh pembiayaan konsumsi yang menunjukkan bahwa pembiayaan ke sektor-sektor produktif belum tersalurkan secara optimal.

**Grafik 4. 14** Proporsi Pembiayaan Berdasarkan Penggunaan



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

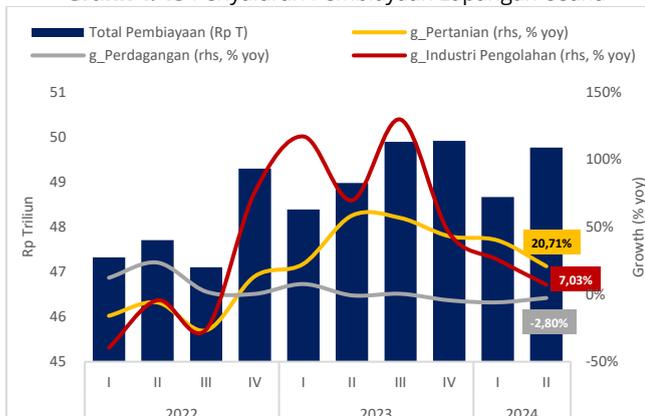
**Peningkatan pembiayaan konsumsi sejalan dengan membaiknya aktivitas konsumsi yang dikonfirmasi oleh hasil Survei Konsumen yang berada pada zona optimis.** Survei Konsumen (SK) Bank Indonesia di Provinsi Aceh mengindikasikan bahwa keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi tetap berada pada zona optimis hingga bulan Juni 2024. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada bulan Juni 2024 tercatat terjaga optimis sebesar 114,71 lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya sebesar 111,29.

#### 4.2.3. Pembiayaan Menurut Lapangan Usaha (LU)

**Pangsa pembiayaan terbesar menurut lapangan usaha didominasi oleh LU Perdagangan Besar dan Eceran.** Pada triwulan II 2024, porsi pembiayaan terhadap LU Perdagangan Besar dan Eceran tercatat 13,02% (yoy). Kinerja pembiayaan yang disalurkan ke LU Perdagangan Besar dan Eceran tercatat menurun -2,80% (yoy), namun tidak sedalam penurunan pada triwulan

sebelumnya yang tercatat -6,03% (yoy). Sementara itu, LU Pertanian dan LU Industri Pengolahan memiliki porsi pembiayaan masing-masing sebesar 9,20% dan 8,89%. Pada triwulan II 2024, kinerja pembiayaan yang disalurkan ke LU Pertanian dan LU Industri Pengolahan tercatat meningkat namun tidak setinggi peningkatan pada triwulan sebelumnya yakni masing-masing sebesar, 20,71% (yoy) dan 7,03% (yoy) lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya LU Pertanian (39,82%, yoy) dan LU Industri Pengolahan (25,50%, yoy).

**Grafik 4. 15** Penyaluran Pembiayaan Lapangan Usaha



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

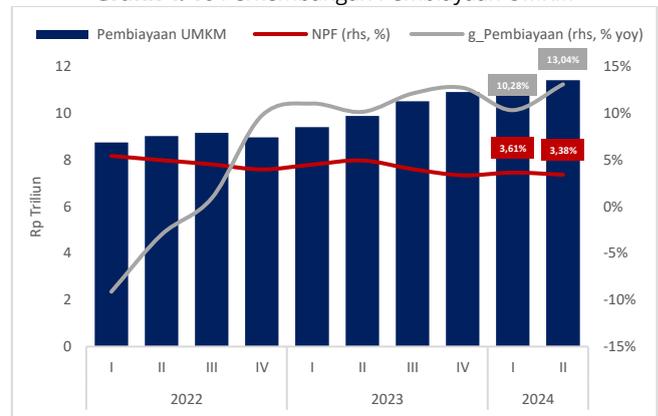
#### 4.2.4. Pembiayaan UMKM

**Pertumbuhan pembiayaan UMKM pada triwulan II 2024 mengalami perlambatan, walaupun secara nominal mengalami peningkatan.** Kinerja pembiayaan yang disalurkan kepada sektor UMKM di Aceh tercatat sebesar 15,57% (yoy) lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 15,68% (yoy). Namun demikian, secara nominal pembiayaan UMKM pada triwulan II mengalami peningkatan sebesar Rp11,40 triliun, lebih tinggi dari triwulan sebelumnya sebesar Rp10,85 triliun. Adapun rasio *Non-Performing Financing* (NPF) pembiayaan UMKM adalah sebesar 3,38%. Sementara itu, rasio pembiayaan UMKM terhadap total pembiayaan di Aceh pada triwulan II 2024 sebesar 27,93%. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat ruang untuk meningkatkan inklusi pembiayaan di Aceh.

**Bank Indonesia terus mendorong realisasi penyaluran pembiayaan UMKM.** Hal ini dilakukan dengan menetapkan target proporsi pembiayaan

UMKM perbankan berdasarkan tahapan tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.24/3/PBI/2022. Selain itu, Bank Indonesia juga berupaya mendorong peningkatan kinerja pembiayaan/kredit UMKM melalui penerbitan kebijakan insentif seperti memperlonggar batasan *Loan to Funding Ratio* sebagaimana diatur dalam PBI No. 24/4/PBI/2022. Sementara itu, di tingkat regional Bank Indonesia melalui Kantor Perwakilan di seluruh wilayah Indonesia juga turut mendorong kinerja UMKM melalui berbagai program pendampingan.

**Grafik 4. 16** Perkembangan Pembiayaan UMKM



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah.

### 4.3. Strategi dalam Mendorong Penyaluran Pembiayaan UMKM di Aceh

**KPw BI Provinsi Aceh melakukan berbagai strategi untuk meningkatkan akses pembiayaan UMKM.** KPw BI Provinsi Aceh secara konsisten terus mendorong peningkatan akses keuangan UMKM untuk mendukung optimalisasi pembiayaan daerah dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan akses pembiayaan UMKM diantaranya melalui program pengembangan UMKM seperti pendampingan dan pelatihan pembuatan laporan keuangan melalui optimalisasi Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan (SIAPIK), survei Database Profil UMKM Potensial Dibiayai (BISAID), dan fasilitasi perluasan akses pasar maupun promosi perdagangan baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Salah satu upaya dalam peningkatan akses pembiayaan UMKM, KPw BI Provinsi Aceh telah melaksanakan kegiatan Festival Meuseuraya. Kegiatan tersebut menghasilkan *business matching* pembiayaan mencapai Rp8,6 miliar dengan melibatkan 4 (empat) perbankan dan 35 UMKM.

Di samping itu, KPw BI Provinsi Aceh menyelenggarakan program pengembangan kapasitas wirausaha melalui Program Pengembangan Wirausaha Unggulan Bank Indonesia (WUBI). Program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah, kapasitas, dan kinerja wirausaha di Provinsi Aceh sehingga dapat naik kelas, terutama bagi wirausaha yang mendukung program pengendalian inflasi Bank Indonesia, mendorong ekspor atau substitusi impor, pariwisata, serta mendukung ekonomi dan keuangan syariah atau mengembangkan produk dan jasa yang merupakan unggulan daerah. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk menciptakan ekosistem wirausaha di Provinsi Aceh yang mendukung upaya percepatan pengembangan usaha sehingga memberikan kontribusi nyata dalam pertumbuhan perekonomian daerah.



## BAB VI

### KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) periode berjalan mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Hal ini sejalan dengan tingkat kemiskinan yang menunjukkan penurunan persentase. Namun demikian, dibandingkan dengan seluruh provinsi di Sumatera, TPT Aceh masih berada pada urutan ketiga, sedangkan kemiskinan masih berada pada peringkat pertama.

## 6.1. Ketenagakerjaan

**Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Aceh menurun.** Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Aceh pada Februari 2024 tercatat 5,56%, mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,75%. Sementara itu, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tercatat sebesar 64,15%, menurun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 65,12%. Hal ini menunjukkan semakin rendah pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan dalam memberikan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja terbesar adalah Lapangan usaha (LU) sektor Pendidikan, Administrasi Pemerintah, dan Pertanian.

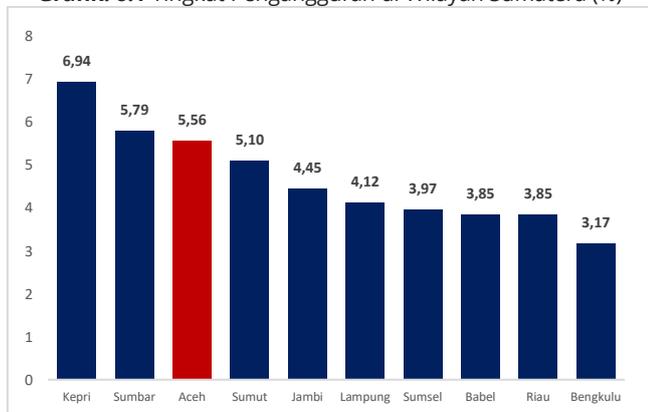
Tabel 6. 1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

	TINGKAT PENGANGGURAN %	
	Februari 2023	Februari 2024
	5,75%	5,56%

Sumber: BPS, diolah

Penurunan TPT disebabkan oleh meningkatnya jumlah angkatan kerja yang disertai dengan peningkatan jumlah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan Angkatan kerja, yaitu mencapai 2,6 juta orang (64,15%).

Grafik. 6.1 Tingkat Pengangguran di Wilayah Sumatera (%)



Sumber: BPS, diolah

Jika dibandingkan dengan provinsi lain di Sumatera, Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Aceh

menduduki peringkat ketiga tertinggi setelah Provinsi Kepulauan Riau dan Sumatera Barat.

Perkembangan ketenagakerjaan di Provinsi Aceh diproyeksikan akan semakin membaik mengingat akan dilaksanakannya PON Aceh – Sumut Tahun 2024 yang akan menyerap tenaga kerja dari sektor konstruksi untuk perbaikan dan pembangunan *venue* pertandingan olahraga, serta bidang lainnya yang mendukung kegiatan nasional tersebut.

Tabel 6. 2. Perkembangan TPT

PENGANGGURAN	2023	2024
	Februari	Februari
<b>Jumlah Angkatan Kerja (orang, dalam ribuan)</b>		
Bekerja	2.599	2.600
Pengangguran	149	145
<b>Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)</b>		
Persentase TPAK (%)	65,12	64,15
<b>Tingkat Pengangguran Terbuka</b>		
TPT (%)	5,75	5,56

Sumber: BPS, diolah

Tabel 6.3. Tenaga Kerja Berdasarkan Sektor

SEKTOR	Februari 2024 (%)
Pertanian, Kehutanan & Perikanan	38,07
Perdagangan Besar & Eceran	16,19
Industri Pengolahan	8,51
Jasa Pendidikan	7,42
Administrasi Pemerintahan	6,73
Konstruksi	6,13
Akomodasi dan Makan Minum	5,71
Jasa Kesehatan dan Kegiatan	2,86

Sumber: BPS, diolah

Lapangan usaha (LU) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan merupakan sektor yang menyerap tenaga kerja dengan porsi terbesar, yaitu mencapai 38,07%. Selanjutnya sektor Perdagangan Besar dan Eceran (16,19%), Industri Pengolahan (8,51%), Jasa Pendidikan (7,42%), dan Administrasi Pemerintahan (6,73%).

Tenaga kerja di Provinsi Aceh saat ini didominasi oleh tenaga kerja dengan tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas. Tingkat pendidikan dapat mengindikasikan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Pada Februari 2024, penduduk bekerja masih didominasi oleh tamatan Sekolah Menengah Atas

yaitu sebesar 34,40%. Sementara itu, penduduk bekerja tamatan Sekolah Dasar ke Bawah sebesar 26,10%, SMP sebesar 19,09%, Universitas sebesar 13,49%, SMK sebesar 3,55%, dan Diploma sebesar 3,37%. Distribusi penduduk bekerja menurut pendidikan masih menunjukkan pola yang sama dengan Februari 2023.

**Tabel 6.4.** Tenaga Kerja Menurut Pendidikan (%)

Pendidikan Tertinggi	Februari	Februari
	2023	2024
Sekolah Menengah Atas	32,25	34,40
Sekolah Dasar ke Bawah	29,58	26,10
Sekolah Menengah Pertama	20,06	19,09
Diploma IV, S1, S2, S3	11,06	13,49
Sekolah Menengah Kejuruan	4,26	3,55
Diploma I/II/III	2,78	3,37

Sumber: BPS, diolah

Tenaga kerja berdasarkan pekerjaan didominasi status pekerjaan Buruh/Karyawan/Pegawai dengan porsi sebesar 31,80%. Sementara itu, status pekerjaan dengan porsi terkecil, yaitu berstatus Pekerja Bebas Non pertanian sebanyak 4,00%. Berdasarkan status pekerjaan utama, penduduk bekerja dapat dikategorikan menjadi kegiatan formal dan informal. Penduduk yang bekerja di kegiatan formal mencakup mereka yang berusaha dengan dibantu buruh tetap/dibayar dan buruh/karyawan/pegawai, sedangkan sisanya dikategorikan sebagai kegiatan informal. Pada Februari 2024, penduduk yang bekerja di kegiatan informal sebanyak 63,19%, sedangkan kegiatan formal sebanyak 36,81%. Dibandingkan Februari 2023, persentase penduduk bekerja pada kegiatan formal mengalami peningkatan 2,31% dan pada kegiatan informal mengalami penurunan sebesar 2,32%.

**Tabel 6.5.** Tenaga Kerja Berdasarkan Pekerjaan

Status Pekerjaan	Februari	Februari
	2023	2024
	Porsi (%)	Porsi (%)
Buruh/Karyawan/Pegawai	30,44%	31,80%
Berusaha Sendiri	23,72%	23,86%

<sup>4</sup> Rasio antara indeks harga diterima dan harga dibayar petani

Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	15,40%	15,65%
Pekerja Keluarga	16,40%	15,07%
Pekerja bebas di pertanian	4,05%	5,01%
Pekerja bebas di nonpertanian	4,41%	4,60%
Berusaha dibantu buruh tetap	5,58%	4,00%

Sumber: BPS, diolah

Nilai Tukar Petani<sup>4</sup> (NTP) pada triwulan II 2024 mengalami peningkatan dibandingkan dengan sebelumnya. Pada triwulan II 2024, NTP tercatat sebesar 118,91 atau mengalami peningkatannya dari triwulan sebelumnya sebesar 116,38. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan tingkat daya beli petani. NTP yang melampaui 100 menunjukkan bahwa penerimaan petani terhadap hasil produksi produksi lebih tinggi dibandingkan pengeluaran petani. Peningkatan NTP terjadi di subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR) dan Peternakan (NTPT).

**Tabel 6.6.** Nilai Tukar Petani



### NILAI TUKAR PETANI (NTP)

Triwulan I 2024 116,38

Triwulan II 2024 118,91 ▲

Sumber: BPS, diolah

## 6.2. Kemiskinan

Berdasarkan data terakhir, persentase kemiskinan pada Maret 2024 tercatat sebesar 14,23%, mengalami penurunan dibandingkan Maret 2023 sebesar 14,45%. Penurunan persentase penduduk miskin didorong oleh penurunan baik di perdesaan maupun perkotaan, di mana persentase penduduk miskin di perdesaan dan perkotaan menurun masing-masing dari 16,92% dan 9,79% pada periode sebelumnya, menjadi 16,75% dan 9,60%.

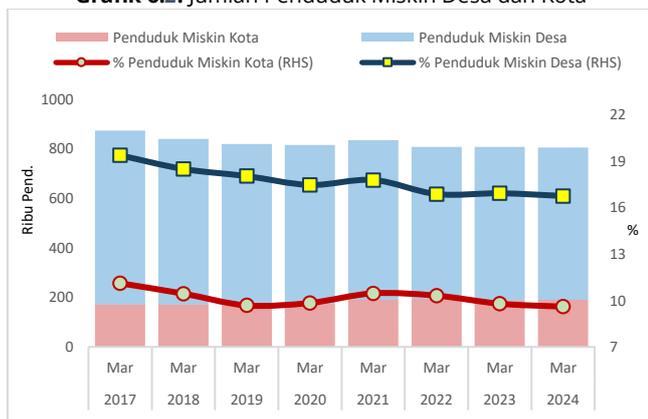
Secara kuantitas, jumlah penduduk miskin di Provinsi Aceh pada posisi Maret 2024 sebanyak 804,53 ribu jiwa, lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya sebanyak

806,75 ribu jiwa. Jumlah penduduk miskin di perdesaan meningkat sebesar -0,58% (yoy) dari sebelumnya 617,56 ribu jiwa pada Maret 2023 menjadi 613,98 ribu jiwa pada Maret 2024. Sementara itu, jumlah penduduk miskin di perkotaan mengalami peningkatan terbatas sebesar 0,73% (yoy), dari sebelumnya 189,16 ribu jiwa pada Maret 2023 menjadi 190,55 ribu jiwa pada Maret 2024.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh semakin membaik, perlahan meningkatkan optimisme pemulihan pasca pandemi yang diharapkan dapat terus menurunkan angka kemiskinan. Berdasarkan hasil Survei Konsumen Bank Indonesia per Agustus 2024, Indeks Penghasilan dan Ketersediaan Lapangan Pekerjaan masih berada di atas 100, yaitu 144,86 dan 103,71. Hal ini mengindikasikan masyarakat optimis akan pendapatan dan ketersediaan lapangan pekerjaan di saat ini.

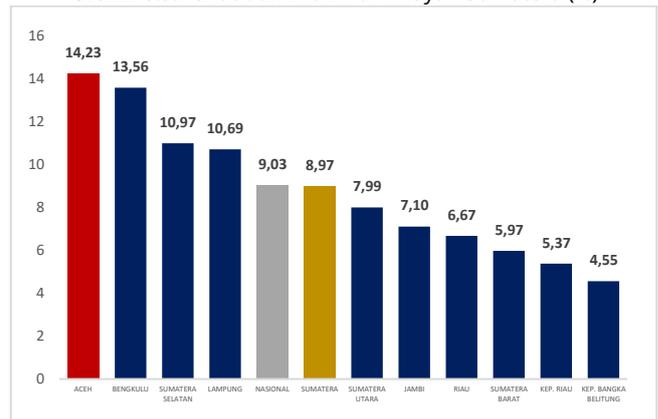
Data tingkat kemiskinan pada Maret 2024 menunjukkan Aceh masih menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Sumatera dengan porsi sebesar 14,23%. Nilai tersebut lebih tinggi dibanding rata-rata tingkat kemiskinan di Sumatera (8,97%) dan Nasional (9,03%).

**Grafik 6.2.** Jumlah Penduduk Miskin Desa dan Kota



Sumber: BPS, diolah

**Grafik 6.3.** Penduduk Miskin di Wilayah Sumatera (%)



Sumber: BPS, diolah

Penurunan persentase kemiskinan juga turut memengaruhi sebaran garis kemiskinan di Provinsi Aceh. Hasil survei di Provinsi Aceh, pada periode September 2023 – Maret 2024, garis kemiskinan mengalami peningkatan sebesar 5,37% (yoy) sehingga pendapatan per kapita per bulan menjadi Rp661.227,- dari sebelumnya sebesar Rp627.534,- per kapita per bulan. Kontribusi komponen makanan masih memberikan andil terbesar terhadap Nilai Garis Kemiskinan baik di Perkotaan maupun Perdesaan yakni sebesar Rp501.403,- per kapita per bulan sementara komponen bukan makanan sebesar Rp159.824,- per kapita per bulan.

Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK) yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), terlihat bahwa peranan komoditas makanan sebesar 74,61% di perkotaan dan 76,58% di perdesaan. Beberapa komoditas utama yang memberikan sumbangan besar terhadap kenaikan garis kemiskinan baik di perdesaan maupun di perkotaan yaitu beras, rokok kretek filter, tongkol/tuna, telur ayam ras, dan kue basah. Sementara peranan komoditas bukan makanan berkontribusi sebesar 25,39% di perkotaan dan 23,42% di perdesaan.

Selain jumlah dan persentase penduduk miskin, terdapat hal lain yang perlu diperhatikan yaitu seberapa besar jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan (tingkat kedalaman) yang disebut dengan P1 dan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin (tingkat keparahan) yang disebut dengan P2.

**Tabel 6.7.** Indeks Kedalaman (P1) dan Keparahan (P2) Kemiskinan

<b>KEMISKINAN (%)</b>		
MARET 2023	14,45	▼
MARET 2024	14,23	
<b>INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN (P1)</b>		
MARET 2023	2,763	▼
MARET 2024	2,620	
<b>INDEKS KEPARAHAN KEMISKINAN (P2)</b>		
MARET 2023	0,776	▼
MARET 2024	0,712	

Sumber: Data BPS, diolah

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) pada periode Maret 2023 tercatat mengalami penurunan dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya. P1 mengalami penurunan dari 2,763 pada Maret 2023 menjadi 2,620 pada Maret 2024. Begitu pula dengan P2 yang mengalami penurunan setelah sebelumnya 0,776 pada Maret 2023 menjadi 0,712 pada Maret 2024. Turunnya nilai Indeks kedalaman kemiskinan ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan. Begitu juga dengan kondisi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin cenderung semakin menyempit.

**Tabel 6.8.** Indeks Kemiskinan (P1 dan P2)

Daerah	2023		2024	
	MARET		MARET	
	P1	P2	P1	P2
Perkotaan	1,932	0,545	1,581	0,401
Perdesaan	3,204	0,898	3,182	0,881
Gabungan	2,763	0,776	2,620	0,712

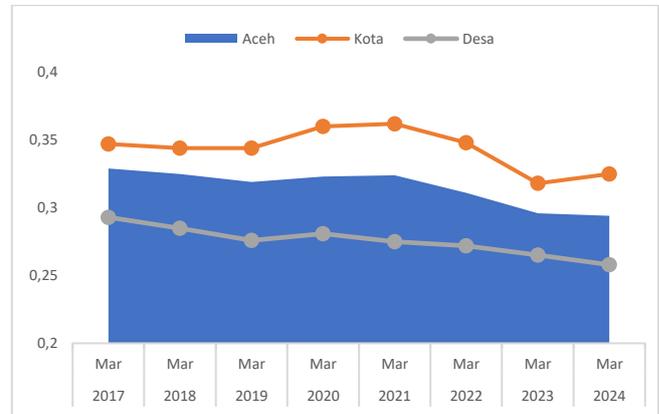
Sumber: Data BPS, diolah

Dalam pengukuran ketimpangan/kesenjangan pengeluaran penduduk, digunakan indikator Rasio Gini<sup>5</sup>. Berdasarkan daerah, Rasio Gini pada perkotaan pada Maret 2024 sebesar 0,325, sedangkan pada perdesaan sebesar 0,258. Terjadi peningkatan rasio di perkotaan dan penurunan rasio di perdesaan pada periode Maret 2024 dibandingkan periode yang sama tahun

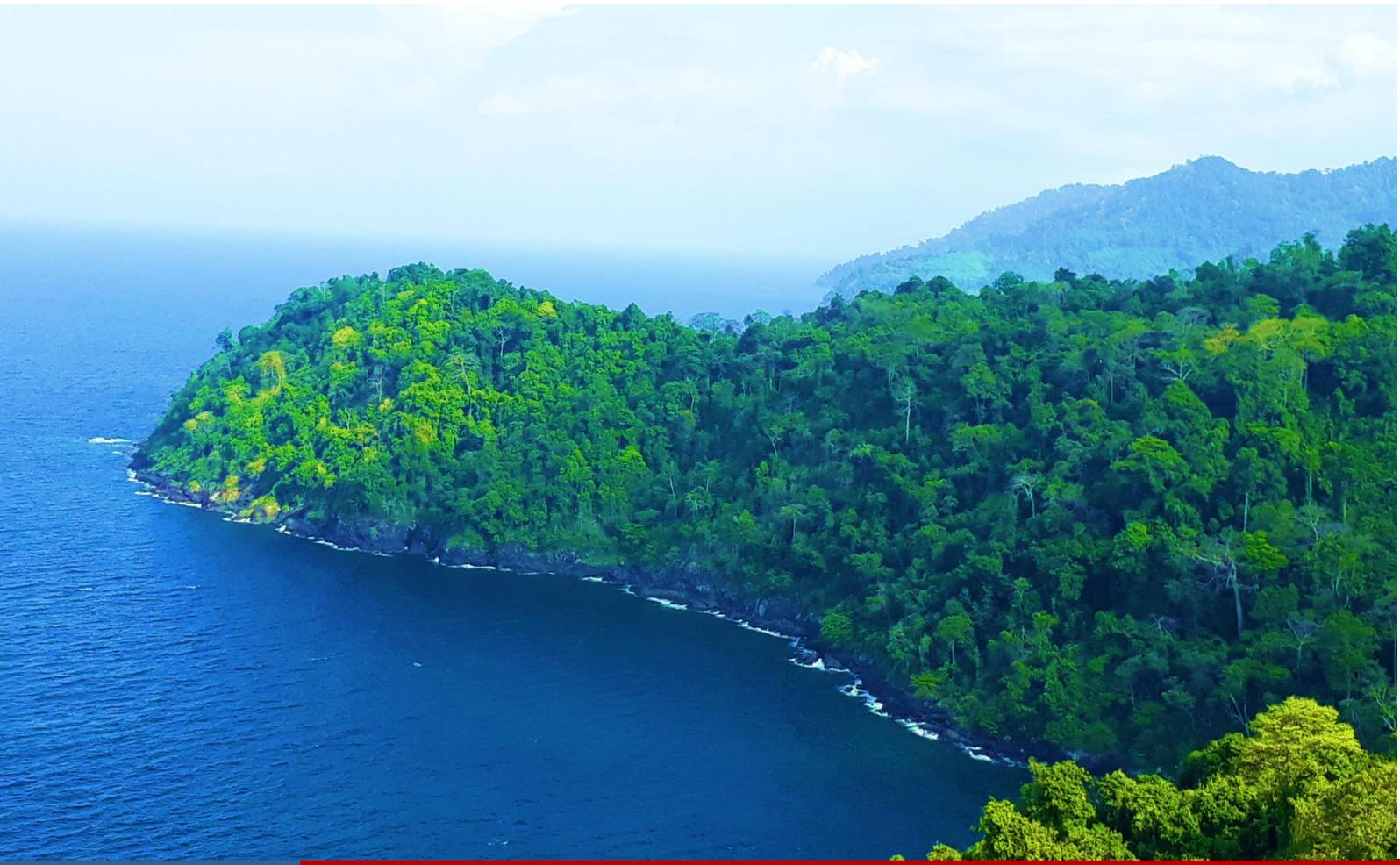
<sup>5</sup>Nilai Rasio Gini berkisar antara 0-1.Semakin besar nilai menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi

sebelumnya. Hal tersebut mendorong secara keseluruhan Rasio Gini Provinsi Aceh mengalami penurunan menjadi sebesar 0,296 pada Maret 2024 dari sebesar 0,294 pada periode yang sama tahun sebelumnya.

**Grafik 6.4.** Perkembangan Rasio Gini di Provinsi Aceh Menurut Daerah



Sumber: BPS, diolah



## BAB VII

# PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH

Kinerja perekonomian Provinsi Aceh pada tahun 2024 diperkirakan tumbuh pada kisaran 4,24%-5,04% (yoy) atau berpotensi lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya (4,23%, yoy). Membaiknya pertumbuhan ekonomi tersebut dipengaruhi oleh peningkatan kinerja konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah di tengah penyelenggaraan Pemilu 2024 dan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumatera Utara 2024. Sementara itu, laju inflasi tahun 2024 diperkirakan berada kisaran sasaran inflasi nasional sebesar  $2,5 \pm 1\%$ . Prospek terkendalinya inflasi Provinsi Aceh pada tahun 2024 didukung oleh berbagai kebijakan pengendalian inflasi yang dilakukan oleh TPIP dan TPID se-Aceh.

## 7.1. Prospek Makroekonomi

**Di sisi global, kinerja pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2024 diperkirakan akan tumbuh stabil dibandingkan tahun 2023.**

Berdasarkan *World Economic Outlook Update : The Global Economy in a Sticky Spot* oleh International Monetary Fund (IMF) pada bulan Juli 2024, perekonomian global tahun 2024 diperkirakan akan tumbuh sebesar 3,2% (yoy) (Tabel 7.1). Pertumbuhan didukung oleh aktivitas global dan perdagangan dunia yang meningkat pada pergantian tahun, perdagangan didorong oleh kuatnya ekspor dari Asia, khususnya di sektor teknologi. Negara-negara maju diperkirakan akan tumbuh stabil, sedangkan negara-negara berkembang diperkirakan akan sedikit melambat pada tahun 2024.

**Tabel 7.1** *Global Economic Growth Outlook (%yoy)*

Wilayah	2023	2024*
World Output	3,3	3,2
Advance Economies	1,7	1,7
United States	2,5	2,6
Euro Area	0,5	0,9
Japan	1,9	0,7
United Kingdom	0,1	0,7
Emerging Market	4,4	4,3
China	5,2	5,0
India	8,2	7,0

Sumber: International Monetary Fund (IMF)

Proyeksi IMF didasarkan pada revisi ke atas terhadap harga komoditas, termasuk kenaikan harga non-bahan bakar sebesar 5% pada tahun 2024. Harga komoditas energi diperkirakan akan turun sekitar 4,6% pada tahun 2024, lebih rendah dari proyeksi bulan April, yang mencerminkan kenaikan harga minyak akibat pemotongan produksi OPEC+ dan tekanan harga akibat konflik Timur Tengah. Suku bunga kebijakan moneter bank-bank sentral utama diperkirakan masih mengalami penurunan pada paruh kedua tahun 2024, dengan perbedaan kecepatan normalisasi yang mencerminkan kondisi inflasi yang bervariasi.

Inflasi diperkirakan melambat akibat inflasi harga jasa yang lebih persisten dan harga komoditas lebih tinggi. Namun, pelemahan pasar tenaga kerja secara bertahap, bersamaan dengan perkiraan penurunan harga energi, akan membawa inflasi umum kembali ke targetnya pada akhir tahun 2025. Inflasi diperkirakan akan tetap lebih tinggi di negara-negara berkembang dibandingkan di negara-negara maju.

**Perekonomian Indonesia pada tahun 2024 diperkirakan tumbuh menguat.**

Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan ditopang oleh konsumsi baik rumah tangga maupun pemerintah sejalan dengan penyelenggaraan Pemilu 2024. Investasi juga diperkirakan membaik didorong berlanjutnya penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN). Di samping itu, restrukturisasi ekspor yang kini lebih mengarah pada *processing product* juga diyakini dapat memperkuat struktur ekspor Indonesia. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan dalam kisaran 4,7%-5,5% pada 2024. Walaupun demikian, terdapat berbagai risiko yang harus diwaspadai diantaranya tantangan ekonomi global yang makin bergejolak akibat meningkatnya fragmentasi geopolitik yang terus memanas hingga saat ini.

**Sejalan dengan membaiknya pertumbuhan ekonomi Nasional, ekonomi Aceh pada tahun 2024 juga diperkirakan tumbuh membaik pada kisaran 4,24%-5,04% (yoy).**

Membaiknya pertumbuhan ekonomi didorong oleh meningkatnya aktivitas ekonomi Provinsi Aceh sebagai dampak dari penyelenggaraan Pemilu 2024 dan Pekan Olahraga Nasional (PON) Aceh-Sumatera Utara tahun 2024. Dari sisi pengeluaran, perbaikan kinerja ekonomi Provinsi Aceh diperkirakan didorong oleh komponen konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, PMTB, dan ekspor luar negeri. Sedangkan dari sisi LU, laju pertumbuhan ekonomi akan didorong oleh peningkatan LU Pertambangan, LU Kontruksi, serta LU Transportasi dan Pergudangan.

Pertumbuhan komponen konsumsi rumah tangga didorong oleh penyelenggaraan Pekan Olahraga

Nasional (PON) Aceh-Sumatera Utara 2024 dan Pemilu 2024 yang berpotensi meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Walaupun demikian, resiko inflasi yang lebih tinggi pada tahun 2024 dapat berpotensi menahan konsumsi masyarakat. Berdasarkan Survei Konsumen Bank Indonesia Provinsi Aceh pada Juli 2024 mengindikasikan bahwa konsumen masih optimis terhadap kondisi ekonomi. Lebih lanjut, Nilai Tukar Petani (NTP) pada Juli 2024 tercatat sebesar 120,46, lebih tinggi dibandingkan Juni 2024 sebesar 118,91 yang dipengaruhi oleh naiknya harga gabah kualitas GKP pada tingkat petani dan penggilingan.

Sementara, pertumbuhan konsumsi pemerintah pada 2024 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini didorong oleh penyelenggaraan Pemilu 2024 dan Pekan Olahraga Nasional (PON) Aceh-Sumatera Utara 2024. Anggaran penyelenggaraan Pemilu 2024 di Provinsi Aceh berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Aceh sebesar Rp 62,01 Miliar. Sementara itu, berdasarkan data Pemerintah Aceh, total biaya persiapan dan penyelenggaraan PON Aceh-Sumatera 2024 mencapai Rp 802,28 Miliar dengan rincian Rp 18,78 Miliar untuk keperluan non-konstruksi dan Rp 783,50 Miliar untuk keperluan konstruksi. Disisi lain, berdasarkan informasi dari Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Aceh, terdapat peningkatan pagu anggaran APBD. Rencana anggaran belanja Aceh tahun 2024 sebesar Rp40,68 Triliun, lebih tinggi dibandingkan anggaran belanja pada tahun 2023 sebesar Rp38,91 Triliun.

Pertumbuhan PMTB/investasi pada tahun 2024 diperkirakan juga lebih tinggi dibandingkan tahun 2023. Hal ini didorong oleh percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang akan dilanjutkan pada tahun 2024 diantaranya finalisasi Jalan Tol Sigli-Banda Aceh, Bendungan Kereuto, Bendungan Rukoh, dan Daerah Irigasi Lhock Guci serta Daerah Irigasi Jambo Aye Kanan. Selain pembangunan PSN, persiapan penyelenggaraan PON Aceh-Sumatera Utara 2024 juga berpotensi mendorong kinerja investasi di tahun 2024. Walaupun demikian, terdapat penghapusan beberapa proyek Jalan Tol

Trans Sumatera (JTTS) di Provinsi Aceh dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yaitu Jalan Tol Langsa-Lhokseumawe dan Lhokseumawe-Sigli yang berpotensi menahan laju PMTB pada tahun 2024.

Sementara itu, ekspor luar negeri secara keseluruhan tahun 2024 diperkirakan mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan kinerja pada tahun 2023. Hal ini didorong oleh normalisasi harga komoditas ekspor utama Aceh seperti batu bara, kopi, dan minyak kelapa sawit. Berdasarkan proyeksi harga komoditas dunia yang dirilis oleh Bank Dunia, harga batu bara tahun 2024 diperkirakan mengalami penurunan dari 88,35 USD/metric ton pada 2023 menjadi 76,16 USD/metric ton pada tahun 2024. Harga kopi arabika diperkirakan mengalami peningkatan menjadi BRL 1.159,57/bag pada tahun 2024 dibandingkan BRL 952,50/bag pada tahun 2023. Lebih lanjut, harga CPO diperkirakan sedikit menguat menjadi USD 851,79/ metric ton pada tahun 2024 dibandingkan USD 841,20/ metric ton pada tahun 2023.

Dari sisi LU, perkiraan akselerasi pertumbuhan ekonomi tahun 2024 utamanya didorong oleh positifnya kinerja LU Transportasi dan Pergudangan, LU Konstruksi, serta LU Pertambangan. Secara umum, perkiraan kinerja positif pada LU Transportasi dan Pergudangan didukung oleh penyelenggaraan Pemilu 2024 dan Pekan Olahraga Nasional (PON) Aceh-Sumatera Utara 2024 yang berpotensi mendorong mobilitas masyarakat baik dari dalam maupun luar Aceh. Sementara itu, kinerja LU Pertambangan dan Penggalian diperkirakan akan membaik sejalan dengan perbaikan harga komoditas batubara dan dicabutnya larangan ekspor komoditas batubara.

Selanjutnya, LU Perdagangan diperkirakan akan masih akan tumbuh tinggi. Hal ini didorong oleh meningkatnya konsumsi rumah tangga dan penyelenggaraan Pemilu 2024 dan PON Aceh-Sumatera Utara 2024. Walaupun demikian, kinerja LU Perdagangan akan sedikit terdeselerasi akibat adanya resiko inflasi yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara, LU Transportasi dan Pergudangan diperkirakan akan melanjutkan pertumbuhan dari tahun sebelumnya. Kinerjanya yang membaik sejalan dengan penyelenggaraan Pemilu 2024 dan PON Aceh-Sumatera Utara 2024. Dari sisi angkutan udara, tren peningkatan penerbangan domestik diperkirakan akan masih berlanjut di tahun 2024.

## 7.2. Prospek Inflasi

Berdasarkan prakiraan dari *The International Monetary Fund* (IMF), inflasi global diperkirakan menurun dari 6,7% (yoy) pada 2023 menjadi 5,9% (yoy) pada 2024 dan kembali menurun menjadi 4,4% (yoy) pada 2025. Angka tersebut masih berada di atas level pra-pandemi dengan kisaran 3,5% (yoy) pada tahun 2017-2019. Inflasi diperkirakan melambat sejalan dengan penurunan harga komoditas pangan dan energi. Sementara itu, inflasi domestik diperkirakan akan kembali ke dalam rentang target inflasi  $2,5\pm 1\%$  (yoy).

**Secara keseluruhan tahun 2024, laju inflasi Provinsi Aceh diperkirakan tetap terjaga dan berada di sekitar batas atas sasaran inflasi nasional sebesar  $2,5\pm 1\%$  (yoy).** Pada tahun 2024, terjadi perubahan tahun dasar dari 2018 menjadi 2022 dan penambahan 2 kota IHK baru di Provinsi Aceh yaitu Kab. Aceh Tengah dan Kab. Aceh Tamiang. Realisasi inflasi tahun kalender sampai dengan periode Mei 2024 tercatat sebesar 3,32% (yoy). Inflasi berpotensi untuk kembali meningkat pada tahun 2024, sejalan dengan prospek peningkatan inflasi *volatile food* sejalan dengan meningkatnya permintaan masyarakat di tengah penyelenggaraan Pemilu 2024 dan PON Aceh-Sumatera Utara 2024.

Dari sisi komoditas bahan makanan, terdapat risiko efek pergeseran musim panen akibat El Nino yang terjadi pada tahun 2023 khususnya untuk komoditas beras yang masih terus naik hingga saat ini. Sementara dari sisi barang yang harganya diatur oleh Pemerintah, terdapat risiko kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok sebesar 10 persen dan cukai rokok elektrik sebesar 15 persen pada 2024. Penetapan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 191 dan

192 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas PMK Nomor 192/PMK.010/2021. Selain itu, terdapat juga risiko kenaikan inflasi tahunan akibat kenaikan tarif PDAM sebesar 30% di Banda Aceh yang berpotensi mendorong inflasi sisi barang yang harganya diatur oleh Pemerintah.

Inflasi Provinsi Aceh pada 2024 diperkirakan akan lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2023. Walaupun demikian, berbagai program yang dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Aceh seperti GNPIP (Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan) terus dilakukan untuk menjaga inflasi agar tetap stabil dan terkendali. Selanjutnya, strategi pengendalian inflasi melalui 4K (Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) terus digalakkan dalam rangka mengendalikan inflasi agar tetap berada pada sasaran  $2,5\pm 1\%$ .

## 7.3. Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan kondisi ekonomi Aceh yang telah dipaparkan di atas, terdapat beberapa rekomendasi terkait upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi sebagai berikut:

### Pertumbuhan Ekonomi

- Mengurangi tingginya angka kemiskinan Aceh serta peningkatan serapan tenaga kerja** melalui langkah taktis replikasi *piloting* pengembangan kelompok subsisten melalui sinergi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan, dan pemangku kebijakan terkait lainnya. Terdapat beberapa tahapan dalam usulan *piloting* tersebut, antara lain: (i) *Initial assessment*: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) dan Dinas Sosial (Dinsos) melakukan *initial assessment* terkait kelompok potensial yang akan dilakukan *piloting* pengembangan kelompok subsisten; (ii) *Implementing partner*: Dinas Koperasi dan UMKM (Diskopukm), DPMG bersama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) mengidentifikasi *implementing partner* yang potensial

di Aceh (industri yang mampu menjadi *off-taker*) termasuk potensi pemanfaatan BUMG di gampong-gampong; (iii) Pendampingan: BI, OJK, Kemenkeu dan OPD teknis melakukan pembinaan teknis pengembangan usaha kepada kelompok subsisten terpilih terkait dengan pemberdayaan ekonomi, perluasan akses, dan literasi keuangan, serta harmonisasi kebijakan; (iv) Pendampingan (lanjutan): fasilitasi promosi produk dari *implementing partner* daerah; (v) Monev: monitoring dan evaluasi pelaksanaan oleh seluruh pihak terkait; dan (vi) Replikasi: replikasi *success story* yang telah dilaksanakan secara *rapid* di berbagai kabupaten/kota.

2. **Mendorong pengembangan dan implementasi *green economy* dalam pembangunan berkelanjutan di Aceh.**

*Green Economy* adalah suatu gagasan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat, sekaligus mengurangi risiko kerusakan lingkungan secara signifikan, atau juga dapat diartikan sebagai aktivitas perekonomian yang sedikit atau tidak menghasilkan emisi gas-gas rumah kaca terhadap lingkungan, hemat sumber daya alam, dan berkeadilan sosial. Adapun pengembangan ekonomi berbasis komoditas hijau mencakup penerapan *Good Agricultural Practices*, sertifikasi komoditas pertanian, perkebunan, serta perikanan, pengembangan industri hilir dan usaha turunan, perbaikan rantai pasok dan rantai nilai, dukungan kemitraan dan permodalan, optimalisasi komoditas dengan Indikasi Geografis, serta mendorong intervensi yang bersifat spesifik terhadap komoditas unggulan di Aceh seperti kopi, kelapa sawit, nilam, pala, dan karet.

3. **Mengakselerasi Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah.** Sebagai daerah yang memiliki kekhususan menerapkan syariat Islam dalam seluruh aspek, termasuk ekonomi, potensi ekonomi dan keuangan syariah di Provinsi Aceh cukup besar. Namun, potensi yang besar tersebut dinilai belum dioptimalkan dengan baik. Diperlukan perhatian khusus serta kolaborasi

antar pemangku kebijakan terutama dalam bidang keuangan syariah, industri halal, keuangan sosial syariah, dan ekonomi pesantren.

4. **Dualisme sertifikasi produk halal di Aceh.**

Berdasarkan Undang-Undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal bertugas untuk menerbitkan sertifikasi halal produk. Sementara Qanun Aceh No.8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal menyatakan sertifikasi produk halal di Aceh diterbitkan oleh LPPOM MPU Aceh. Hingga saat ini proses sertifikasi halal di Aceh masih melalui LPPOM MPU, namun masyarakat yang memerlukan sertifikasi halal nasional masih belum dapat memilikinya. Pemerintah Pusat perlu memberikan perhatian terhadap tumpang tindih regulasi sertifikasi halal yang ada di Aceh. Sebab kedua dasar hukum yang digunakan merupakan peraturan yang sah.

5. **Perlunya mendorong penyaluran KUR dan UMi di Aceh untuk meningkatkan pembiayaan.**

Penyaluran dapat diprioritaskan sesuai dengan program Pemerintah Aceh melalui peningkatan pembiayaan di sektor pertanian dan perikanan. Hal tersebut dapat diwujudkan salah satunya melalui upaya mendorong perbankan untuk lebih memprioritaskan pemberdayaan UMKM yang potensial dengan memperbesar porsi pembiayaan di tahun 2024.

6. **Mendorong percepatan pemulihan ekonomi melalui penguatan lapangan usaha Industri Pengolahan.**

Potensi pada sektor hulu yang dimiliki Aceh bisa dioptimalkan untuk mendorong sektor industri pengolahan sebagai sektor yang aman untuk dibuka, memiliki daya ungkit, menyerap tenaga kerja serta memberikan *multiplier effect* yang besar. Pemetaan pohon industri dari masing-masing komoditas unggulan serta kajian teknis mengenai potensi dari tiap pohon industri mutlak dibutuhkan agar tidak terjadi *jumping*

lapangan usaha dari LU pertanian, perikanan dan kehutanan ke LU perdagangan besar dan eceran, tanpa melalui penambahan nilai yang dapat diberikan oleh LU industri pengolahan. Hal ini penting agar Provinsi Aceh tidak kehilangan nilai tambah yang seharusnya bisa diciptakan oleh industri pengolahan.

**7. Mendorong model bisnis *sharing factory* dalam rangka mendorong UMKM dan Industri.**

Kawasan industri yang telah dimiliki oleh Pemerintah Daerah seperti KIA Ladong berpotensi untuk diarahkan menjadi *sharing factory* yang bisa menjadi rumah produksi bersama bagi UMKM-UMKM di Aceh untuk menciptakan nilai tambah dan produk yang berdaya saing. *Sharing factory* berpotensi membantu para pelaku UMKM yang tidak memiliki modal kerja tinggi untuk mengembangkan usahanya karena semua fasilitas dasar akan disediakan oleh pengelola sentra industri. Model *sharing factory* juga sudah diterapkan di beberapa daerah dan mampu meningkatkan kualitas produk dan kapasitas UMKM.

**8. Memperkuat peran Tim Percepatan & Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di setiap daerah**

untuk mendukung ekosistem keuangan digital di Aceh. Transaksi non tunai/digital diharapkan dapat menjaga *demand* masyarakat, sehingga roda perekonomian dapat terus berputar. Transaksi non tunai/digital juga diperkirakan akan terus meningkat pasca pandemi sebagai penopang pemulihan ekonomi daerah. Di lingkungan Pemerintah Daerah, Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETPD) juga perlu diakselerasi melalui sinergi pemerintah daerah, Bank Indonesia, Perbankan, serta pihak terkait lainnya.

**9. Memperkuat peran Satgas percepatan investasi atau *Regional Investment Relations Unit (RIRU) Aceh*.**

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan diperlukan keterlibatan investasi swasta dalam menggerakkan roda perekonomian. Dalam hal

ini, peran Satgas percepatan investasi menjadi penting dan perlu ditingkatkan dalam mengidentifikasi proyek *clean and clear*, mengikuti *event* promosi investasi, memetakan calon investor potensial, serta memperkuat peran media dalam memperkenalkan proyek-proyek investasi kepada calon investor potensial.

## Inflasi

Pada tahun 2024, tekanan inflasi diperkirakan akan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk itu, perlu dilakukan langkah antisipatif yang bersifat struktural maupun *seasonal* untuk mengendalikan inflasi agar berada pada sasaran yang ditetapkan  $2,5\% \pm 1\%$ . TPID Provinsi Aceh secara konsisten melakukan berbagai program pengendalian inflasi yang mengacu pada strategi 4K, antara lain:

1. **Ketersediaan Pasokan** antara lain melalui aktivitas peningkatan produksi di daerah sentra dengan optimalisasi *Good Agriculture Practices*, replikasi *best practice*, dan hilirisasi pangan, penerapan *urban farming* dan pemanfaatan inovasi teknologi budidaya pertanian untuk peningkatan produktivitas komoditas pangan strategis, pemberian bantuan sarana prasarana di sisi hulu untuk mendukung peningkatan produksi dan menjaga pasokan, serta mengakselerasi program KAD untuk komoditas pangan strategis antara daerah sentra dan non sentra.
2. **Keterjangkauan Harga melalui stabilisasi harga pangan strategis yaitu,** dengan melanjutkan program sinergi operasi pasar/pasar murah yang dilaksanakan secara terjadwal dan serentak. Di samping itu, melaksanakan program Subsidi Ongkos Angkut (SOA) untuk komoditas pangan yang bergejolak (*volatile food*).
3. **Kelancaran Distribusi melalui peningkatan konektivitas antar daerah.** Peningkatan konektivitas antar daerah untuk mendukung kelancaran pergerakan logistik bahan pangan diantaranya dilakukan melalui pemanfaatan tol laut, fasilitasi kerjasama UMKM pangan dengan *e-commerce*, dan optimalisasi pemanfaatan *cold*

storage untuk komoditas perikanan.

4. **Komunikasi Efektif melalui peningkatan akses informasi serta transparansi terkait harga antar daerah, peningkatan kapasitas dan koordinasi TPID Provinsi dan Kab/Kota, serta penguatan pengendalian ekspektasi inflasi.** Peningkatan akses informasi serta transparansi terkait harga antar daerah yakni, dengan pemanfaatan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) sebagai referensi dalam rekomendasi kebijakan, Selanjutnya, peningkatan kapasitas dan koordinasi dilakukan melalui penyusunan peta jalan pengendalian inflasi Kab/Kota, pelaksanaan *High Level Meeting* TPID, dan pelaksanaan *Capacity Building* TPID. Terakhir, pengendalian ekspektasi inflasi dilakukan dengan bersinergi dengan media dalam rangka menjaga ekspektasi masyarakat.
5. **Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Aceh** secara garis besar terdiri dari program jangka pendek (*quick wins*) dan program jangka panjang (*long term*). Program *quick wins* berupa kerjasama antar daerah (KAD) dan operasi pasar/pasar murah. Sementara itu, program *long-term* diarahkan untuk ketahanan pangan dalam bentuk pengembangan klaster pangan. Selain itu, terdapat program komunikasi dalam bentuk Iklan Layanan Masyarakat (ILM) seperti belanja bijak berbelanja maupun himbuan pemanfaatan sumber pangan alternatif.
6. **Mewujudkan ketahanan pangan di Aceh** untuk menjadikan Aceh sebagai daerah produsen pertanian yang menerapkan pertanian modern dan perekonomian sirkular. Secara garis besar, terdapat empat program utama dalam mewujudkan hal tersebut, kemandirian pupuk di tingkat petani, kemandirian bibit di tingkat produsen, informasi *scheduling* tanam, dan penyimpanan. i) Kemandirian Pupuk (Petani) dilakukan melalui pengembangan pupuk organik mandiri untuk pemenuhan kebutuhan sendiri (*self-sufficiency*). Dibutuhkan kapasitas,

standarisasi dan legalitas yang cukup serta mumpuni untuk pengembangannya. Salah satu contoh implementasinya melalui pengembangan pupuk dengan dekomposer. ii) Kemandirian Bibit (Produsen bibit), bibit cabai merah keriting (CMK) yang dikenal dengan udeng atau odeng dan cabai merah varietas Bemeri adalah varietas cabai lokal unggul berasal dari Kab. Bener Meriah, Provinsi Aceh. Permasalahan yang muncul dalam proses pembibitan varietas lokal di atas adalah masih terbatasnya petani di Aceh yang membudidayakan varietas tersebut. Selain itu, kualitas bibit yang dibuat masih kurang baik. Masih perlu dilakukan pemuliaan tanaman agar konsistensi bibit yang dihasilkan sesuai standar dan berkualitas. Kementerian Pertanian dapat membantu proses pengembangan, proses sertifikasi, dan proses perizinan dari pemuliaan bibit lokal. Hal ini akan mengurangi ketergantungan pasokan bibit dari luar daerah. Begitu pun untuk program kemandirian pupuk. Hal ini akan mengurangi ketergantungan pupuk NPK yang mana bahan dasar ureanya sangat bergantung dari impor. iii) Informasi *scheduling* tanam, dilakukan dengan menghubungkan info antara pedagang besar yang mengendalikan pasar dan pedagang pengepul di daerah pertanian yang menjadi pemasok komoditas tersebut. Selanjutnya, pedagang pengepul meneruskan info tersebut ke para petani untuk dilakukan menyesuaikan pola tanam sesuai dengan kebutuhan pasar. Terakhir, iv) penyimpanan, khususnya untuk komoditas pangan yang perlu didukung *cold supply chain*, yaitu suatu wadah untuk mempertahankan hasil panen komoditas pertanian. *Buffer stock* yang ada saat ini dapat digunakan untuk mempertahankan dan menyeimbangkan jumlah pasokan dan kebutuhan di pasar. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk menghitung jumlah pasokan yang dapat dijual ke luar daerah sebagai bentuk Kerjasama Antar Daerah (KAD).

7. **Mendorong Kerja sama Antar Daerah (KAD) dan Stabilisasi Suplai Gabai untuk Menjaga**

**Inflasi Komoditas Beras.** Pasokan beras kerap kali didatangkan dari luar Aceh pada periode-periode tertentu. Padahal jika dihitung secara tahunan, produksi beras Aceh mengalami surplus. Gabah dari Aceh dijual ke Sumatera Utara untuk diolah, kemudian beras dijual kembali ke Aceh. Kondisi ini menyebabkan harga beras dapat meningkat/lebih tinggi daripada harga lokal. Beras lokal berpotensi untuk kalah saing dengan beras luar yang kualitasnya lebih baik dan berdampak pada berkurangnya pendapatan. Hal yang dapat dilakukan antara lain menginisiasi optimalisasi Sistem Resi Gudang (SRG) yang dikelola oleh profesional terutama untuk komoditas beras dan meningkatkan kualitas pengolahan padi di Aceh untuk menjadi beras kualitas super. Lebih lanjut, melakukan Kerjasama Antar Daerah (KAD) dapat dilakukan untuk memastikan ketersediaan beras di Provinsi Aceh. KAD dapat dilakukan dalam bentuk gabah, untuk menstabilkan pasokan gabah di Aceh sepanjang tahun. Ataupun, dapat dilakukan langsung dengan berbentuk beras dengan upaya menstabilkan pasokan sepanjang tahun.

# DAFTAR ISTILAH

<b>Administered prices</b>	Salah satu disagregasi inflasi, yaitu untuk komoditas yang perkembangan harganya diatur oleh pemerintah.
<b>Andil inflasi</b>	Sumbangan perkembangan harga suatu komoditas/kelompok barang/kota terhadap tingkat inflasi secara keseluruhan.
<b>APBA</b>	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Rencana keuangan tahunan pemerintah Aceh yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
<b>Bobot inflasi</b>	Besaran yang menunjukkan pengaruh suatu komoditas terhadap tingkat inflasi secara keseluruhan, yang diperhitungkan dengan melihat tingkat konsumsi masyarakat terhadap komoditas tersebut.
<b>Dana Perimbangan</b>	Sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi daerah.
<b>Faktor Fundamental</b>	Faktor fundamental adalah faktor pendorong inflasi yang dapat dipengaruhi oleh kebijakan moneter, yakni interaksi permintaan-penawaran atau <i>output gap</i> , eksternal, serta ekspektasi inflasi masyarakat
<b>Faktor Non Fundamental</b>	Faktor non fundamental adalah faktor pendorong inflasi yang berada di luar kewenangan otoritas moneter, yakni produksi maupun distribusi bahan pangan ( <i>volatile foods</i> ), serta harga barang/jasa yang ditentukan oleh pemerintah ( <i>administered price</i> )
<b>Indeks Ekspektasi Konsumen</b>	Salah satu pembentuk IKK. Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap ekspektasi kondisi ekonomi 6 bulan mendatang, dengan skala 1–100.
<b>Indeks Harga Konsumen (IHK)</b>	Sebuah indeks yang merupakan ukuran perubahan rata-rata harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat pada suatu periode tertentu.

<b>Indeks Kondisi Ekonomi</b>	Salah satu pembentuk IKK. Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini, dengan skala 1–100.
<b>Indeks Keyakinan Konsumen (IKK)</b>	Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi kondisi ekonomi enam bulan mendatang, dengan skala 1–100.
<b>Investasi</b>	Kegiatan meningkatkan nilai tambah suatu kegiatan produksi melalui peningkatan modal.
<b>Inflasi inti</b>	Inflasi inti adalah inflasi yang dipengaruhi oleh faktor fundamental
<b>Liaison</b>	Kegiatan pengumpulan data/statistik dan informasi yang bersifat kualitatif dan kuantitatif yang dilakukan secara periodik melalui wawancara langsung kepada pelaku ekonomi mengenai perkembangan dan arah kegiatan ekonomi dengan cara yang sistematis dan didokumentasikan dalam bentuk laporan
<b>Migas</b>	Minyak dan gas. Merupakan kelompok sektor industri yang mencakup industri minyak dan gas.
<b>Mtm</b>	<i>Month to month</i> . Perbandingan antara data satu bulan dengan bulan sebelumnya.
<b>Omzet</b>	Nilai penjualan bruto yang diperoleh dari satu kali proses produksi.
<b>PDRB</b>	Produk Domestik Regional Bruto. Pendapatan suatu daerah yang mencerminkan hasil kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah tertentu.
<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>	Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas ekonomi suatu daerah seperti hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah.
<b>Perceived risk</b>	Persepsi risiko yang dimiliki oleh investor terhadap kondisi perekonomian sebuah negara
<b>Qtq</b>	<i>Quarter to quarter</i> . Perbandingan antara data satu triwulan dengan triwulan sebelumnya.
<b>Sektor ekonomi dominan</b>	Sektor ekonomi yang mempunyai nilai tambah besar sehingga mempunyai pengaruh dominan pada pembentukan PDRB secara keseluruhan.
<b>Volatile food</b>	Salah satu disagregasi inflasi, yaitu untuk komoditas yang perkembangan harganya sangat bergejolak karena faktor-faktor tertentu.
<b>Yoy</b>	<i>Year on year</i> . Perbandingan antara data satu tahun dengan tahun sebelumnya.

## TIM PENYUSUN

### PENANGGUNG JAWAB

**Rony Widijarto P.**

### KOORDINATOR PENYUSUN

**Hendy Hadiyan**

### TIM PENULIS

**Hafidz Yudhansyah**

**M. Indra Saputra**

**Imam Wahyudi**

**M. Fikrisani**

**Irfan Bagus Rachmanto**

**Handoko**

## KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI ACEH

JL. Cut Mutia No.15, Banda Aceh

Telp. (0651) 32320 ext. 8205 | Fax. (0651) 34116

*Softcopy* dapat diunduh pada tautan:

<https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/Pages/Laporan-Perekonomian-Provinsi-Aceh-Agustus-2024.aspx>.